PEMBERITAAN ISU POLITIK DINASTI DI YOGYAKARTA

(ANALISIS FRAMING MODEL PAN DAN KOSICKI PADA MEDIA *TRIBUNJOGJA.COM* DAN *HARIANJOGJA.COM*)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Oleh

MUHAMMAD NABIEL MARAZIEQ

21321208

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PEMBERITAAN ISU POLITIK DINASTI DI YOGYAKARTA
(ANALISIS FRAMING MODEL PAN DAN KOSICKI PADA MEDIA
TRIBUNJOGJA.COM DAN *HARIANJOGJA.COM)*

Oleh:

MUHAMMAD NABIEL MARAZIEQ

21321208

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: 28 Mei 2025

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D

NIDN. 0506038201

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBERITAAN ISU POLITIK DINASTI DI YOGYAKARTA (ANALISIS FRAMING MODEL PAN DAN KOSICKI PADA MEDIA *TRIBUNJOGJA.COM* DAN *HARIANJOGJA.COM*)

Disusun oleh:
MUHAMMAD NABIEL MARAZIEQ
21321208

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Senin
Tanggal : 9 Juni 2025

Dosen Penguji :

Ketua : **Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D** (_____)
NIDN. 0506038201

Anggota : **Dian Dwi Anisa, S.Pd., M.A.** (_____)
NIDN. 0508019101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Dr. Zaki Habibi., M.Comms
NIDN. 0517078101

HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nabiel Marazieq

Nomor Mahasiswa : 21321208

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini, saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 29 April 2025

Yang menyatakan,

(Muhammad Nabiel Marazieq)

21321208

HALAMAN BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN

PT AKSARA DINAMIKA JOGJA

PENERBIT Harian Jogja

No : 114/ADJ/PEMRED/IV/25
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anton Wahyu Prihartono
Instansi	: Harian Jogja
Jabatan	: Pemimpin Redaksi

Menerangkan bahwa,

Nama	: Muhammad Nabiel Marazieq
Nim	: 21321208
Prodi	: Ilmu Komunikasi
Fakultas	: Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas	: Universitas Islam Indonesia

Mahasiswa berikut telah melakukan penelitian skripsi/tugas akhir di Harian Jogja pada bulan April untuk penyusunan skripsi sarjana (S1), dengan judul skripsi **"PEMBERITAAN ISU POLITIK DINASTI DI YOGYAKARTA (ANALISIS FRAMING MODEL PAN DAN KOSICKI PADA MEDIA *TRIBUNJOGJA.COM* DAN *HARIANJOGJA.COM*)**

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan. Atas Kerjasama dan perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 April 2025

Harian Jogja

Anton Wahyu Prihartono
Pemimpin Redaksi

Bisnis Indonesia group
Jl. AM Sangaji No.41, Jetis, Yogyakarta
0274-583183
Faks. 0274-564440
redaksi@harianjogja.com
iklan@harianjogja.com (iklan)
www.harianjogja.com

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Perbaikilah dirimu, niscaya orang lain akan baik kepadamu"

"Tetaplah berbuat baik meskipun kamu buruk di cerita orang lain"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Pak Mus, Bu Ibad, Mbak Za, Mas Frido, Kay, dan seluruh orang yang masih berkenan berteman dengan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan sepanjang zaman. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Adapun skripsi yang telah penulis selesaikan berjudul **"PEMBERITAAN ISU POLITIK DINASTI DI YOGYAKARTA (ANALISIS FRAMING MODEL PAN DAN KOSICKI PADA MEDIA TRIBUNJOGJA.COM DAN HARIANJOGJA.COM)"**.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan memudahkan segala urusan dunia maupun akhirat kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan inspirasi selama masa perkuliahan.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mustaghfirin dan Ibu Siti Badriyah, serta Mbak Zahra, Mas Frido, dan Adek Kay, atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat terbaik, Alep, Gifton, Rafi, yang telah menjadi saksi perjalanan hidup dari masa kecil hingga menjadi calon sarjana.

6. Bonbale Slow Bar dan Tjahaja Brewhouse, tempat yang memberikan ketenangan dan ide-ide cemerlang dalam proses pengerjaan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 27 April 2025

Muhammad Nabiel Marazieq

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK ..... **iv**

HALAMAN BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **15**

A. Latar Belakang 15

B. Rumusan Masalah 18

C. Tujuan Penelitian 18

D. Manfaat Penelitian 19

E. Tinjauan Pustaka 19

1. Penelitian Terdahulu 19
2. Kerangka Teori 22

F. Metodologi Penelitian 29

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 29
2. Jenis Data 31
3. Data dan Sumber Data 31
4. Pengumpulan Data 32
5. Analisis Data 32
6. Unit Analisis 32

7. Contoh Operasionalisasi Data 34

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 39

A. Deskripsi Umum 39

B. Media Online *Tribunjogja.com* 40

1. Sejarah Tribun Jogja 40
2. Visi dan Misi Tribun Jogja 41
3. Rubrikasi dalam Tribun Jogja 41
4. Struktur Organisasi Tribun Jogja 43

C. Media Online *Harianjogja.com* 44

1. Sejarah Harian Jogja 45
2. Visi Harian Jogja 46
3. Struktur Organisasi Harian Jogja 46

BAB III PEMBAHASAN 48

A. Kategorisasi Pilihan Framing Berita 48

1. Berita *Tribunjogja.com* 48
2. Berita *Harianjogja.com* 62

B. Hasil Wawancara 79

1. Media *Tribunjogja.com* 79
2. Media *Harianjogja.com* 82

BAB IV PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Keterbatasan Penelitian 86

C. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perangkat Framing Model Pan dan Kosicki 29
Tabel 1. 2 Pilihan Berita di *Tribunjogja.com* 31
Tabel 1. 3 Pilihan Berita di *Harianjogja.com* 32
Tabel 1. 4 Contoh Framing Analisis Berita 33
Tabel 3. 1 Hasil Analisis Berita "Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar" 49
Tabel 3. 2 Hasil Analisis Berita "Memahami Asal-Usul Keistimewaan Yogyakarta" 51
Tabel 3. 3 Hasil Analisis Berita "Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI" 52
Tabel 3. 4 Hasil Analisis Berita "Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY" 54
Tabel 3. 5 Hasil Analisis Berita "Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum" 56
Tabel 3. 6 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Yogyakarta, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif" 58
Tabel 3. 7 Hasil Analisis Berita "Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya" 60
Tabel 3. 8 Hasil Analisis Berita "PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X" 62
Tabel 3. 9 Hasil Analisis Berita "Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando" 64
Tabel 3. 10 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY" 65
Tabel 3. 11 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY" 67
Tabel 3. 12 Hasil Analisis Berita "Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI" 69
Tabel 3. 13 Hasil Analisis Berita "Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf" 71

Tabel 3. 14 Hasil Analisis Berita “Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo” 73
Tabel 3. 15 Hasil Analisis Berita “Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo” 75
Tabel 3. 16 Hasil Analisis Berita “Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan” 76
Tabel 3. 17 Hasil Analisis Berita “Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja” 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo *Tribunjogja.com* 40
Gambar 2. 2 Logo *Harianjogja.com* 44

ABSTRAK

Muhammad Nabiel Marazieq. 21321208. ***Pemberitaan Isu Politik Dinasti Di Yogyakarta (Analisis Framing Model Pan Dan Kosicki Pada Media Tribunjogja.Com Dan Harianjogja.Com)*****. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. 2025.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta dikonstruksi oleh dua media online lokal, yaitu *Tribunjogja.com* dan *Harianjogja.com*. Isu ini mencuat setelah pernyataan kontroversial dari politikus PSI, Ade Armando, yang menilai bahwa sistem pemerintahan di Yogyakarta merupakan bentuk politik dinasti. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Pan dan Kosicki yang mencakup empat struktur utama: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media cenderung membingkai isu ini sebagai bentuk pembelaan terhadap keistimewaan Yogyakarta, namun dengan strategi yang berbeda. *Tribunjogja.com* membangun framing melalui narasi historis, landasan konstitusional, dan penggunaan kutipan tokoh-tokoh otoritatif. Sebaliknya, *Harianjogja.com* lebih fokus pada dinamika masyarakat dan respons lokal yang muncul dengan struktur berita yang lebih sederhana dan penggunaan narasumber yang terbatas. Perbedaan tersebut menunjukkan bagaimana masing-masing media mengonstruksi realitas sosial sesuai dengan orientasi redaksionalnya.

Kata kunci: Framing, Politik Dinasti, Keistimewaan Yogyakarta, Pan dan Kosicki, *Tribunjogja.com*, *Harianjogja.com*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlepas dari fakta bahwa Kesultanan Yogyakarta secara *de facto* dan *de jure* terbebas dari kekuasaan Hindia-Belanda, Yogyakarta tetap menjadi salah satu wilayah istimewa di Indonesia. Yogyakarta memiliki sistem pemilihan gubernur unik yang mengakui pemerintahan istimewa tersebut; Sri Sultan Hamengkubuwono bertakhta sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam bertakhta sebagai wakil gubernur (Ramadhania, 2013). Mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU-KDIY). UU-KDIY sendiri secara rinci baru sah secara hukum pada tahun 2012 setelah pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Undang-Undang itu menyatakan, Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam lima bidang, meliputi pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintahan DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang (Thontowi, 2019).

Berbagai polemik datang baik saat proses penetapan UU-KDIY atau setelah ditetapkannya UU tersebut. Salah satunya terjadi pada tahun 2011 saat belum ditetapkannya UU-KDIY. Polemik muncul dari pemimpin tertinggi Indonesia yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat berada dalam rapat terbatas bersama para menteri di istana, SBY mengontraskan konsep demokrasi dengan monarki. Hal ini menjadi awal mula dimana isu keistimewaan Yogyakarta menjadi pusat perhatian di tingkat nasional, sekaligus menandai dimulainya konflik antara pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Partai Demokrat dengan masyarakat di Yogyakarta (Arifin, 2014).

Meskipun setelah peristiwa itu presiden meminta maaf atas pernyataannya terkait monarki, namun polemik tersebut tetap belum berhenti. Pemerintah pusat dan masyarakat Yogyakarta memiliki keinginan yang sama-sama kuat dan tidak menemukan titik terang, yaitu terkait mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Yogyakarta. Didasari oleh UUD 1945 pasal 18 ayat 4, pemerintah ingin melakukan mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan sistem pemilihan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sementara masyarakat Yogyakarta yang berlandaskan pada UUD 1945 pasal 18 B dan UU No. 5 tahun 1974 pasal 91 huruf b menginginkan penetapan Sultan dan Paku Alam dalam pengangkatan keduanya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Yogyakarta.

Tidak berhenti disitu, polemik terkait sistem monarki atau politik dinasti di Yogyakarta kembali memanas pada tahun 2023. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyebut adanya praktik politik dinasti di Yogyakarta karena Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipilih melalui pemilihan umum. Pernyataan Ade Armando tersebut berupa video yang diunggah di Twitter pada 2 Desember 2023. Dalam video itu, ia mengomentari aksi mahasiswa di Yogyakarta yang menolak politik dinasti. Menurut Ade Armando, aksi mahasiswa menjadi ironis karena para mahasiswa itu berada di wilayah yang mempraktikkan politik dinasti itu sendiri.

Pernyataan yang dilontarkan oleh Ade Armando menjadi topik yang ramai diperbincangkan di berbagai media baik media nasional maupun lokal, termasuk *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com.* Sebagai media lokal yang cukup besar di Yogyakarta, *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* cukup aktif dalam memberitakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isu lokal, salah satunya adalah isu politik dinasti di Yogyakarta yang dilontarkan Ade Armando beberapa waktu lalu. Namun penelitian ini tidak membahas isu mengenai politik dinasti di Yogyakarta secara mendalam, melainkan penelitian ini akan membahas bagaimana kecenderungan kedua media dalam memberitakan isu tersebut melalui sebuah teori analisis framing.

Harianjogja.com atau yang biasa disebut dengan Harjo merupakan salah satu media lokal asal Yogyakarta yang didirikan pada 20 Mei 2008. Media ini turut berkontribusi dalam meramaikan persaingan koran lokal di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai salah satu media lokal di Yogyakarta, Harjo memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Naya (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *Harianjogja.com* menyampaikan pemberitaan dengan menggunakan bahasa yang familiar bagi masyarakat Yogyakarta, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh pembacanya.

Sementara itu, *Tribunjogja.com* adalah bagian dari Grup Kompas Gramedia yang didirikan oleh Petrus Kanisius Ojong dan Jakoeb Oetama pada 28 Juni 1965. Media

Kompas menyiarkan berita nasional, sedangkan Tribun Network menyiarkan berita lokal atau daerah di berbagai provinsi, termasuk *Tribunjogja.com*. Redaksi di media lokal ini bersifat otonom, sehingga meskipun merupakan bagian dari jaringan koran daerah yang dimiliki oleh konglomerasi Grup Kompas Gramedia, *Tribunjogja.com* bersama cabang Tribun lainnya di berbagai daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan redaksionalnya.

Analisis framing pada dasarnya adalah jenis analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas. Selain itu, analisis framing juga digunakan untuk melihat bagaimana media memahami dan membingkai peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih media online *Harianjogja.com* sebagai subjek penelitian karena melihat latar belakang media ini yang sangat erat dengan masyarakat Yogyakarta. *Harianjogja.com* terkenal dengan pemberitaan yang cenderung mengangkat budaya lokal. Pada awal terbitnya, media ini juga menggunakan istilah-istilah lokal dalam rubrik yang mereka gunakan, seperti *angkringan, unek-unek,* dan *jagongan.*

Kedekatan yang kuat antara *Harianjogja.com* dengan Yogyakarta dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kecenderungan media ini untuk berpihak pada kepentingan lokal dalam pemberitaan terkait isu-isu daerah. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam penelitian berjudul "Independensi Media Lokal di Yogyakarta" yang dilakukan oleh Gilang Jiwana Adikara, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa *Harianjogja.com* cenderung berhati-hati dalam memberikan kritik kepada pemerintah Yogyakarta karena sebagian saham perusahaan media ini dimiliki oleh kerabat Keraton Yogyakarta.

Tribunjogja.com memiliki pola yang hampir serupa. Meskipun tidak memiliki latar belakang yang cukup erat dengan Yogyakarta sebagaimana *Harianjogja.com*, namun media ini tetap memiliki kecenderungan untuk berpihak pada pemerintahan Yogyakarta maupun kepentingan lokal lainnya. Dalam penelitian Adikara (2022) yang membahas tentang hubungan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konflik lahan di DIY, disebutkan bahwa media lokal seperti *Tribunjogja.com* dan *Harianjogja.com* menganggap bahwa Kasultanan Ngayogyakarta telah menggunakan hak atas tanah yang diberikan melalui Undang-Undang Keistimewaan dengan cara yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat umum. Pemberitaan kedua media tersebut cenderung tidak

mengandung kritik terhadap isu lokal yang menjadi sorotan publik.

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan kecenderungan media dalam memberitakan suatu isu, salah satunya adalah sejarah berkembangnya media tersebut. Terkadang terdapat media yang cenderung menyudutkan suatu pihak dalam pemberitaannya. Benar atau tidaknya isu yang diberitakan, media tetap akan mengonstruksinya sesuai dengan ideologi medianya. Hal ini akan dibahas menggunakan salah satu teori dalam sebuah media yaitu analisis framing.

B. Rumusan Masalah

Yogyakarta adalah daerah istimewa di Indonesia dengan keunikan sistem pemerintahan yang mempertahankan peran Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU-KDIY) yang disahkan pada tahun 2012. Mekanisme ini telah menimbulkan polemik, terutama saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik konsep monarki dalam konteks demokrasi pada tahun 2011 dan pernyataan Ade Armando pada tahun 2023 yang menyoroti politik dinasti di Yogyakarta.

Penelitian ini berfokus pada analisis framing yang dilakukan oleh *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* dalam pemberitaan mengenai isu politik dinasti di Yogyakarta. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kedua media ini cenderung mendukung pemerintah Yogyakarta dalam pemberitaan isu-isu lokal. Namun, belum diketahui bagaimana kedua media tersebut membingkai isu politik dinasti di Yogyakarta yang menjadi topik sensitif karena melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana framing pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta pada media online *Tribunjogja.com*?
2. Bagaimana framing pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta pada media online *Harianjogja.com*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian

ini bertujuan untuk:

a. Menganalisis bagaimana media online *Tribunjogja.com* dalam membingkai pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta
b. Menganalisis bagaimana media online *Harianjogja.com* dalam membingkai pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian mengenai analisis pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta pada media online *Tribunjogja.com* dan *Harianjogja.com* ini diharapkan dapat memberikan sumbangan intelektual dan meningkatkan pemahaman tentang teori analisis framing pada media online.

b. Manfaat Praktis

   Bagi para pembaca, penelitian mengenai analisis pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta pada media online *Tribunjogja.com* dan *Harianjogja.com* ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait praktik teori analisis framing yang terjadi di media online *Tribunjogja.com* dan *Harianjogja.com.*

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal yang diterbitkan di Jurnal Komunikasi oleh Catur Nugroho (2014), Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Jurnal ini berjudul "Konstruksi Berita Kontroversi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (Analisis Framing Pan Dan Kosicki Terhadap Berita Surat Kabar Harian Kompas Dan Kedaulatan Rakyat Edisi Januari 2011-Maret 2011)". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media membentuk realitas menjadi berita dengan memperhatikan opini, sikap pandangan, dan pendapat masyarakat, serta tanggapan, kritik, dan saran yang terkait dengan isu keistimewaan Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan model analisis framing Pan dan Kosicki.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis teks berita, foto, dan grafis yang dimuat dalam Harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat, mulai dari 1 Januari 2011 hingga 31 Maret 2011. Pemilihan Kedaulatan Rakyat dilakukan karena representatif sebagai media lokal yang secara konsisten memperjuangkan kepentingan daerah. Koran harian terbesar di Indonesia, Kompas, banyak meliput kontroversi tentang rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta, sehingga dipilih sebagai representasi media nasional.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memperbesar dramatisasi suatu peristiwa melalui framing. Kompas mengonstruksi informasi dengan cerdas, tepat, dan menggunakan bahasa yang sopan. Fokus Kompas lebih condong pada proses pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Di sisi lain, KR cenderung menggunakan bahasa yang menantang dan mendukung keinginan masyarakat Yogyakarta dengan memberikan ruang lebih besar untuk pendapat dan pernyataan yang mendukung pandangan tersebut.

Kedua, jurnal yang diterbitkan oleh Budiyono (2016) di Jurnal IPTEK-KOM. Jurnal berjudul "Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media (Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Pada Harian Kompas dan Koran Tempo)," menekankan bagaimana media massa mengubah cara orang melihat masalah politik dinasti di pemerintahan Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara yang digunakan oleh media untuk membuat narasi tentang masalah politik dinasti dan bagaimana mereka menggunakan teknik ini untuk membentuk realitas.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis framing berdasarkan model yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki. Alasan pemilihan metode tersebut adalah karena framing, menurut pandangan Pan dan Kosicki, merupakan suatu proses yang mengarah pada penonjolan pesan tertentu dalam berita, dengan menempatkan informasi tertentu lebih dominan dibandingkan yang lain, sehingga mempengaruhi perhatian pembaca terhadap pesan tersebut. Teks berita yang dimuat di Harian Kompas dan Koran Tempo pada bulan Oktober 2013 membahas masalah politik dinasti di pemerintahan Banten, khususnya pendapat

tentang dinasti gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Teks-teks tersebut digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Harian Kompas menggunakan sumber berita yang relevan, judul utama (*headline*), dan pendekatan piramida terbalik untuk menceritakan masalah politik Dinasti Ratu Atut di Provinsi Banten. Sebaliknya, Koran Tempo menyebut masalah politik dinasti sebagai hal yang sangat penting dan luar biasa yang perlu ditangani oleh semua pihak jika kita ingin memahami dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Koran Tempo menggambarkan masalah politik dinasti Ratu Atut sebagai contoh komunikasi politik yang kontroversial, mengulas berita tentang pernyataan Gubernur Ratu Atut bahwa pemerintahan Banten tidak memiliki dinasti. Sesuai dengan aturan, gubernur tersebut dipilih oleh rakyat sebagai calon pemimpin daerah.

Ketiga, jurnal yang terdapat dalam Jurnal Sastra dan Bahasa karya Imelda Dwi Nainggolan et al. (2023), mahasiswa Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur. Jurnal ini berjudul "Analisis Framing Pemberitaan Puan Maharani Terhadap Isu Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja di Portal Berita Kompas.com dan Detik.com pada Edisi Oktober 2020". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana pemberitaan Puan Maharani mengenai isu peraturan perundang-undangan Cipta Kerja disajikan dalam portal berita Kompas.com dan Detik.com pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, serta menggunakan metode analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Model analisis framing Entman terdiri dari empat elemen, yaitu identifikasi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi perlakuan.

Studi ini menemukan bahwa *Kompas.com* dan *Detik.com* berbeda dalam pemilihan kosakata untuk menyajikan berita. Perbedaan ini terlihat dalam kosakata yang mereka gunakan untuk menggambarkan berita. Detik.com menggunakan kosa kata yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Contohnya adalah dengan penggunaan kata-kata ilmiah yang terbatas, penggunaan elemen bahasa daerah, dan penggunaan kata-kata yang memiliki makna negatif saat menyampaikan berita. Selain itu, *Kompas.com* lebih suka menggunakan kalimat majemuk dengan

informasi yang lebih lengkap ketika membuat kalimat menjadi paragraf.

2. Kerangka Teori

a. Pemberitaan dalam Media Online

Salah satu platform yang sangat berguna untuk menyampaikan informasi ke publik adalah media online. Kemudahan akses dalam mencari berbagai berita di media online menjadi salah satu alasan mengapa saat ini banyak masyarakat lebih memilih menggunakannya dibandingkan dengan media konvensional. Namun, penting untuk dipahami bahwa pemberitaan di media online seringkali tidak bebas nilai dan tidak sekadar menyalurkan fakta secara apa adanya. Setiap berita yang tersaji merupakan hasil konstruksi, yakni proses seleksi, penekanan, dan interpretasi terhadap fakta yang dilakukan oleh wartawan dan redaksi media (Setiowati & Suciati, 2019). Berita bukanlah cerminan objektif dari realitas, melainkan produk interaksi antara fakta di lapangan dengan sudut pandang, nilai, serta kepentingan individu atau institusi yang terlibat dalam proses pemberitaan.

Setiap media memiliki standar nilai berita dalam proses produksinya. Nilai berita tersebut dapat berbeda di setiap media karena masing-masing media memiliki kebijakan redaksinya masing-masing, sehingga nilai berita yang ditonjolkan disesuaikan dengan kebijakan redaksi tersebut. Harcup dan O'neill (seperti yang dikutip dalam Wahyuti, 2015) berpendapat bahwa nilai berita terbagi ke dalam 11 kategori, diantaranya adalah:

1) Kekuatan elit: nilai berita lebih berfokus pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah
2) Selebriti: nilai berita lebih berfokus pada tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas seperti artis
3) Hiburan: nilai berita lebih berfokus pada sesuatu yang memberikan kesenangan pada penontonnya
4) Keterkejutan: nilai berita lebih berfokus pada hal-hal yang mengejutkan atau tidak biasa seperti seorang ibu yang menganiaya anaknya
5) Berita buruk: berita yang mengandung informasi yang buruk dan tidak diharapkan, seperti kecelakaan

6) Berita baik: berita yang mengandung informasi yang baik dan diharapkan, seperti penemuan orang yang hilang
7) Berita besar: berita yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat, seperti kenaikan harga beras dan bahan pokok
8) Relevan: nilai berita yang *relate* atau memiliki kesamaan secara geografis maupun psikologis dengan masyarakat. Secara geografis misalnya berita tentang pembangunan tol di Yogyakarta akan lebih relevan dengan masyarakat Yogyakarta karena memiliki kesamaan geografis. Sementara secara psikologis misalnya berita mengenai perang di Palestina yang diberitakan di media Indonesia akan relevan karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim.
9) Berita *follow-up*: nilai berita yang menginformasikan *update* dari isu-isu yang telah diberitakan sebelumnya
10) Agenda media: nilai berita yang berfokus pada isu yang sesuai dengan kepentingan media itu sendiri

Media online lahir sebagai inovasi dari media massa. Suryawati menyebutkan bahwa media online disebut sebagai media massa baru (*new media*) atau media modern, tidak termasuk dalam kategori media massa cetak atau media elektronik (seperti dikutip dalam Siregar & Qurniawati, 2022). Perkembangan media online yang semakin banyak peminatnya membuat mayoritas perusahaan media turut serta beradaptasi dengan hadirnya media online. Media yang dulu hanya hadir dalam bentuk surat kabar, kini sudah mulai hadir dalam bentuk online. Kemampuan untuk menyebarkan informasi secara serempak dan cepat menjadi salah satu alasan media online dipilih sebagai platform penyebaran berita. Berbagai informasi yang terdapat di media tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut juga yang menandai berhasil atau tidaknya media sebagai *agent of change.* Nur (2021) menyebutkan beberapa pengaruh media online, diantaranya adalah:

1) Aspek kognitif: media online dapat membuat seseorang yang awalnya tidak mengetahui suatu informasi menjadi mengetahuinya. Misalnya orang Indonesia tidak akan mengetahui keadaan warga yang ada di

Palestina, namun dengan adanya media online informasi terkait kondisi di luar negeri tersebut dapat tersampaikan hingga ke Indonesia.

2) Aspek afektif: media online dapat membuat seseorang yang awalnya suka menjadi tidak suka atau sebaliknya. Misalnya seseorang menjadi takut untuk mendaki gunung setelah melihat informasi pendaki yang hilang di media online.
3) Aspek konatif: media online dapat mengubah sikap seseorang. Misalnya seseorang yang rutin membaca wawasan keagamaan di media online akan membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik.

Media online menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat yang saat ini semakin membutuhkan informasi yang cepat dan dapat diakses di berbagai tempat. Berbeda dengan media cetak yang memiliki jadwal terbit berkala (harian, mingguan dan bulanan), media online bisa menerbitkan berita kapan saja bahkan sesaat setelah suatu peristiwa terjadi. Namun banyaknya kemudahan dari hadirnya media online bukan berarti menjadikannya tidak memiliki kekurangan. Kecepatan dalam menyebarkan berita membuat media online terkadang terlalu fokus memperbanyak produksi berita dan mengabaikan isi atau kualitas berita tersebut. Misalnya dalam memberitakan sebuah peristiwa, media online bisa menerbitkan 3-4 berita dengan judul yang berbeda namun isinya sama. Hal ini dilakukan hanya untuk meningkatkan *engagement* media online tersebut sehingga tidak kalah eksistensinya dengan media online lain.

b. Teori Analisis Framing dalam Pemberitaan

Framing atau pembingkaian merupakan konsep dalam sebuah pemberitaan. Untuk mengetahui bagaimana media mengonstruksi sebuah isu dalam pemberitaannya maka dilakukan analisis framing. Eriyanto (2002) menjelaskan bahwa analisis framing dapat dibedakan ke dalam tiga kategori besar berdasarkan tingkat strukturnya. Pertama adalah level makro-struktural yang melihat bagaimana media memaknai peristiwa dalam konteks wacana yang lebih luas. Kedua adalah level mikro-struktural, yaitu bagaimana media memilih fakta-fakta tertentu untuk disorot dan mengabaikan bagian lainnya.

Ketiga adalah elemen retoris yang menekankan bagaimana media menyajikan dan menegaskan fakta yang telah dipilih. Elemen retoris dapat dilihat dari pemilihan kata, penggunaan kalimat tertentu, metafora, serta visualisasi seperti gambar atau grafik.

Meskipun ketiga elemen tersebut menjadi acuan umum dalam berbagai model framing, namun masing-masing model memiliki penekanan yang berbeda. Model yang diperkenalkan oleh Edelman dan Entman misalnya, lebih menitikberatkan pada bagaimana suatu peristiwa didefinisikan dan bagaimana fakta dipilih oleh media. Entman (dalam Eriyanto, 2002) menyebut bahwa framing memiliki empat fungsi utama, yakni mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan solusi. Akan tetapi, baik Edelman maupun Entman tidak memberikan penjabaran yang rinci mengenai elemen retoris dalam teks berita.

Hal yang berbeda terlihat pada model yang dikembangkan oleh Pan dan Kosicki. Ia menawarkan pendekatan yang lebih struktural dengan menyusun kerangka analisis framing ke dalam empat struktur utama, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris (Pan & Kosicki, 1993). Keempat struktur ini memungkinkan peneliti menganalisis berita tidak hanya dari segi isi, tetapi juga dari cara penyusunan kalimat, urutan informasi, serta penekanan gaya bahasa yang digunakan untuk membingkai peristiwa. Selain itu, keunggulan lain dari model ini adalah adanya penekanan yang kuat pada aspek retoris yang menjadi elemen penting dalam membentuk opini publik. Dalam menganalisis media online, model Pan dan Kosicki sangat relevan mengingat struktur berita di media online sangat mengandalkan *headline*, *lead,* pemilihan kata, dan elemen visual sebagai sarana framing.

Menurut McCombs (dalam Butsi, 2019) framing merupakan perkembangan dari teori agenda setting. Teori agenda setting menyebutkan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media akan berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep framing yang mengasumsikan bahwa media tidak hanya memberikan informasi terkait isu apa yang harus diberitakan, namun juga bagaimana isu tersebut dipahami oleh

masyarakat. Media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu isu. Berita yang dibuat oleh media mengandung instrumen yang secara khusus dirancang oleh media itu sendiri untuk membentuk cara masyarakat dalam melihat dan memahami isu tersebut. Sehingga yang terjadi adalah adanya penggiringan opini masyarakat pada suatu peristiwa tertentu dan terjadinya mobilisasi massa (Eriyanto, 2002).

Framing yang dilakukan oleh media tidak dilakukan begitu saja tanpa ada yang melatar belakanginya. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (dalam Akbar, 2023) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cara media dalam membingkai suatu isu, diantaranya adalah:

1) Faktor Individual: framing dapat dipengaruhi oleh jurnalis yang memproduksi sebuah berita. Latar belakang seorang jurnalis baik dari segi sifat, pendidikan, atau pengalaman pribadinya akan berpengaruh terhadap isi berita yang ia tulis.
2) Rutinitas Media: hal ini berkaitan dengan rutinitas yang dilakukan oleh pekerja media dalam proses memproduksi berita. Rutinitas ini sangat berpengaruh terhadap proses produksi berita yang dilakukan oleh media.
3) Organisasi Media: framing dipengaruhi oleh pemilik dari media itu sendiri. Pemilik media memiliki kebijakan untuk menentukan isu apa yang akan diangkat atau tidak dalam pemberitaan medianya.
4) Ekstramedia: framing dipengaruhi oleh faktor selain dari media itu sendiri. Misalnya ada kelompok yang menuntut media karena merasa dirugikan dengan pemberitaannya, maka media tersebut akan menyesuaikan kembali isi pemberitaannya.
5) Ideologi Media: framing dipengaruhi oleh dasar pemikiran atau kebijakan sebuah media. Dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu isu, media memiliki kekuasaan untuk membingkai suatu isu didasarkan pada ideologi yang dianut oleh media tersebut.

Selain itu, Sudirman Tebba (dalam Pratiwi, 2018) juga menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi suatu isu akan diangkat atau diabaikan oleh media, diantaranya adalah:

1) Faktor ideologis: pemberitaan yang dilakukan oleh media sangat bergantung pada latar belakang media itu sendiri. Misalnya media yang memiliki latar belakang keagamaan, akan cenderung mengangkat isu-isu agama dan mengabaikan isu lain seperti politik, ekonomi, dan sebagainya.
2) Faktor politis: sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara. Ketika pemilik media merangkap sebagai pemimpin suatu partai politik, maka pemberitaan dalam media tersebut akan cenderung berpihak pada kebijakan-kebijakan yang mendukung partai politiknya.
3) Faktor bisnis: pemberitaan yang dilakukan oleh media bergantung pada seberapa besar pemberitaan tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan media, baik keuntungan secara material maupun non-material. Misalnya saat musim piala dunia, media akan sering memberitakan seputar sepak bola karena banyak masyarakat yang menanti informasi tersebut.

c. Politik Dinasti dalam Pemerintahan Yogyakarta

Sistem pemerintahan di Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Selain gubernur dan wakil gubernur yang diangkat melalui penetapan, keunikan sistem pemerintahan di Yogyakarta terletak pada penggabungan dua wilayah kerajaan, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman (Ramadhania, 2013). Sultan tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga kewenangan yang dimiliki tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga simbolis dan kultural (Nurwanto et al., 2022).

Legalitas keistimewaan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara eksplisit mengakui hak asal-usul Yogyakarta serta memberikan lima bentuk kewenangan khusus: tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan melalui mekanisme pemilu, melainkan melalui proses penetapan oleh presiden atas usulan kasultanan dan kadipaten yang memiliki legitimasi sejarah dan budaya (Rifayani et al., 2013). Meskipun tampak tidak demokratis secara prosedural karena tidak melalui pemilu, sistem ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi substansial, sebab pengakuan terhadap keistimewaan ini telah mendapat legitimasi konstitusional dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Penting untuk membedakan antara sistem dinasti di Yogyakarta dengan praktik politik dinasti dalam konteks umum. Sistem pemerintahan di Yogyakarta merupakan bentuk monarki konstitusional yang diakui secara hukum, yaitu kepemimpinan diturunkan berdasarkan garis keturunan yang telah mapan sejak berdirinya Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755. Hal ini berbeda dengan politik dinasti yang umumnya merujuk pada praktik kekuasaan politik yang dikuasai oleh satu keluarga melalui manipulasi proses demokratis (Rahma et al., 2022).

Politik dinasti sering kali dikritik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem yang menjunjung demokrasi, kekuasaan seharusnya diperoleh berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan hubungan keluarga. Praktik ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat dan menurunkan kualitas demokrasi dengan membatasi partisipasi politik yang adil dan setara bagi seluruh warga negara (Rahmah & Maulia, 2024). Sebaliknya, sistem dinasti di Yogyakarta memiliki legitimasi historis dan konstitusional yang kuat, serta telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tolo (2013) menyebutkan bahwa Yogyakarta telah mengalami transformasi penting dalam sistem kekuasaannya, dari yang sebelumnya bersifat otokratis (kekuasaan sepenuhnya terpusat di tangan kraton) menjadi bentuk "demokrasi ala Yogyakarta" yang lebih partisipatif dan berorientasi pada rakyat. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran sumber legitimasi kekuasaan dari kraton kepada masyarakat luas. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai hak eksklusif keturunan bangsawan,

melainkan sebagai amanah yang berasal dari dan untuk rakyat. Masyarakat Yogyakarta telah mengalami perubahan cara pandang yang signifikan mengenai sumber kekuasaan. Jika dahulu kekuasaan dianggap bersumber dari kraton dan bersifat *top-down* (dari atas ke bawah), kini masyarakat mulai memandang bahwa kekuasaan berasal dari rakyat (*bottom-up*).

Meskipun banyak kritik dari berbagai pihak luar daerah, masyarakat Yogyakarta tetap mendukung keberlanjutan sistem dinasti ini karena telah menjadi bagian integral dari identitas budaya, sejarah, dan struktur sosial mereka. Masyarakat Yogyakarta, terutama di wilayah pedesaan, masih memegang nilai-nilai paternalistik dan menghormati otoritas tradisional Sultan sebagai pemimpin adat dan birokrat (Paryanto & Nurmandi, 2016). Keistimewaan Yogyakarta juga telah menjadi identitas kolektif yang membanggakan bagi warganya, sehingga setiap upaya untuk mengubah sistem ini sering kali ditolak karena dianggap mengancam tatanan sosial dan budaya yang telah mapan (Efendi, 2016).

Sistem pemerintahan di Yogyakarta telah menunjukkan efektivitasnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pada tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) menempatkan DIY sebagai provinsi ketiga terbersih dari korupsi di Indonesia, dengan skor 74,6. Penilaian ini didasarkan pada persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap integritas pelayanan publik, serta efektivitas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dinasti di Yogyakarta, ketika dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dapat menghasilkan tata kelola yang baik.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing menurut Pan dan Kosicki (1993) membuat suatu pesan lebih menonjol dan menempatkan informasi

lebih daripada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Dalam pendekatan Pan dan Kosicki, perangkat framing dapat dibagi ke dalam empat struktural, diantaranya adalah:

a. *Struktur sintaksis*, mengacu pada cara wartawan menyampaikan peristiwa, pernyataan, pendapat, kutipan, dan pengamatan tentang peristiwa ke dalam susunan umum berita, seperti judul, latar, headline, dan kutipan yang diambil.
b. *Struktur skrip*, mengacu pada bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa dalam berita. Struktur ini mengacu pada strategi cerita dan bertutur yang digunakan wartawan untuk mengemas peristiwa ke dalam berita.
c. *Struktur tematik*, melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil. Struktur ini mengacu pada bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.
d. *Struktur retoris*, yaitu berkaitan dengan cara wartawan menekankan makna tertentu dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan menggunakan kata, idiom, grafik, dan gambar untuk mendukung tulisan dan memberi pembaca makna tertentu.

Tabel 1. 1 Perangkat Framing Model Pan dan Kosicki (Eriyanto, 2002)

Struktur	**Perangkat Framing**	**Unit Analisis**
Sintaksis	Skema berita	*Headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, pernyataan, penutup
Skrip	Kelengkapan berita	*What, who, where, when, why*, *how* (5W + 1H)
Tematik	Detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Retoris	Leksikon, grafis, metafora	Kata, idiom, foto, grafik

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang orisinal dan relevan langsung dari sumbernya, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan terdiri dari berita-berita yang diterbitkan oleh media online *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com.* Rentang waktu pengumpulan data ini mencakup periode dari Desember 2023 hingga Januari 2024. Pada rentang waktu tersebut, intensitas pemberitaan seputar isu politik dinasti di Yogyakarta cukup tinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka yang mencakup berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel. Studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan dan informasi tambahan yang relevan dan dapat memperkaya analisis serta interpretasi data utama. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat menyusun kerangka teoritis yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data dari kalimat dalam pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta yang mengandung 4 dimensi struktural Pan dan Kosicki. Berita yang diambil adalah pemberitaan di *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* pada periode 1 Desember 2023 hingga 30 Januari 2024 dengan kata kunci "Ade Armando". Kata kunci dipilih karena pemberitaan terkait kasus Ade Armando yang mengomentari status Keistimewaan Yogyakarta membuat isu tentang politik dinasti di Yogyakarta ramai diberitakan oleh *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com.*

4. Pengumpulan Data

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Observasi

Peneliti melakukan teknik observasi untuk mencari objek penelitian berupa teks berita terkait isu politik dinasti di Yogyakarta pada *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com*.

b. Dokumentasi

Peneliti mendokumentasikan berita dengan mencatat judul serta tanggal terbit berita. Untuk melakukan dokumentasi peneliti terlebih dahulu harus memahami objek penelitian yaitu berita-berita terkait isu politik dinasti di Yogyakarta pada media *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com*. Berita yang layak untuk dianalisis akan diseleksi menggunakan teknik *purposive sampling,* kemudian mengunduh sampel berita yang terseleksi.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan untuk menciptakan sebuah kesimpulan. Bogdan dan Biklen (dalam Akbar, 2019) menyebutkan bahwa analisis data adalah memilih data kemudian mengolahnya sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diberitahukan kepada khalayak. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari berita online *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* yang berkaitan dengan masalah politik dinasti di Yogyakarta. Terlebih dahulu, data yang berupa kalimat atau kata akan dikelompokkan sesuai dengan teori analisis framing Pan dan Kosicki. Teori ini terdiri dari struktur sintaksis (strategi wartawan untuk menyusun berita), skrip (strategi wartawan untuk menyampaikan berita), tematik (strategi wartawan untuk mengungkapkan pendapatnya), dan retoris (strategi wartawan untuk menekankan berita).

6. Unit Analisis

a. Tribunjogja.com

Berita yang akan dianalisis dipilih dengan sampling acak sederhana (*simple random sampling*) terhadap dua puluh satu berita di *Tribunjogja.com*

terkait pemberitaan politik dinasti di Yogyakarta dalam rentang waktu 1 Desember 2023 - 30 Januari 2024. Berikut adalah berita yang terpilih:

Tabel 1. 2 Pilihan Berita di *Tribunjogja.com*

No.	Kode Berita	Judul Berita
1.	20	PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X (7 Desember 2023)
2.	1	Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar" oleh Tribun Jogja (3 Desember 2023)
3.	11	Polda DIY Lakukan Penyelidikan Dugaan Ujaran Kebencian oleh Ade Armando (10 Desember 2023)
4.	13	Komisi A DPRD DIY Dukung Polda DIY Cepat Tangani Proses Hukum Pelaporan Terhadap Ade Armando PSI (29 Januari 2024)
5.	7	Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum (3 Desember 2023)
6.	17	Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI (3 Desember 2023)
7.	5	Memahami Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta (8 Desember 2023)
8.	2	Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY (4 Desember 2023)
9.	19	Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya (5 Desember 2023)
10.	14	Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif (4 Desember 2023)

b. Harianjogja.com

Berita yang akan dianalisis berdasarkan sampling acak sederhana terhadap dua puluh berita di *Harianjogja.com* terkait pemberitaan politik dinasti di Yogyakarta dalam rentang waktu 1 Desember 2023 - 30 Januari 2024. Berikut adalah berita yang terpilih:

Tabel 1. 3 Pilihan Berita di *Harianjogja.com*

No.	Kode Berita	Judul Berita
1.	12	Ade Armando singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY (4 Desember 2023)
2.	15	Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando (3 Desember 2023)
3.	2	Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja (5 Desember 2023)
4.	1	Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY (4 Desember 2023)
5.	6	Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo (5 Desember 2023)
6.	20	Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI (7 Desember 2023)
7.	17	Ade Armando Ditantang Debat Ilmiah Soal Keistimewaan DIY (7 Desember 2023)
8.	8	Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf (3 Desember 2023)
9.	10	Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan (3 Desember 2023)
10.	14	Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo (6 Desember 2023)

7. Contoh Operasionalisasi Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam metode Pan dan Kosicki, perangkat framing dapat dibagi ke dalam empat struktural, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. Berikut adalah contoh berita yang dianalisis menggunakan metode tersebut:

a. Judul Berita : "*Ade Armando Minta Maaf Soal Komentar Politik Dinasti di Jogja, Netizen Ingin PSI Klarifikasi*" (4 Desember 2023)

Sumber : *Harianjogja.com*

Tabel 1. 4 Contoh Framing Analisis Berita

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	Headline	“Ade Armando Minta Maaf Soal Komentar Politik Dinasti di Jogja, Netizen Ingin PSI Klarifikasi”
	Lead	Ade Armando, politikus PSI bikin gaduh saat berkomentar soal politik dinasti.
	Latar Informasi	Latar informasi dalam berita yaitu mengenai permintaan netizen terhadap PSI untuk meminta maaf dan klarifikasi atas kasus yang dilakukan oleh Ade Armando.
	Kutipan	Kutipan yang ditulis dalam berita ini berasal dari pernyataan beberapa pihak, yaitu Ade Armando, Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY, dan komentar netizen.
	Pernyataan	Pernyataan dalam berita disampaikan oleh beberapa narasumber dalam bentuk kutipan langsung dan tidak langsung, diantaranya adalah: a. "Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando. b. Namun yang jadi persoalan, Ade menyebut jika permintaan maafnya ini adalah arahan dari PSI yang diterima oleh netizen sebagai "bukan inisiatifnya sendiri". c. "Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," ia menambahkan. d. "Orang ini membuat video permintaan maaf atas arahan DPP, bukan inisiatif sendiri," tulis salah satu netizen.
	Penutup	Penutup dalam berita ini berupa penegasan bahwa netizen meminta agar PSI memberikan klarifikasi atas posisi Ade

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
		Armando dan segala pernyataannya. Penutup diperkuat dengan kutipan dari salah satu netizen.
Skrip	*What*	Netizen meminta PSI untuk klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan oleh Ade Armando.
	Who	Netizen
	Where	Tuntutan yang dilontarkan netizen kepada PSI disampaikan di platform Twitter.
	When	Senin, 4 Desember 2023
	Why	Netizen menuntut PSI untuk klarifikasi dan meminta maaf karena netizen menilai permintaan maaf yang disampaikan Ade Armando bukan dari inisiatifnya sendiri, melainkan atas permintaan PSI.
	How	Setelah membuat video kontroversi yang menyatakan adanya praktik politik dinasti di Yogyakarta, Ade Armando kemudian membuat video klarifikasi dan permintaan maaf khususnya kepada masyarakat Yogyakarta. Namun permintaan maaf tersebut bukan dari inisiatifnya sendiri, melainkan arahan dari PSI. Hal ini lah yang membuat netizen menuntut PSI untuk turut serta mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan Ade Armando.
Tematik	Paragraf	Berita terdiri dari 16 paragraf yang berisi penjelasan konflik dan pernyataan dari beberapa pihak, diantaranya adalah kutipan langsung dari Wakil Ketua DPRD DIY (1 paragraf), Ade Armando (4 paragraf) dan netizen (2 paragraf).
	Kalimat	Dalam berita ini ditemukan kalimat deklaratif langsung, yaitu: “Ade Armando, politikus PSI bikin gaduh saat berkomentar soal politik dinasti.”
	Hubungan antar kalimat	Setiap kalimat dalam berita ini disusun untuk menunjukan perkembangan konflik secara bertahap.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Foto yang ditampilkan adalah foto Ade Armando saat diwawancarai oleh wartawan. Namun tidak ada keterangan waktu dan lokasi foto tersebut diambil.

b. Hasil Analisis

1) Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis berita berjudul "Ade Armando Minta Maaf Soal Komentar Politik Dinasti di Jogja, Netizen Ingin PSI Klarifikasi," bagian *headline* dan *lead* berhasil menarik perhatian pembaca karena langsung membahas inti masalah serta dampaknya yang luas. Latar informasi dalam berita ini menegaskan bahwa pernyataan Ade Armando bukan hanya persoalan individu, tetapi juga melibatkan tanggung jawab PSI sebagai partai politik yang menaunginya. Berita ini juga menyajikan berbagai kutipan dari beberapa pihak, meskipun lebih banyak menampilkan pernyataan langsung dari Ade Armando. Penutup berita menyoroti bahwa permasalahan ini belum selesai sepenuhnya. Hal ini diperkuat oleh kutipan netizen yang mendesak PSI untuk memberikan klarifikasi resmi dan menyampaikan permintaan maaf secara institusional.

2) Struktur Skrip

Pada struktur skrip, berita ini telah mengandung unsur 5W + 1 secara lengkap. Berita memuat desakan netizen terhadap PSI untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataan kontroversial Ade Armando yang menyebut Yogyakarta sebagai pusat politik dinasti (*what*), siapa pihak yang menuntut permintaan maaf dari Ade Armando (*who*), dimana dan kapan tuntutan tersebut disampaikan (*where* dan *when*), alasan dibalik tuntutan netizen (*why*), serta bagaimana kronologi tuntutan tersebut dapat terjadi (*how*).

3) Struktur Tematik

Berita ini terdiri dari 16 paragraf pendek yang secara sistematis menjelaskan konflik, dimulai dari penyebab hingga dampaknya. Informasi yang disajikan selalu diperkuat dengan kutipan langsung dari berbagai narasumber, terutama Ade Armando. Meskipun kutipan dari Ade Armando mendominasi, *Harianjogja.com* tidak memberikan

pandangan yang hanya berpihak kepada Ade Armando atau mengecilkan sudut pandang pihak lain. Sebaliknya, kutipan-kutipan tersebut justru digunakan untuk menegaskan akar permasalahan yang menyebabkan konflik terjadi.

4) Struktur Retoris

Berita ini hanya memuat satu foto yang ditampilkan setelah judul. Foto yang menampilkan Ade Armando sedang diwawancarai tersebut tidak disertai dengan keterangan waktu dan tempat foto tersebut diambil. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah foto tersebut relevan atau tidak dengan pernyataan yang disampaikan Ade Armando dalam berita. Selain itu, berita ini berfokus pada tuntutan netizen terhadap Ade Armando, namun tidak terdapat gambar atau foto yang merepresentasikan hal tersebut.

BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana isu politik dinasti di Yogyakarta disajikan oleh media online *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com*. Dalam penelitian ini, digunakan teori analisis framing sebagai landasan teori untuk memahami cara kedua media tersebut membingkai berita mengenai politik dinasti, sehingga dapat terungkap berbagai sudut pandang yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada publik

Isu atau peristiwa tertentu dapat ditampilkan dengan pendekatan yang berbeda oleh setiap media, yang pada akhirnya akan membentuk persepsi pembaca. *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* memiliki cara penyampaian yang berbeda terkait politik dinasti di Yogyakarta. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, termasuk kebijakan redaksi atau kepentingan dari setiap media.

Untuk mengungkap perbedaan framing tersebut, peneliti akan mengumpulkan data dalam bentuk artikel-artikel yang diterbitkan kedua media ini. Seluruh artikel yang terkait dengan isu politik dinasti di Yogyakarta akan dikaji menggunakan metode analisis framing Pan dan Kosicki. Metode ini merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mendeteksi struktur penyampaian pesan, termasuk pilihan kata, sudut pandang, dan penekanan yang diberikan pada aspek tertentu dari sebuah isu yang diberitakan.

Melalui penelitian ini, diharapkan perbedaan dalam cara *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* mengemas isu politik dinasti di Yogyakarta dapat terlihat jelas. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan baru bagi para pembaca dalam melihat berita dengan lebih kritis dan selektif. Harapannya masyarakat dapat lebih bijak dalam mengonsumsi berita, terutama ketika media memiliki kecenderungan untuk menyajikan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik melalui berbagai cara framing.

B. Media Online *Tribunjogja.com*

Gambar 2. 1 Logo *Tribunjogja.com*

1. Sejarah Tribun Jogja

PT. Media Tribun Jogja merupakan salah satu anak perusahaan dari Kompas Gramedia (KG) yang didirikan oleh Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama pada 28 Juni 1965. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang pesat dan berhasil menerbitkan berbagai surat kabar. Kompas Gramedia menerbitkan dua kategori surat kabar berdasarkan cakupan beritanya, yaitu surat kabar nasional dan surat kabar lokal atau regional. Kompas adalah surat kabar dengan jangkauan nasional, sedangkan Tribun Network dan Warta merupakan surat kabar yang berfokus pada berita lokal dan regional.

Nama "Tribun" berasal dari istilah yang berarti panggung atau tempat di stadion. Umumnya panggung berada di posisi lebih tinggi dibandingkan dengan arena utama. Dari posisi ini, penonton memiliki pandangan yang luas dan jelas ke segala arah. Filosofi ini mencerminkan komitmen Tribun dalam memberikan berita yang komprehensif dan menyajikan fenomena masyarakat dengan sudut pandang yang luas.

Tribun berupaya menyajikan beragam berita yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya dan hiburan. Dengan menempatkan pembacanya di posisi yang dihormati, Tribun mengajak mereka untuk menjadi pengamat yang kritis dan bijak terhadap fenomena sosial yang terjadi.

Tribun Jogja versi cetak pertama kali terbit pada tanggal 11 April 2011, dengan format sebanyak 24 halaman. Sebelumnya, pada tanggal 1 November 2010, Tribun Jogja telah lebih dahulu hadir dalam bentuk digital

yang bisa diakses hingga sekarang di *Tribunjogja.com*. Komposisi berita dalam surat kabar yang diterbitkan oleh Tribun Jogja terdiri dari 75% berita lokal dan 25% sisanya mencakup berita nasional dan internasional.

Saat pertama kali diterbitkan, Tribun Jogja dikenal sebagai surat kabar yang dijual dengan harga terjangkau, yaitu Rp 1.000,00 per eksemplar. Penetapan harga ini dimaksudkan agar koran ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga bisa memenuhi kebutuhan berbagai kalangan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya.

2. Visi dan Misi Tribun Jogja

a. Visi

Visi Tribun Jogja adalah menjadi kelompok usaha penerbitan surat kabar, media online dan percetakan daerah yang terbesar dan tersebar di wilayah DIY dan Jateng.

b. Misi

Misi Tribun Jogja adalah menciptakan informasi yang terpercaya untuk memberikan spirit baru dan mendorong terciptanya demokratisasi di daerah dengan menjalankan bisnis yang beretika, efisien dan menguntungkan.

3. Rubrikasi dalam Tribun Jogja

Beberapa rubrik yang terdapat pada surat kabar harian Tribun Jogja diantaranya adalah:

a. Halaman Muka (*Headline)*

Halaman ini menyajikan berbagai berita terkini yang tengah menjadi sorotan, mencakup peristiwa nasional, lokal, hingga mancanegara. Setiap informasi dikemas dengan tampilan visual yang menarik, termasuk penggunaan gambar dan desain cover yang dirancang untuk memikat perhatian pembaca.

b. Rubrik *Citizen Reporter*

Sesuai dengan namanya, rubrik ini merupakan wadah yang

menampilkan tulisan atau laporan dari masyarakat umum. Isi rubrik ini mencakup berbagai topik, mulai dari opini penulis tentang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, artikel berisi nasehat dan kisah inspiratif, hingga laporan mengenai kejadian terbaru di Yogyakarta.

c. Rubrik *Hotline*

Rubrik ini menampilkan informasi yang sering ditanyakan oleh masyarakat, salah satunya adalah terkait jadwal dan lokasi pemadaman listrik di Yogyakarta.

d. Rubrik *Sport*

Rubrik ini memuat berbagai informasi dan berita terbaru seputar dunia olahraga, meliputi pertandingan dan peristiwa dari level regional, nasional, hingga internasional.

e. Rubrik *Travel*

Rubrik ini menyajikan berbagai informasi menarik tentang destinasi wisata di Yogyakarta, mulai dari wisata kuliner, sejarah, hingga keindahan alamnya. Topik yang dibahas juga beragam, seperti rekomendasi tempat wisata, detail harga tiket masuk, hingga jadwal keberangkatan kereta menuju Yogyakarta.

f. Rubrik *Lifestyle*

Rubrik ini menghadirkan beragam informasi menarik yang berkaitan dengan gaya hidup sehari-hari para remaja, seperti prediksi zodiak, kata-kata motivasi, hingga daftar lagu populer yang sedang hits.

g. Rubrik Kesehatan

Rubrik ini menyajikan berbagai informasi terkait kesehatan, mencakup panduan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat, saran penggunaan obat-obatan tertentu, hingga artikel yang membahas topik kesehatan secara mendalam.

h. Rubrik Otomotif

Rubrik ini berisi berbagai informasi dan berita terkait dunia

kendaraan bermotor, seperti mobil, motor, hingga inovasi teknologi otomotif terbaru. Topiknya mencakup ulasan kendaraan baru, tips perawatan kendaraan, informasi harga kendaraan, perbandingan spesifikasi antar merek, hingga berita tentang tren atau perkembangan industri otomotif.

4. Struktur Organisasi Tribun Jogja

a.	Publisher	:	H. Ciptyantoro
b.	Vice Publisher	:	Heru Kuncara
c.	Editor in Chief/Penanggung Jawab	:	Ribut Raharjo
d.	Production Manager	:	Hendy Kurniawan
e.	News Manager	:	Sigit Widya
f.	Digital Manager	:	Ikrob Didik Irawan
g.	Editor Senior	:	Setya Krisna Sumarga
h.	Editor	:	Agus Wahyu Triwibowo, Agung Ismiyanto, Singgih Wahyu Nugraha, Susilo Wahid Nugroho, Hari Susmayanti, Iwan Al Khasni, Mona Kriesdinar, Muchamad Fatoni, Yoseph Hary Wibowo, Joko Widiyarso, Bramasto Adhy
i.	Reporter	:	Gaya Lufityanti, Yudha Kristiawan, Christi Mahatma Wardani, Kurniatul Hidayah, Azka Ramadhan, Noristera Pawestri, Hanif Suryo,

			Miftahul Huda, Bunga Kartikasari, Alifia Nuralita, Almurfi Syofyan
j.	Sleman	:	Ahmad Syarifudin
k.	Bantul	:	Neti Rukmana
l.	Gunungkidul	:	Nanda Sagita Ginting
m.	Kulon Progo	:	Alexander Aprita
n.	Magelang	:	Yuwantoro Winduajie
o.	Klaten	:	Ardhike Indah
p.	Videografer	:	Hamim Thohari, Turibius Roswanda
q.	Grafis	:	Muhammad Fauziarakhman
r.	Olah Video	:	Suluh Prasetya, Bayu Rusbianto, Afifudin, Veri Vesiano, Fembri Nugroho
s.	Staf IT	:	Arif Purnomo
t.	Sekretaris Redaksi	:	Maria Rostanti
u.	Business General Manager	:	Danang Purwoko
v.	Vice Advertising Manager	:	Andi Sumarsono
w.	Marketing Manager	:	Edy Utama
x.	Printing Manager	:	Hermawan
y.	Financial & Operational Manager	:	Ridwan Mulyatno

C. Media Online *Harianjogja.com*

Gambar 2. 2 Logo *Harianjogja.com*

1. Sejarah Harian Jogja

Harian Jogja resmi terbit perdana pada 20 Mei 2008, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Sebagai bagian dari Bisnis Indonesia Group, surat kabar ini menjadi koran komunitas ketiga yang diluncurkan setelah Solopos di Solo dan Monitor di Depok, Jawa Barat. Menariknya, edisi pertama Harian Jogja diberi nomor 0000, sementara edisi nomor 0001 baru dirilis sehari setelahnya, yaitu pada 21 Mei 2008. Koran yang akrab disebut Harjo ini mengusung slogan "*Berbudaya Membangun Kemandirian*". Melalui slogan ini, Harian Jogja berharap dapat menjadi akar budaya yang membangun kemandirian masyarakat Yogyakarta.

Bersamaan dengan versi cetaknya, Harian Jogja juga memperluas jangkauannya dengan menyediakan versi online melalui situs *Harianjogja.com*. Selain itu, di tahun ketiga berdirinya media ini, Harian Jogja mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi radio Star FM. Setelah diakuisisi, radio tersebut berganti nama menjadi Star Jogja.

Saat pertama kali didirikan, sebagian besar kepemilikan saham Harian Jogja dimiliki oleh keluarga Keraton Yogyakarta. Surat kabar ini resmi diluncurkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga menjabat sebagai Gubernur DIY. Acara peluncurannya berlangsung di Kompleks Kepatihan, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Harian Jogja menjadi satu-satunya media di Yogyakarta yang peluncurannya dilakukan di lokasi bersejarah tersebut.

Harian Jogja telah mengalami dua kali perpindahan lokasi kantor sejak awal berdirinya. Pada tahun 2008 hingga 2011, kantor pertamanya berlokasi di Jalan MT Haryono 7B, Kota Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 2011, Harian Jogja pindah ke kantor baru yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono No. 52, Kota Yogyakarta, yang digunakan hingga tahun 2014. Selanjutnya, sejak 2014 hingga saat ini, Harian Jogja menempati kantor di Jalan AM Sangaji No. 41, Kota Yogyakarta. Perpindahan ke lokasi terakhir ini dilakukan bersamaan dengan radio Star Jogja.

Pada akhir tahun 2015, Harian Jogja meluncurkan koran elektronik

(ePaper) yang mulai tersedia untuk masyarakat umum dengan berbagai opsi berlangganan. EPaper ini dapat diakses melalui situs *epaper.harianjogja.com*. Kehadiran ePaper ditujukan sebagai alternatif bagi pembaca setia Harian Jogja maupun calon pembaca baru yang memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, ePaper ini juga menjadi langkah nyata Harian Jogja dalam mendukung upaya pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) demi menjaga lingkungan dan menciptakan kondisi yang lebih ramah lingkungan.

2. Visi Harian Jogja

a. Visi

Menjadi perusahaan media yang dikelola secara profesional untuk mengawal nilai luhur budaya, membangun optimisme, menginspirasi, dan mencerdaskan masyarakat.

3. Struktur Organisasi Harian Jogja

a.	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab	:	Anton Wahyu Prihartono
b.	Wakil Pemimpin Redaksi	:	Nugroho Nurcahyo
c.	General Content Manager	:	Budi Cahyana
d.	Dewan Redaksi	:	Ahmad Djauhar (Ketua), Bayu Widagdo, Suwarmin, Rini Yustiningsih
e.	Senior Content Manager	:	Laila Rochmatin, Maya Herawati, Sugeng Pranyoto
f.	Content Manager	:	Arief Junianto, Bhekti Suryani, Galih Eko Kurniawan, Mediani Dyah Natalia, Yudhi Kusdiyanto

g.	Manajer Sekretariat Redaksi	:	Putri Meridhita
h.	Reporter	:	Abdul Hamied Razak, Alfi Annissa Karin, Andreas Yuda Pramono, Anisatul Umah, Bernadheta Dian Saraswati, Catur Dwi Janati, David Kurniawan, Jumali, Lugas Subarkah, Nina Atmasari, Sirojul Khafid, Stefani Yulindriani Ria S. R, Sunartono
i.	Fotografer/Videografer	:	Desi Suryanto (Koordinator), Araufi Pratama Arfiansyah, Naufal Hibbatul Aghni
j.	Tim IT	:	Benedictus Fredika Apriawan Santoso, Eko Purnomo
k.	Asisten Manajer Produksi	:	Muhammad Nurbawa P.Y
l.	Tim Artistik	:	Hendi Prabowo, Hengki Irawan, Tri Harjono, T.G. Sunu Jatmika, Zahirul Alwan

BAB III
PEMBAHASAN

A. Kategorisasi Pilihan Framing Berita

1. Berita *Tribunjogja.com*

a. Kontribusi Yogyakarta untuk Kemerdekaan Indonesia

Analisis framing dalam berita "Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar" menjelaskan bagaimana kontribusi besar Yogyakarta terhadap kemerdekaan Indonesia dijadikan landasan historis untuk menegaskan status keistimewaan Yogyakarta. Struktur sintaksis berita ini menonjolkan sudut pandang Raden Stevanus, anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memberikan penjelasan bahwa Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan dan menjaga kedaulatan bangsa, sehingga wajar apabila memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dari daerah lainnya. Dengan hanya menggunakan satu kutipan dan pernyataan narasumber, berita ini membingkai cerita secara kuat pada justifikasi sejarah Yogyakarta sekaligus menepis kritik politik dinasti yang diutarakan Ade Armando. Pada bagian *lead*, berita juga langsung memperkenalkan pandangan PSI tanpa memberikan ruang bagi pembelaan terhadap pernyataan Ade Armando.

Sementara itu, analisis struktur skrip menunjukkan bahwa berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap. Berita ini memberikan informasi tentang permasalahan apa yang sedang terjadi, yaitu Dr. Raden Stevanus menanggapi pernyataan kontroversial Ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta (*what*), siapa yang menanggapi pernyataan Ade Armando (*who*), kapan dan dimana ia memberikan tanggapan (*when* dan *where*), alasan mengapa ia memberikan tanggapan tersebut (*why*), serta bagaimana ia memberikan tanggapan.

Pada analisis struktur tematik, berita menunjukkan bahwa pandangan Ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta bukanlah

representasi resmi dari partai PSI. Setiap paragraf berisi satu proposisi kunci yang dimulai dari isu (pernyataan Ade Armando), kemudian ditanggapi dengan argumen berbasis sejarah, penjelasan kontribusi Yogyakarta dan diakhiri dengan anjuran untuk mempelajari sejarah sebelum berkomentar. Dengan demikian, narasi yang disampaikan mengarahkan pembaca untuk memaklumi dan bahkan menghargai sistem penetapan pemerintahan Yogyakarta sebagai bagian dari warisan sejarah yang harus dihormati. Terakhir, pada struktur retoris tidak ditemukan foto, idiom, maupun grafik. Hal ini membuat pesan menjadi fokus pada isi verbal dan kredibilitas narasumber.

Tabel 3. 1 Hasil Analisis Berita "Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Berita menggunakan satu kutipan dan pernyataan narasumber. Bagian *lead* langsung memperkenalkan pandangan PSI tanpa memberikan ruang bagi pembelaan terhadap pernyataan Ade Armando.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Setiap paragraf berisi satu proposisi kunci yang dimulai dari isu (pernyataan Ade Armando), kemudian ditanggapi dengan argumen berbasis sejarah, penjelasan kontribusi Yogyakarta dan diakhiri dengan anjuran untuk mempelajari sejarah sebelum berkomentar.
Retoris	Tidak ditemukan foto, idiom, maupun grafik.

Berita lain yang berjudul "Memahami Asal-Usul Keistimewaan Yogyakarta" juga menyoroti bagaimana Keraton Yogyakarta memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Pada analisis struktur sintaksis, pernyataan narasumber dalam berita ini menyebutkan bahwa Sultan HB IX menyumbangkan dana untuk membantu pemerintahan baru serta memberi perlindungan bagi para pejuang saat agresi Belanda.

Penggunaan kutipan dari Yuni Satia Rahayu selaku anggota Komisi A DPRD DIY dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini selaku Kabag Pelayanan dan Umum Paniradya Keistimewaan DIY juga memberikan kerangka yang lebih luas bahwa keistimewaan Yogyakarta harus dipahami sebagai sebuah entitas sosial, kultural, dan historis yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, berita ingin menunjukkan bahwa status keistimewaan Yogyakarta bukan hanya soal meneruskan garis keturunan, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi besar Yogyakarta dalam menjaga kedaulatan negara.

Secara keseluruhan, analisis skrip berita ini menunjukkan bahwa berita telah memenuhi 5W+1H yang menjadi unsur kelengkapan sebuah berita. Berita memaparkan informasi mulai dari topik apa yang dibahas, yaitu tanggapan terhadap pernyataan Ade Armando dengan memberikan penjelasan terkait asal-usul keistimewaan Yogyakarta (*what*), Yuni Satia Rahayu selaku anggota Komisi A DPRD DIY dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini selaku Kabag Pelayanan dan Umum Paniradya Keistimewaan DIY sebagai tokoh yang memberikan tanggapan dan penjelasan terkait keistimewaan Yogyakarta (*who*), kapan dan dimana kedua tokoh tersebut memberikan penjelasan (*where* dan *when*), mengapa mereka perlu memberikan tanggapan dan penjelasan terkait keistimewaan Yogyakarta (*why*), serta bagaimana mereka memberikan penjelasan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ade Armando (*how*).

Kemudian berdasarkan analisis struktur tematik, berita ini menggunakan pengulangan (repetisi) kalimat untuk menegaskan betapa kokohnya landasan hukum yang melindungi keistimewaan Yogyakarta. Disebutkan bahwa status tersebut diakui dalam konstitusi dan diperkuat oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY. Melalui penegasan berulang ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa isu “dinasti” di Yogyakarta tidak menggambarkan keseluruhan realitas di Yogyakarta yang jauh lebih kompleks karena memiliki kontribusi bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia. Terakhir, analisis struktur retoris menunjukkan kata “politik

dinasti" dalam berita dilawankan dengan narasi "sumbangsih Keraton", "perlindungan pejuang", dan "pengakuan dalam undang-undang". Hal ini membuat framing diksi mengarahkan pembaca memahami bahwa tuduhan "dinasti" tidak sejalan dengan kenyataan yang lebih kompleks dan konstitusional.

Tabel 3. 2 Hasil Analisis Berita "Memahami Asal-Usul Keistimewaan Yogyakarta"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Narasumber utama dalam berita adalah Yuni Satia Rahayu selaku anggota Komisi A DPRD DIY dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini selaku Kabag Pelayanan dan Umum Paniradya Keistimewaan DIY.
Skrip	Berita telah memenuhi 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Terdapat pengulangan (repetisi) kalimat untuk menegaskan betapa kokohnya landasan hukum yang melindungi keistimewaan Yogyakarta.
Retoris	Ditemukan kata "politik dinasti" dalam berita yang dilawankan dengan narasi "sumbangsih Keraton", "perlindungan pejuang", dan "pengakuan dalam undang-undang".

b. Tanggapan Tokoh Yogyakarta terhadap Pernyataan Ade Armando

Tribunjogja.com mengangkat berita mengenai tanggapan beberapa tokoh lokal terhadap pernyataan yang dilontarkan Ade Armando. Dalam berita yang berjudul "Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI," disebutkan komentar dari Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY yang membantah keras klaim Ade Armando mengenai politik dinasti di Yogyakarta. Analisis struktur sintaksis berita ini menunjukkan bahwa Huda sebagai narasumber utama menegaskan selama sepuluh tahun menjadi anggota DPRD DIY, ia tidak melihat adanya praktik politik dinasti dalam pemerintahan di Yogyakarta. Pada bagian penutup berita, ia menegaskan

kembali bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan oleh *Ngarso Dalem* sangat egaliter dan demokratis. Penggunaan kutipan dari narasumber tersebut membingkai Ade Armando sebagai figur yang kurang mendalami seluk-beluk keistimewaan Yogyakarta sebelum beropini.

Pada struktur skrip, berita telah memenuhi unsur kelengkapan berita yaitu 5W+1H. Berita memberikan informasi mengenai topik apa yang dibahas, yaitu Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY yang turut menanggapi pernyataan Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando (*what*), siapa yang memberikan tanggapan (*who*), kapan dan dimana ia memberikan tanggapan (*where* dan *when*), mengapa ia memberikan tanggapan tersebut (*why*), serta bagaimana tanggapan tersebut disampaikan (*how*). Namun pada unsur *where*, berita hanya memberikan keterangan tempat berupa nama kota yaitu Yogyakarta, tidak ada informasi spesifik yang menjelaskan latar tempat narasumber ketika memberikan pernyataan.

Selanjutnya pada struktur retoris, ditemukan penggunaan istilah "belajar lagi" dalam *headline* yang memberikan kesan bahwa Ade Armando kurang memahami atau bahkan sama sekali tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang sejarah Yogyakarta. Frasa tersebut tidak hanya sekedar kritik terhadap pandangan Ade Armando, tetapi juga menunjukkan bahwa narasumber merasa perlu untuk memberi pengetahuan lebih tentang sejarah Yogyakarta yang mungkin tidak dipahami oleh Ade Armando.

Tabel 3. 3 Hasil Analisis Berita "Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI"

Struktur	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	Penggunaan kutipan dari narasumber membingkai Ade Armando sebagai figur yang kurang mendalami seluk-beluk keistimewaan Yogyakarta sebelum beropini.
Skrip	Berita telah memenuhi 5W+1H dengan lengkap.

Tematik	Tanggapan dari narasumber disajikan secara terstruktur melalui kutipan-kutipan langsung.
Retoris	Ditemukan penggunaan istilah "belajar lagi" dalam *headline* berita.

Tanggapan lain disampaikan oleh Sri Sultan HB X selaku kepala pemerintahan Yogyakarta. Dalam berita yang berjudul "Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY," Sri Sultan HB X memberikan tanggapan yang tegas namun tetap dengan nada yang bijaksana terhadap kritik yang dilontarkan oleh Ade Armando mengenai politik dinasti di Yogyakarta. Dalam berita ini, dapat dilihat dari analisis struktur sintaksis bahwa Sultan menyatakan kritik yang disampaikan oleh Ade Armando tidak berdasar pada konstitusi atau sejarah yang jelas. Kutipan dari Sultan memperkuat narasi bahwa meskipun ada perbedaan pendapat di masyarakat, keistimewaan Yogyakarta adalah hal yang telah diakui negara. Sultan dengan diplomatis mengarahkan opini pembaca untuk memahami bahwa keistimewaan Yogyakarta merupakan hak yang sah dan diatur dalam konstitusi Indonesia.

Pada analisis struktur skrip, berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap. Berita memberikan informasi terkait topik yang dibahas, yaitu tanggapan Sri Sultan HB X atas pernyataan Ade Armando (*what*), siapa yang memberikan tanggapan (*who*), kapan dan dimana tanggapan tersebut disampaikan (*when* dan *where*), mengapa Sultan memberikan tanggapan (*why*), serta bagaimana Sultan memberikan tanggapan tersebut (*how*).

Kemudian pada analisis struktur tematik, berita ini berusaha untuk menjaga keseimbangan dengan tidak menampilkan kritik terhadap Ade Armando secara langsung, melainkan lebih kepada penjelasan yang disampaikan oleh Sultan HB X. Pada paragraf awal, disebutkan bahwa Sultan mendukung kebebasan berpendapat dari semua pihak, termasuk Ade Armando. Pernyataan ini memberikan kesan bahwa Sultan menghormati

hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya meskipun berbeda dengan pandangan yang dimilikinya, namun tentunya dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan status keistimewaan Yogyakarta yang diatur dalam hukum.

Terakhir, berdasarkan analisis struktur retoris, berita ini tidak menggunakan bahasa yang bersifat menyerang atau menyudutkan. Kutipan dan pernyataan dari Sultan cenderung mengajak pembaca untuk memahami masalah ini dari perspektif yang lebih luas. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Sultan ingin menjaga citra baik dan hubungan harmonis dengan berbagai pihak, sembari mempertegas status keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta.

Tabel 3. 4 Hasil Analisis Berita "Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Sultan sebagai narasumber utama menyatakan kritik yang disampaikan oleh Ade Armando tidak berdasar pada konstitusi atau sejarah yang jelas.
Skrip	Berita telah memenuhi 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Berita tidak menampilkan kritik terhadap Ade Armando secara langsung, melainkan lebih kepada penjelasan dari narasumber.
Retoris	Tidak ditemukan kata atau idiom yang bersifat menyudutkan dan memiliki arti tertentu.

c. Keistimewaan Yogyakarta Sah Secara Konstitusi

Dalam berita yang berjudul "Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum," *Tribunjogja.com* membahas isu politik dinasti di Yogyakarta dari perspektif hukum dan konstitusi. Analisis framing pada struktur sintaksis menunjukkan bahwa berita ini mencakup latar belakang hukum dan konstitusionalitas yang jelas terkait dengan Undang-Undang No. 13 Tahun

2012 tentang keistimewaan Yogyakarta, serta Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui adanya kekhususan bagi beberapa daerah tertentu di Indonesia.

Berita ini secara khusus mengangkat pernyataan dari Eko Suwanto selaku Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan secara tegas bahwa keistimewaan Yogyakarta adalah sah secara hukum. Eko Suwanto sebagai narasumber utama dalam berita mendominasi narasi dan memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa penetapan Sultan HB X dan Pakualam X sebagai pemimpin Yogyakarta sesuai dengan prinsip Pancasila, konstitusi, dan berlaku sah secara hukum. Pernyataan yang disampaikan narasumber selalu diperkuat dengan dasar hukum yang konkret.

Kemudian pada analisis struktur skrip, berita ini telah memberikan informasi lengkap yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur 5W+1H. Berita membuat informasi seputar topik apa yang dibahas, yaitu Eko Suwanto selaku Ketua Komisi A DPRD DIY dari PDI Perjuangan yang memberikan bantahan tegas atas pernyataan Ade Armando (*what*), siapa yang memberikan tanggapan (*who*), kapan dan dimana tanggapan tersebut diberikan (*when* dan *where*), mengapa ia memberikan tanggapan tersebut (*why*), serta bagaimana tanggapan tersebut disampaikan (*how*).

Selanjutnya pada analisis struktur tematik, berita ini disusun dengan alur paragraf yang dimulai dari permasalahan pokok, yaitu pernyataan kontroversial Ade Armando, kemudian mengalir menuju respon dan argumen yang dibangun oleh Eko Suwanto. Hubungan antar kalimat dalam berita ini menunjukkan bahwa setiap kalimat tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung untuk membentuk alur argumentasi yang kuat. Kalimat pertama yang mengutip pernyataan Ade Armando diikuti oleh kalimat lain yang membantah pernyataan tersebut dengan menyebut dasar hukum dan historis untuk menunjukkan ketidaktepatan tuduhan.

Terakhir, dalam analisis struktur retoris, berita ini terlihat memiliki upaya yang sangat jelas untuk menanggapi dan menentang pandangan Ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta. Berita ini menggunakan

bahasa yang lebih emosional dan penuh penolakan terhadap kritik Ade Armando. Beberapa kata yang digunakan untuk menandai penolakan tersebut diantaranya seperti "menyesatkan," "melecehkan," dan "melukai hati rakyat." Menariknya, kata-kata tersebut sudah muncul pada bagian *lead* berita yang merupakan bagian paling depan dan penting dalam sebuah tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap kritik Ade Armando merupakan fokus utama dari pemberitaan ini.

Tabel 3. 5 Hasil Analisis Berita "Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Narasi dalam berita didominasi oleh Eko Suwanto yang menyatakan bahwa keistimewaan Yogyakarta sah secara hukum.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Setiap kalimat dalam berita tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung untuk membentuk alur argumentasi yang kuat.
Retoris	Ditemukan kata-kata yang menandai penolakan terhadap Ade Armando seperti "menyesatkan," "melecehkan," dan "melukai hati rakyat."

Dalam berita lain yang berjudul "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Yogyakarta, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif," *Tribunjogja.com* menyajikan pandangan dari seorang pakar politik, Arya Budi, mengenai kritik Ade Armando terhadap sistem politik di Yogyakarta. Pada analisis struktur sintaksis, *Lead* berita langsung menyoroti tanggapan Arya Budi yang menunjukkan bahwa kritik Ade Armando bukan hanya tentang politik dinasti di Yogyakarta, melainkan juga terkait dengan pergeseran politik nasional, sehingga ada kepentingan politik tertentu yang mendasari kritik tersebut. Framing dalam berita ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa kritik Ade Armando terhadap

Yogyakarta lebih condong dipengaruhi oleh dinamika politik nasional daripada masalah hukum atau konstitusi yang ada di Yogyakarta.

Sementara itu pada analisis struktur skrip, berita ini tidak memenuhi unsur 5W+1H secara lengkap. Berita menginformasikan topik yang dibahas, yaitu terkait tanggapan Arya Budi selaku pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menilai pernyataan Ade yang menyinggung soal dinasti politik di DIY adalah argumen defensif (*what*), siapa yang memberikan tanggapan (*who*), kapan dan tanggapan tersebut disampaikan (*when*), alasan mengapa ia memberikan tanggapan tersebut (*why*), serta bagaimana ia memberikan tanggapan tersebut sebagai bentuk respon terhadap pernyataan Ade Armando (*how*). Namun berita ini menghilangkan unsur latar tempat atau *where.* Hal ini membuat pembaca tidak mengetahui bagaimana cara narasumber memberikan pernyataan kepada wartawan, apakah melalui pesan tertulis, wawancara langsung, atau melalui saluran lainnya.

Selanjutnya, pada analisis struktur tematik, kalimat-kalimat dalam berita secara umum menjelaskan bagaimana Arya Budi menanggapi kritik Ade Armando dengan memanfaatkan riset dan pengalamannya. Pemilihan Arya Budi sebagai narasumber utama dalam berita ini bertujuan untuk memberikan perspektif lain terhadap kritik yang dilontarkan oleh Ade Armando. Paragraf-paragraf dalam berita yang didukung dengan riset akademis menunjukkan bahwa Arya Budi lebih memilih untuk melihat kritik tersebut dari sudut pandang strategi politik nasional daripada fokus pada aspek hukum atau konstitusional yang menjadi inti dari keistimewaan Yogyakarta.

Keputusan untuk tidak membahas lebih dalam tentang sistem pemerintahan di Yogyakarta menjadi salah satu bentuk framing utama dalam berita. Berita ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Undang-Undang yang mengatur keistimewaan Yogyakarta karena sudah dianggap sebagai fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa media lebih memilih untuk fokus pada reaksi politik

terhadap kritik yang ada, serta membingkai cerita dalam konteks lebih besar tentang strategi politik nasional, bukan semata-mata membahas isu lokal.

Terakhir, pada analisis struktur retoris, berita ini terlihat lebih ingin menonjolkan pandangan dari Arya Budi selaku pakar politik dari UGM. Namun foto yang digunakan pada halaman utama justru adalah foto Ade Armando yang sama sekali tidak merepresentasikan isi berita.

Tabel 3. 6 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Yogyakarta, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Arya Budi sebagai narasumber utama menyatakan bahwa kritik Ade Armando terhadap Yogyakarta dilatar belakangi oleh kepentingan politik tertentu.
Skrip	Berita tidak mengandung unsur latar tempat atau *where* dari kelengkapan 5W+1H.
Tematik	Kalimat dalam berita menunjukkan Arya Budi berpendapat berdasarkan riset dan pengalamannya.
Retoris	Terdapat ketidaksesuaian antara foto pada halaman utama dengan isi berita.

d. Topeng Ade Armando Dibuang di Sungai Gajahwong

Tribunjogja.com tidak hanya mengangkat tanggapan dari tokoh-tokoh politik dan penjelasan sejarah terkait sistem pemerintahan di Yogyakarta, tetapi juga memberitakan aksi simbolik yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam berita berjudul "Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya," *Tribunjogja.com* menyajikan cerita tentang aksi budaya Larung Sukerta yang dilakukan oleh warga Yogyakarta sebagai bentuk ekspresi penolakan terhadap pandangan Ade Armando terkait politik dinasti di Yogyakarta. Dalam aksi tersebut, Ade Armando digambarkan dengan sebuah topeng yang dilarung (dibuang) di Sungai Gajahwong sebagai bentuk penolakan terhadap pandangannya mengenai Yogyakarta.

Pada analisis struktur sintaksis, *lead* berita langsung mengarahkan pembaca pada inti konflik, yaitu kritik Ade Armando dan reaksi budaya dari masyarakat Yogyakarta. Kutipan dalam berita digunakan untuk menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sebagai pesan moral kepada masyarakat dan pihak terkait untuk mengambil langkah lebih lanjut. Penggunaan pernyataan langsung dari tokoh seperti Pedro selaku koordinator aksi memberikan legitimasi pada aksi yang dilakukan, sehingga membangun narasi yang mendukung pesan keseluruhan berita.

Berita ini secara keseluruhan telah memenuhi unsur 5W+1H secara lengkap. Berdasarkan analisis struktur skrip, berita memberikan informasi mengenai topik apa yang dibahas, yaitu warga Yogyakarta yang menggelar aksi Larung Sukerta sebagai respons simbolik terhadap kritik Ade Armando (*what*), siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut (*who*), kapan dan dimana aksi tersebut dilaksanakan (*when* dan *where*), mengapa aksi tersebut dilakukan (*why*), serta bagaimana proses berjalannya aksi tersebut (*how*).

Selanjutnya pada analisis struktur tematik, berita ini secara rinci menjelaskan proses Larung Sukerta, sebuah ritual budaya yang dilakukan untuk melambangkan pembersihan atau pengusiran hal-hal yang dianggap tidak baik. Paragraf-paragraf dalam berita memberikan penjelasan tentang bagaimana budaya tersebut menjadi media untuk menyampaikan penolakan terhadap pandangan Ade Armando tentang politik dinasti. Pedro yang merupakan koordinator utama dalam aksi menjelaskan tujuan dan makna di balik tindakan tersebut, serta bagaimana simbolisasi topeng Ade Armando dilarung untuk menegaskan bahwa pandangan yang dianggap merugikan Yogyakarta harus "dibuang" atau dihindari.

Terakhir, pada analisis struktur retoris, terdapat penggunaan kata-kata atau idiom yang memiliki makna tertentu untuk menegaskan penolakan terhadap kritik Ade Armando. Salah satu frasa yang digunakan dalam berita ini adalah "kedunguan pola pikir Ade Armando". Frasa ini memuat kritik terhadap cara berpikir Ade Armando. Kata "kedunguan"

tidak hanya mengacu pada kebodohan, tetapi juga menggambarkan ketidakmampuan atau ketidakpedulian terhadap nilai-nilai yang ada di Yogyakarta. Selain itu, terdapat juga idiom "simbolisasi membuang sampah Ade Armando". Idiom ini memberikan gambaran bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Armando dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak dipertahankan dan harus dibersihkan atau "dilarung" seperti sampah yang dibuang ke sungai.

Tabel 3. 7 Hasil Analisis Berita "Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Penggunaan pernyataan langsung dari tokoh memberikan legitimasi pada aksi yang dilakukan, sehingga membangun narasi yang mendukung pesan keseluruhan berita.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Paragraf-paragraf dalam berita memberikan penjelasan tentang bagaimana budaya tersebut menjadi media untuk menyampaikan penolakan terhadap pandangan Ade Armando tentang politik dinasti.
Retoris	Terdapat frasa seperti "kedunguan pola pikir Ade Armando" dan idiom "membuah sampah Ade Armando".

e. Permintaan Maaf dari Pihak PSI

Dalam berita yang berjudul "PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X," *Tribunjogja.com* mengangkat perbedaan persepsi antara pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Sultan HB X terkait klaim permintaan maaf yang disampaikan oleh PSI. Pada analisis struktur sintaksis, kutipan dari kedua narasumber dalam berita ini mengungkapkan bahwa meskipun pihak PSI mengaku telah meminta maaf secara langsung kepada Sultan, Sultan sendiri membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan khusus mengenai

Ade Armando. Analisis struktur sintaksis dalam berita ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan ambiguitas mengenai apakah permintaan maaf tersebut benar-benar terjadi atau hanya dianggap sebagai simbolik, sehingga menciptakan ketidakjelasan di antara kedua belah pihak.

Sementara itu, pada analisis struktur skrip berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H secara lengkap. Berita berfokus pada tanggapan Sultan HB X atas klaim permintaan maaf dari pihak PSI (*what*). Kemudian berita juga memberikan informasi mulai dari siapa pihak yang memberikan tanggapan (*who*), kapan dan dimana tanggapan tersebut disampaikan (*when* dan *where*), alasan ia memberikan tanggapan tersebut (*why*), serta bagaimana ia memberikan tanggapannya (*how*).

Selanjutnya pada analisis struktur tematik, paragraf dalam berita menuliskan bagaimana Raja Juli berpamitan setelah melakukan pertemuan dengan cara mencium tangan Sultan. Setelah itu, pada paragraf selanjutnya disebutkan bahwa PSI melalui keterangan tertulisnya menyatakan adanya pembahasan mengenai kasus Ade Armando dalam pertemuan yang telah berlangsung. Meskipun PSI tidak menyebutkan adanya permintaan maaf secara langsung dalam pertemuan tersebut, namun dengan dituliskannya kronologi Raja Juli Antoni yang mencium tangan Sultan usai pertemuan, berita ini memberikan kesan bahwa klaim permintaan maaf PSI berasal dari gestur mencium tangan tersebut. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa PSI hanya menganggap gestur tersebut sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan, meskipun sebenarnya tidak ada pernyataan resmi dari PSI yang menyebut gestur mencium tangan tersebut adalah bentuk permintaan maaf yang sebenarnya.

Berita ini tidak secara eksplisit menyebutkan apakah permintaan maaf itu terjadi atau tidak, tetapi lebih menonjolkan perbedaan interpretasi yang ada di kedua belah pihak. Di satu sisi, *Tribunjogja.com* memberikan ruang bagi PSI untuk membangun narasi bahwa mereka telah meminta maaf secara langsung kepada Sultan. Namun di sisi lain, berita ini juga menyoroti respon Sultan yang membantah klaim tersebut dan memberikan

perspektif bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas tentang Ade Armando. Terakhir, pada analisis struktur retoris, tidak ditemukan penggunaan idiom kiasan yang kuat, sehingga penekanan berita tetap pada fakta dan kutipan langsung.

Tabel 3. 8 Hasil Analisis Berita "PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Pernyataan dari PSI dan Sultan dalam berita menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan ambiguitas mengenai apakah permintaan maaf benar-benar terjadi atau hanya dianggap sebagai simbolik.
Skrip	Berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Paragraf dalam berita tidak secara eksplisit menyebutkan apakah permintaan maaf terjadi atau tidak, tetapi lebih menonjolkan perbedaan interpretasi yang ada di kedua belah pihak.
Retoris	Tidak ditemukan penggunaan idiom atau kata tertentu.

2. Berita *Harianjogja.com*

a. Masyarakat Yogyakarta Tuntut Penangkapan Ade Armando

Berbagai reaksi dari masyarakat Yogyakarta atas pernyataan kontroversial Ade Armando cukup beragam, salah satunya dengan beredarnya poster untuk menggeruduk kantor PSI DIY. Pada analisis struktur sintaksis berita berjudul "Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando," bagian *lead* memberikan informasi yang berfokus pada beredarnya poster yang menyerukan penangkapan Ade Armando. Berita ini mencantumkan kutipan dari dua narasumber, yaitu Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY dan Ade Armando sendiri. Namun, kutipan yang berasal dari Ade Armando bukan hasil wawancara langsung *Harianjogja.com*, melainkan kutipan dari videonya yang viral di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa berita

lebih mengandalkan pernyataan yang sudah beredar luas daripada menggali informasi secara eksklusif melalui wawancara langsung.

Selain itu, pemilihan narasumber dalam berita ini kurang sesuai dengan *headline* dan topik utama. Jika dilihat dari judulnya, berita ini tampak ingin menyoroti undangan aksi menggeruduk kantor PSI DIY yang dibuat oleh Paman Usman. Namun, alih-alih menyajikan sudut pandang dari perwakilan Paman Usman selaku pembuat undangan tersebut, berita justru menampilkan tanggapan dari Wakil Ketua DPRD DIY. Akibatnya, berita tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara dari pihak yang menginisiasi aksi, melainkan lebih berfokus pada respons pihak lain.

Pada analisis struktur skrip, berita tidak memberikan informasi yang mencangkup 5W+1H secara lengkap. Berita memberikan informasi terkait topik apa yang dibahas, yaitu beredarnya sebuah poster di media sosial yang menyerukan agar Ade Armando ditangkap (*what*), siapa yang membuat poster tersebut (*who*), kapan dan dimana poster tersebut disebarkan (*when* dan *where*), serta mengapa poster tersebut disebarkan di media sosial (*why*). Namun berita tidak memberikan unsur *how* yang menjelaskan bagaimana poster tersebut dapat beredar di media sosial dan bagaimana kelanjutan aksi setelah poster tersebut beredar.

Sementara itu, pada analisis struktur tematik, paragraf-paragraf awal dalam berita menekankan pada penyebaran undangan aksi, namun bagian selanjutnya tidak menggali lebih jauh motif dan sudut pandang kelompok yang menginisiasi aksi tersebut. Berita justru menampilkan kutipan langsung dari Ade Armando untuk memberikan ruang pandangnya yang dilanjutkan oleh respons dari Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY. Hal ini menimbulkan adanya pergeseran topik dari yang semula berfokus pada beredarnya poster di media sosial, bergeser menjadi tanggapan dari Wakil Ketua DPRD DIY.

Terakhir, pada analisis struktur retoris, tidak ditemukan kata atau idiom yang memiliki makna tertentu. Namun ada kekurangan di bagian foto *headline* karena foto tersebut tidak merepresentasikan isi dari berita. Alih-

alih menampilkan poster yang beredar di media sosial atau foto perwakilan masa yang akan melakukan aksi, berita hanya menampilkan foto Ade Armando saat diwawancara. Padahal dalam berita tidak ditampilkan kutipan hasil wawancara dengan Ade Armando.

Tabel 3. 9 Hasil Analisis Berita "Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Berita membahas terkait beredarnya undangan dari Paman Usman untuk menggeruduk kantor PSI DIY, namun narasumber yang digunakan dalam berita adalah Wakil Ketua DPRD DIY, bukan Paman Usman selaku pembuat undangan.
Skrip	Berita tidak menjelaskan bagaimana poster tersebut beredar, sehingga menghilangkan unsur *how* dari 5W+1H.
Tematik	Paragraf awal dalam berita menekankan pada penyebaran undangan aksi, namun bagian selanjutnya tidak menggali lebih jauh motif dan sudut pandang kelompok yang menginisiasi aksi tersebut.
Retoris	Foto pada bagian halaman utama tidak merepresentasikan isi berita.

Respon lain dari masyarakat Yogyakarta juga disampaikan dalam berita yang berjudul "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY". Pada analisis struktur sintaksis, kutipan dan pernyataan dalam berita ini disampaikan oleh dua narasumber dari dua pihak berbeda, yakni Widihasto Wasana Putra sebagai Koordinator Paman Usman dan Ari Hidayat sebagai Wakil Sekretaris DPW PSI DIY. Meskipun setiap pernyataan diperkuat dengan kutipan langsung, namun secara keseluruhan kutipan dari pihak Paman Usman lebih mendominasi isi berita. Berita ini mengikuti pola piramida terbalik, sehingga informasi paling penting mengenai ancaman pencopotan baliho PSI diletakkan di awal. *Headline* berita langsung menyoroti konflik

dengan mencantumkan nama Ade Armando dan PSI. Hal ini secara tidak langsung menarik perhatian pembaca sekaligus menggiring opini sejak awal.

Pada analisis struktur skrip, secara keseluruhan berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H. Berita ini menjelaskan terkait aksi menggeruduk Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (*what*). Kemudian berita juga memberikan informasi siapa yang melakukan aksi tersebut (*who*), kapan dan dimana aksi tersebut terjadi (*when* dan *where*), mengapa aksi tersebut terjadi (*why*), serta bagaimana aksi tersebut berlangsung (*how*).

Selanjutnya, dari hasil analisis struktur tematik, berita ini mencoba membangun cerita yang terlihat berimbang dengan menjelaskan aksi warga beserta alasan di baliknya sebelum memberikan tanggapan dari PSI. Namun, paragraf terkait aksi Paman Usman diletakkan terlebih dahulu sebelum akhirnya memberikan ruang bagi tanggapan PSI yang berimplikasi pada bagaimana pembaca memahami konteks berita. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudut pandang kedua belah pihak ditampilkan, framing berita lebih dulu menggiring pembaca untuk memahami perspektif Paman Usman sebelum mendengar klarifikasi dari PSI. Terakhir, pada struktur retoris ditemukan kata seperti "bersihkan simbol PSI" yang tidak hanya berarti pencopotan baliho, tetapi juga menandakan penolakan total terhadap keberadaan PSI di wilayah Yogyakarta.

Tabel 3. 10 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Setiap pernyataan diperkuat dengan kutipan langsung, namun secara keseluruhan kutipan dari pihak Paman Usman lebih mendominasi isi berita.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Berita menampilkan sudut pandang dari kedua pihak, namun penjelasan terkait aksi Paman Usman diletakkan di awal.

Retoris	Ditemukan idiom seperti “bersihkan simbol PSI”.

b. Pernyataan Ade Armando Tidak Mewakili PSI

Berita yang berjudul “Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY” berfokus pada tanggapan PSI DIY terhadap kontroversi yang muncul akibat pernyataan Ade Armando. Dalam berita ini, PSI DIY berusaha mempertegas posisinya sebagai partai yang tetap mendukung keistimewaan Yogyakarta dan menegaskan bahwa pernyataan Ade Armando adalah pandangan pribadi yang tidak mencerminkan sikap resmi partai. Pada analisis struktur sintaksis, *lead* dalam berita ini sedikit berbeda dari pola umum karena tidak langsung mengarah pada tanggapan PSI DIY sebagaimana yang tertulis dalam *headline*. Sebaliknya, *lead* lebih dahulu menyoroti dampak sosial yang muncul akibat pernyataan kontroversial Ade Armando, baru kemudian mengarahkan pembaca kepada tanggapan PSI DIY.

Berita ini hanya mengandalkan satu narasumber utama, yaitu Komaruddin selaku Ketua PSI DIY. Pemilihan narasumber ini memperlihatkan bahwa tujuan utama berita adalah untuk memberikan klarifikasi dari pihak PSI terhadap berbagai respons masyarakat Yogyakarta yang menganggap partai ini bertanggung jawab atas pernyataan Ade Armando. Meskipun Ade Armando adalah politikus dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta, namun karena ia merupakan bagian dari PSI, maka PSI DIY yang lebih dekat dengan publik Yogyakarta dianggap memiliki tanggung jawab untuk memberikan pernyataan resmi.

Berita ini memberikan informasi yang cukup lengkap sesuai dengan unsur 5W+1H. Hasil analisis struktur skrip menunjukkan bahwa berita ini memberikan informasi topik yang dibahas, yaitu klarifikasi dari PSI DIY atas pernyataan Ade Armando (*what*), siapa pihak yang memberikan klarifikasi (*who*), kapan dan dimana mereka memberikan klarifikasi (*when* dan *where*), mengapa pihak tersebut memberikan klarifikasi (*why*), serta bagaimana klarifikasi tersebut disampaikan kepada masyarakat (*how*).

Sementara itu, dilihat dari analisis struktur tematik, berita ini tampak sangat menonjolkan usaha PSI untuk membedakan pernyataan pribadi Ade Armando dari sikap partai. Hal ini terlihat dari pengulangan frasa seperti "pernyataan tersebut adalah pandangan pribadi" yang secara eksplisit digunakan untuk mempertegas bahwa partai tidak bertanggung jawab atas opini individu anggotanya. Dengan menekankan perbedaan ini, framing berita secara tidak langsung membangun narasi bahwa PSI tidak berada dalam posisi yang harus disalahkan atas kontroversi ini. Kemudian pada analisis struktur retoris, ditemukan beberapa kata seperti "gerah," "melecehkan," dan "melukai hati rakyat" yang digunakan untuk menggambarkan dampak emosional dari pernyataan Ade Armando terhadap masyarakat Yogyakarta.

Tabel 3. 11 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Berita menggunakan pernyataan dari Komaruddin selaku Ketua PSI DIY untuk memberikan klarifikasi atas berbagai respons masyarakat Yogyakarta.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Paragraf dalam berita mempertegas bahwa pernyataan Ade Armando tidak mewakili PSI.
Retoris	Terdapat kata seperti "gerah," "melecehkan," dan "melukai hati rakyat".

Analisis berita "Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI" juga menyampaikan pesan yang serupa dengan berita sebelumnya. Berita ini menjelaskan tanggapan dari Ketua Umum PSI yaitu Kaesang Pangarep dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI yaitu Grace Natalie. Pada analisis struktur sintaksis, berita ini langsung menampilkan kutipan tegas dari Kaesang dalam *lead* yang menyatakan bahwa Ade Armando dipersilakan untuk keluar dari PSI jika

tidak bisa menghormati konstitusi yang berlaku di Yogyakarta.

Pernyataan Kaesang dalam berita yang menyebut dirinya sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta semakin memperkuat framing bahwa ia menghormati sistem pemerintahan yang berlaku di daerah tersebut. Pernyataan ini secara tidak langsung menempatkan Ade Armando sebagai tokoh yang berseberangan dengan partai dan menghadapi tekanan internal dari partainya sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Grace Natalie yang menegaskan bahwa PSI menangani serius permasalahan yang ditimbulkan oleh pernyataan Ade Armando. Dengan mengutip dua tokoh penting dalam PSI yang menyatakan ketidaksepahaman dengan Ade Armando, berita ini membentuk kesan bahwa partai ingin segera mengambil jarak dari kontroversi yang muncul.

Selanjutnya pada analisis struktur skrip, berita ini memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap. Berita memberikan informasi mengenai Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang mempersilahkan Ade Armando untuk keluar bila tidak bisa memahami aturan konstitusi terkait dengan keistimewaan Yogyakarta (*what*). Kemudian berita juga menjelaskan terkait siapa saja pihak yang bersikap tegas dan mempersilahkan Ade Armando untuk keluar dari PSI (*who*), kapan dan dimana Kaesang memberikan tanggapan tersebut (*when* dan *where*), mengapa Kaesang mempersilahkan Ade Armando untuk keluar dari PSI (*why*), serta bagaimana Kaesang memberikan tanggapan tegasnya tersebut (*how*).

Kemudian pada analisis struktur tematik, berita ini membangun narasi bahwa pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti di Yogyakarta bukan hanya menimbulkan polemik publik, tetapi juga menjadi masalah internal bagi PSI. Paragraf awal langsung menampilkan pernyataan Kaesang yang menjadi inti dari berita, kemudian diikuti oleh pernyataan Grace Natalie yang semakin memperkuat posisi PSI dalam menghadapi isu ini. Penyusunan paragraf seperti ini mempertegas bahwa PSI sebagai institusi tidak terlibat dalam pernyataan kontroversial yang dibuat oleh salah satu kadernya. Penyusunan berita yang memberikan porsi

lebih besar pada tanggapan dari Kaesang dan Grace Natalie juga memperlihatkan bahwa berita ini lebih berfokus pada bagaimana PSI menangani masalah yang muncul daripada membahas lebih jauh mengenai sejarah keistimewaan Yogyakarta atau dampak yang ditimbulkan dari pernyataan tersebut. Terakhir, berdasarkan hasil analisis struktur retoris, tidak ditemukan kata atau idiom yang memiliki makna tertentu di dalam berita.

Tabel 3. 12 Hasil Analisis Berita "Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Kutipan dalam berita disampaikan oleh Kaesang Pangarep dan Greace Natalie yang menyatakan ketidaksepahaman dengan Ade Armando.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Paragraf dalam berita disusun untuk mempertegas bahwa PSI tidak terlibat dalam pernyataan Ade Armando.
Retoris	Berita tidak menggunakan kata atau idiom yang memiliki makna tertentu.

c. Partai NasDem Tuntut Ade Armando Meminta Maaf

Berita yang berjudul "Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf" memberikan fokus utama pada tanggapan dari Subardi selaku Ketua DPW NasDem DIY yang menolak tuduhan politik dinasti terhadap Yogyakarta. Dari hasil analisis struktur sintaksis, *lead* dalam berita ini langsung mengarahkan pembaca pada topik inti, yaitu pernyataan Subardi yang menegaskan bahwa pernyataan Ade Armando tidak tepat dan tidak memahami latar belakang keistimewaan Yogyakarta. Berbeda dengan respons PSI DIY yang lebih bersifat klarifikasi terhadap pernyataan kontroversial salah satu anggotanya, NasDem DIY justru lebih menekankan pada aspek hukum dan sejarah yang

membuktikan bahwa keistimewaan Yogyakarta memiliki dasar yang kuat. Seluruh pernyataan dalam berita menunjukkan posisi Subardi sebagai pembela Yogyakarta, sementara Ade ditempatkan sebagai pihak yang tidak memahami konteks historis dan hukum.

Pada analisis struktur skrip, berita telah memenuhi unsur 5W+1H secara lengkap. Berita menginformasikan terkait topik apa yang sedang dibahas, yaitu tanggapan dari Ketua NasDem DIY atas pernyataan Ade Armando (*what*), siapa yang memberikan tanggapan (*who*), kapan dan dimana tanggapan tersebut disampaikan (*when* dan *where*), mengapa tanggapan tersebut muncul (*why*), serta bagaimana ia menyampaikan tanggapan atas pernyataan Ade Armando (*how*).

Selanjutnya pada analisis struktur tematik, ditemukan bahwa berita ini disusun dengan pola narasi yang menekankan keabsahan keistimewaan Yogyakarta serta kesalahan pernyataan Ade Armando. Kalimat-kalimat dalam berita membentuk tema besar bahwa status keistimewaan Yogyakarta bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga memiliki legitimasi historis dan kontribusi konkret dalam perjuangan kemerdekaan NKRI. Paragraf awal berita langsung membahas kritik dari Subardi selaku anggota DPR RI dari Partai NasDem. Kritik ini diletakkan di awal sebagai kerangka utama yang menuntun cara pembaca memahami isu ini, yaitu bahwa pernyataan Ade dianggap keliru dan perlu dikoreksi. Pada bagian penutup, Subardi menekankan dampak negatif pernyataan Ade dan seruan agar ia meminta maaf.

Dari hasil analisis struktur tematik ini, terlihat bahwa berita tidak memberikan ruang bagi argumen tandingan atau perspektif lain yang bisa memberikan sudut pandang berbeda. Paragraf dalam berita sama sekali tidak menjelaskan pernyataan Ade Armando lebih lanjut, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun dalam bentuk analisis terhadap alasan yang mendasari pendapatnya. Dengan demikian, berita ini membingkai perdebatan politik dinasti Yogyakarta sebagai isu yang sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi, serta membentuk opini publik bahwa sikap

yang benar dalam konteks ini adalah menghormati keistimewaan Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh sejarah dan konstitusi.

Terakhir, berdasarkan analisis struktur retoris, terdapat kata seperti "ahistoris," "berbahaya," dan "fatal". Kata-kata tersebut memiliki konotasi kuat yang memperlihatkan bahwa komentar Ade dianggap meremehkan kontribusi strategis Yogyakarta dalam pembentukan NKRI dan berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.

Tabel 3. 13 Hasil Analisis Berita "Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Pernyataan dari NasDem DIY selaku narasumber utama berita lebih menekankan pada aspek hukum dan sejarah Yogyakarta.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Paragraf dalam berita sepenuhnya menekankan pada keabsahan keistimewaan Yogyakarta dan kesalahan Ade Armando, tidak ada penjelasan dari perspektif lain.
Retoris	Berita mengandung kata seperti "ahistoris," "berbahaya," dan "fatal".

d. Sikap Netral dari Ganjar Pranowo

Selain dari tokoh lokal Yogyakarta dan beberapa partai politik, tanggapan terkait pernyataan Ade Armando juga muncul dari salah satu calon presiden 2024, Ganjar Pranowo. Berita berjudul "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo" berusaha memberikan ruang bagi Ganjar Pranowo untuk menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Ade Armando. Dari hasil analisis struktur sintaksis, *headline* berita ini dikonstruksi untuk membangun rasa keingintahuan pembaca terkait komentar yang akan diberikan oleh Ganjar. *Headline* berita ini tidak

menggunakan diksi yang provokatif, tetapi tetap memberikan petunjuk bahwa Ade Armando telah membuat pernyataan yang menyinggung keistimewaan Yogyakarta.

Lead berita secara langsung menyajikan pernyataan Ganjar yang mengajak semua pihak untuk saling menghormati dalam menyikapi isu politik dinasti di Yogyakarta. *Lead* ini tidak memperpanjang kontroversi atau memberikan kesan bahwa Ganjar mengecam atau membantah pernyataan Ade Armando. Meskipun berita ini menggunakan dua narasumber yaitu Ganjar Pranowo dan Sultan HB X, namun berita hanya mencantumkan satu kutipan dari pihak Ganjar Pranowo. Kutipan tersebut cenderung menunjukkan Ganjar sebagai sosok yang netral dan tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam kontroversi yang sedang berkembang.

Berita ini telah memberikan informasi dengan cukup lengkap yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur 5W+1H. Hasil analisis struktur skrip menunjukkan bahwa berita memberikan informasi terkait topik apa yang dibahas, yaitu tanggapan dari Ganjar Pranowo terkait politik dinasti di Yogyakarta (*what*), siapa yang menyampaikan tanggapan tersebut (*who*), kapan dan dimana tanggapan tersebut disampaikan (*when* dan *where*), mengapa Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Ade Armando (*why*), serta bagaimana tanggapannya disampaikan ke masyarakat (*how*).

Sementara itu, jika dilihat dari analisis struktur tematik, berita ini memberikan pemahaman bahwa keistimewaan Yogyakarta bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan karena telah memiliki dasar historis dan hukum yang kuat, serta sebaiknya disikapi dengan saling menghormati. Hal ini terlihat dari paragraf-paragraf yang membahas tanggapan dari Ganjar Pranowo dan Sultan HB X. Meskipun berita ini terlihat memiliki tujuan untuk menyoroti komentar dari Ganjar Pranowo, kenyataannya berita justru lebih banyak membahas tanggapan dari Sri Sultan HB X. Dari total enam belas paragraf dalam berita, hanya empat paragraf awal yang berisi pernyataan dari Ganjar, sementara sisanya lebih banyak mengulas pandangan dari Sultan HB X yang menegaskan bahwa keistimewaan

Yogyakarta memiliki landasan hukum dan sejarah yang kuat. Dengan minimnya kutipan dari Ganjar dan dominasi pernyataan dari Sultan HB X dalam berita ini, pembingkaian yang terbentuk lebih condong ke arah pembelaan terhadap keistimewaan Yogyakarta daripada sekadar menampilkan komentar dari Ganjar.

Terakhir, pada analisis struktur retoris, tidak ditemukan kata, idiom, maupun foto yang memiliki makna tertentu dalam berita. Namun foto yang ditampilkan setelah judul atau yang menjadi *cover* berita ini kurang sesuai dengan topik utama yang ingin disampaikan dalam berita. Berita lebih berfokus pada tanggapan dari Ganjar Pranowo, namun foto yang ditampilkan adalah foto Ade Armando saat sedang diwawancarai oleh wartawan. Foto tersebut juga sama dengan beberapa berita lain yang diterbitkan oleh *Harianjogja.com*.

Tabel 3. 14 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Kutipan dalam berita yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo menunjukkan ia sebagai pihak yang netral.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Berita terlihat akan menyoroti komentar Ganjar Pranowo, namun paragraf dalam berita justru lebih banyak menampilkan tanggapan dari Sultan.
Retoris	Terdapat ketidaksesuaian antara foto pada halaman utama dengan isi berita.

e. Pernyataan Ade Armando adalah Titipan

Analisis framing berita yang berjudul "Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo," menjelaskan tanggapan GKR Hemas terhadap pernyataan kontroversial Ade Armando mengenai keistimewaan Yogyakarta. Dari hasil analisis struktur sintaksis, *lead* berita langsung menyajikan kutipan

dari GKR Hemas yang menyebut bahwa Ade Armando hanya "*waton muni*" atau asal bicara. Penyajian kutipan ini sejak awal membentuk kesan bahwa GKR Hemas sebagai representasi Keraton Yogyakarta, dengan tegas menolak pernyataan Ade Armando. Pernyataan dalam berita yang berasal dari GKR Hemas dan Sultan HB X membangun otoritas budaya dan otoritas hukum untuk memperkuat pembelaan keistimewaan Yogyakarta. Di sisi lain, pernyataan Ade Armando justru mempertegas posisinya sebagai pihak yang kurang memahami konteks isu dan dipersepsikan lemah secara kredibilitas.

Pada analisis struktur skrip, berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H secara lengkap. Berita menyajikan informasi terkait topik apa yang dibahas, yaitu tanggapan dari GKR Hemas terkait komentar politikus PSI Ade Armando yang menyebut Yogyakarta mempraktikkan politik dinasti (*what*), siapa yang memberikan tanggapan tersebut (*who*), kapan dan dimana tanggapan tersebut disampaikan (*when* dan *where*), mengapa GKR Hemas memberikan tanggapan tersebut (*why*), serta bagaimana tanggapan tersebut disampaikan (*how*).

Sementara itu, dalam analisis struktur tematik terdapat ketimpangan dalam proporsi penyajian informasi. Jika dilihat dari *headline*, berita ini berfokus pada tanggapan GKR Hemas. Namun dalam susunan berita, pernyataan GKR Hemas hanya diberikan porsi yang dominan dalam empat paragraf awal, sementara sembilan paragraf berikutnya lebih banyak membahas kronologi permintaan maaf yang telah disampaikan oleh Ade Armando. Hal ini menciptakan pergeseran fokus berita dari kritik GKR Hemas terhadap Ade Armando ke arah narasi yang menunjukkan bahwa Ade Armando telah berusaha meredakan ketegangan dengan meminta maaf. Terakhir, berdasarkan analisis struktur retoris, Terdapat ungkapan seperti "*waton muni*" dari GKR Hemas yang menunjukkan bahwa Ade Armando tidak memiliki landasan yang kuat dalam kritiknya. Ungkapan ini juga membangun narasi bahwa pernyataan Ade Armando adalah kritik tanpa dasar yang tidak layak untuk diperdebatkan lebih lanjut.

Tabel 3. 15 Hasil Analisis Berita "Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi *Yo Gak Popo*"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Kutipan dari GKR Hemas dan Sultan HB X memperkuat pembelaan terhadap keistimewaan Yogyakarta, sedangkan kutipan dari Ade Armando menunjukkan ketidakpahaman ia terhadap sistem pemerintahan Yogyakarta.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Paragraf lebih didominasi oleh kronologi permintaan maaf dari Ade Armando, meskipun fokus utama berita adalah tanggapan dari GKR Hemas.
Retoris	Terdapat ungkapan "*waton muni"* dalam berita.

f. Ade Armando Memiliki Kedangkalan Pemahaman

Berita berjudul "Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan" menjelaskan tanggapan Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY terhadap pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Ade Armando mengenai keistimewaan Yogyakarta. Pada analisis struktur sintaksis, berita ini menghadirkan dua narasumber utama yang memiliki sudut pandang berlawanan. Kutipan dari Ade Armando membangun kerangka provokatif dengan menyebut sistem pemerintahan di Yogyakarta sebagai bentuk politik dinasti, sementara kutipan dari Huda digunakan untuk membela legalitas dan demokratisnya kepemimpinan di Yogyakarta. Dalam memberikan tanggapannya, Huda bahkan menyebut bahwa anak-anak seusia SD saja memahami sejarah Yogyakarta, sementara Ade Armando tidak. Pernyataan ini bukan hanya membantah argumen Ade Armando, tetapi juga secara implisit merendahkan kapasitas intelektualnya dalam memahami konteks keistimewaan Yogyakarta. Pada bagian penutup berita, Huda juga menekankan kembali ketidaktepatan pernyataan Ade Armando dengan menyebutnya "kebodohan" dan "kedangkalan pemahaman".

Berita ini telah memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan unsur 5W+1H. Berdasarkan analisis struktur skrip, berita memberikan informasi terkait topik yang dibahas, yaitu tanggapan atas pernyataan Ade Armando yang menyebut adanya praktik politik dinasti di Yogyakarta (*what*). Kemudian berita juga menjelaskan siapa yang memberikan tanggapan tersebut (*who*), kapan dan dimana tanggapan tersebut disampaikan (*when* dan *where*), mengapa ia memberikan tanggapan tersebut (*why*), serta bagaimana ia memberikan tanggapannya (*how*).

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis struktur tematik, meskipun berita ini pada dasarnya berfokus pada tanggapan dari Huda Tri Yudiana, namun dalam paragraf-paragraf awal berita justru terlebih dahulu mengutip pernyataan dari video kontroversial Ade Armando yang beredar di media sosial. Strategi penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan sebelum akhirnya memberikan ruang bagi tanggapan dari Huda. Hal ini menciptakan framing bahwa berita ingin menampilkan pernyataan Ade Armando sebagai pemicu utama kontroversi sebelum kemudian membentuk narasi pembelaan terhadap keistimewaan Yogyakarta melalui tanggapan Huda. Berita ini juga tidak memberikan ruang bagi sudut pandang lain atau pendapat tandingan yang bisa memberikan konteks lebih luas mengenai kritik terhadap politik dinasti.

Sementara itu, jika dilihat dari struktur retoris, berita ini menggunakan beberapa kata yang bersifat merendahkan dan ofensif, seperti "menunjukkan kebodohan," "kedangkalan pemahaman," dan "memalukan". Pilihan diksi ini semakin mempertegas framing negatif terhadap Ade Armando yang tidak hanya dikritik secara substansi, tetapi juga secara personal.

Tabel 3. 16 Hasil Analisis Berita "Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan"

Struktur	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	Berita menampilkan pernyataan dari dua narasumber

	utama yang saling bertentangan, yaitu Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY dan Ade Armando. Kutipan Ade Armando bersifat provokatif, sedangkan kutipan Huda membela legalitas pemerintahan Yogyakarta.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Susunan paragraf dalam berita terlebih dahulu menampilkan pernyataan dari video kontroversial Ade Armando, kemudian diikuti oleh paragraf yang berisi tanggapan dari Huda.
Retoris	Dalam berita ditemukan beberapa kata yang bersifat merendahkan seperti "menunjukkan kebodohan," "kedangkalan pemahaman," dan "memalukan".

g. Pencopotan Spanduk Provokatif Ade Armando

Berita berjudul "Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja" membahas pencopotan spanduk-spanduk yang mengandung unsur provokatif terkait Ade Armando. Berdasarkan analisis struktur sintaksis, *lead* berita secara langsung mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa tindakan pencopotan spanduk tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan pelanggaran kampanye, sekaligus mengaitkannya dengan praktik *black campaign*. Fokus berita tidak hanya terletak pada pencopotan spanduk semata, tetapi juga pada narasi bahwa isu tersebut digunakan secara strategis untuk menyerang partai politik tertentu.

Pernyataan dalam berita hanya disampaikan oleh satu narasumber, yaitu Andi Kertala selaku Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta. Ia menekankan bahwa pemanfaatan isu Ade Armando tentang politik dinasti Yogyakarta digunakan secara strategis untuk menyerang pihak lawan politik. Pernyataan ini tidak hanya mengkritik penggunaan isu secara negatif, tetapi juga menyiratkan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip proses demokrasi. Pada bagian penutup, berita menyampaikan bahwa Bawaslu tidak bertindak represif, tetapi lebih mengutamakan upaya persuasif dalam

menjaga aturan kampanye. Dengan menyusun narasi seperti ini, berita membingkai Bawaslu sebagai lembaga yang profesional dan berusaha menjaga netralitas, sementara pihak yang memasang spanduk ditampilkan sebagai pihak yang mencoba memanfaatkan isu kontroversial demi keuntungan politik.

Pada analisis struktur skrip, berita ini telah memenuhi unsur 5W+1H secara lengkap. Berita menginformasikan terkait pencopotan spanduk yang bermuatan provokatif (*what*). Selanjutnya berita juga menjelaskan siapa pihak yang melakukan pencopotan spanduk tersebut (*who*), kapan dan dimana spanduk tersebut dicopot (*when* dan *where*), mengapa pihak tersebut melakukan pencopotan spanduk (*why*), serta bagaimana proses pencopotan spanduk tersebut berlangsung (*how*).

Sementara itu, hasil analisis struktur tematik berita ini menunjukan bahwa fokus utama berita bukan pada kontroversi pernyataan Ade Armando, tetapi pada bagaimana pernyataan tersebut dimanfaatkan dalam kampanye politik. Paragraf pembuka langsung menetapkan konteks dengan menyebutkan bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta menemukan potensi pelanggaran selama masa kampanye. Paragraf selanjutnya berfokus pada penjelasan atas maksud dari pelanggaran tersebut, yakni adanya upaya "menunggangi isu" pernyataan Ade Armando untuk melakukan *black campaign*.

Berita ini sama sekali tidak memberikan informasi mengenai siapa pihak yang memasang spanduk, isi spesifik dari spanduk tersebut, atau bagaimana publik meresponsnya. Setiap kalimat dalam berita menegaskan bahwa penyalahgunaan isu tentang pernyataan Ade Armando telah memicu reaksi dari aparat. Bawaslu tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mencoba mencegah dampak negatifnya melalui proses persuasif. Sehingga secara keseluruhan, berita ini membangun framing yang menempatkan pencopotan spanduk sebagai tindakan yang sah dan diperlukan dalam rangka menegakkan aturan kampanye. Dengan minimnya perspektif dari pihak yang memasang spanduk, berita ini lebih menekankan pada narasi

pengawasan pemilu dan membentuk persepsi bahwa penggunaan isu Ade Armando dalam konteks politik dinasti Yogyakarta telah disalahgunakan sebagai alat kampanye negatif atau *black campaign.*

Terakhir, pada analisis struktur retoris, terdapat frasa seperti "menunggangi isu" yang secara retoris mengkritik pihak yang memanfaatkan pernyataan kontroversial Ade Armando untuk keuntungan politik. Selain itu, penggunaan foto pada bagian *headline* sudah sesuai dengan isi berita. Hal ini memberikan gambaran lebih lengkap pada pembaca terkait isi spanduk yang dianggap merupakan pelanggaran kampanye.

Tabel 3. 17 Hasil Analisis Berita "Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja"

Struktur	Strategi Penulisan
Sintaksis	Penggunaan pernyataan dan kutipan dari Andi Kertala selaku ketua Bawaslu Kota Yogyakarta membingkai Bawaslu sebagai pihak yang profesional dan netral.
Skrip	Berita telah memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap.
Tematik	Berita tidak memberikan perspektif dari pihak yang memasang spanduk, paragraf didominasi dengan penjelasan dari sudut pandang Bawaslu yang berusaha menindak pelanggaran kampanye.
Retoris	Penggunaan foto dalam halaman utama sudah sesuai dengan isi berita.

B. Hasil Wawancara

1. Media *Tribunjogja.com*

Sebagai bagian dari pendalaman terhadap hasil analisis framing isu politik dinasti di Yogyakarta pada media *Tribunjogja.com*, peneliti melakukan wawancara dengan Hendy Kurniawan selaku Manajer Produksi. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses redaksional di *Tribunjogja.com* berlangsung, khususnya dalam menentukan narasumber, sudut pandang berita, serta bagaimana media tersebut menyikapi kritik terhadap keistimewaan Yogyakarta yang

disampaikan oleh Ade Armando.

Dalam menjelaskan alur kerja redaksi, Hendy mencontohkan secara langsung bagaimana redaksi menangani kasus pernyataan Ade Armando. Ia menjelaskan:

> Isu ini perlu diklarifikasi ke Sultan, karena sasaran tembaknya Ade Armando adalah Sultan. Aku menugaskan wartawan yang *desk*-nya pemerintahan provinsi di DIY. Aku minta tolong wartawan tanyakan ke Sultan ya bagaimana *statement* Sultan terkait dengan *statement* Ade Armando. Hasil wawancara dari Sultan itu ditulis *plus* pengayaannya, ada data-data literatur, misalnya komentarnya Ade Armando sendiri. Kita masukkan di dalam naskah berita untuk memberikan konteks (Hendy, wawancara, 26 Maret 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemberitaan yang dilakukan *Tribunjogja.com* tidak semata-mata menyajikan kutipan Sultan, tetapi juga disusun dengan pelengkap berupa latar belakang pernyataan Ade Armando.

Menanggapi bagaimana framing berita terbentuk, Hendy mengakui bahwa framing bisa terjadi karena perbedaan panjang kutipan antar narasumber.

> Jadi ada banyak pertimbangannya. Salah satunya misalnya Si A diwawancara tapi *statement*-nya cuma dikit, sedangkan Si B menjelaskan dengan lebih banyak. Ya kita harus memberikan porsi yang lebih banyak juga, karena dia memberikan jauh lebih banyak, begitu. Tapi itu memang bisa menciptakan framing, karena porsi itu memperlihatkan keberpihakan, walaupun tidak selalu. Kita memberikan porsi yang lebih banyak kepada pihak A karena pihak B dianggap lebih logis dalam memberikan *statement.* Itu sangat mungkin terjadi. Jadi memang dalam beberapa kasus meskipun kita tahulah kalau ini bakal dapat framing gini-gini, tapi itu aman untuk diberitakan yang penting secara kaidah jurnalistiknya terpenuhi (Hendy, wawancara, 26 Maret 2025).

Hal ini menjelaskan mengapa dalam banyak berita di *Tribunjogja.com*, seperti dalam berita "Kontribusi Yogyakarta untuk Kemerdekaan Indonesia" atau berita "Keistimewaan Yogyakarta Sah Secara Konstitusi," narasumber yang mendukung terhadap keistimewaan Yogyakarta lebih dominan dibanding pembelaan terhadap Ade Armando. Dominasi porsi kutipan inilah yang membentuk narasi pembelaan terhadap status pemerintahan Yogyakarta.

Terkait pemilihan narasumber, Hendy menekankan pentingnya relevansi dan kompetensi.

> Kita tidak bisa ngomong, tapi kita bisa wawancara ke akademisi atau ke partai politik lainnya. Tidak perlu harus ketua-ketua begitu yang penting relevan, narasumbernya punya kompetensi dan kapabilitas untuk menjawab persoalan tersebut. Belum tentu yang punya jabatan tinggi itu yang paling utama. Misalnya Ganjar Pranowo itu dulu ikut menyusun Undang-Undang Keistimewaan DIY. Meski bukan dari PSI, kita bisa tanya ke Ganjar, "Pak Ganjar, *sampeyan* dulu ikut menyusun loh, menurut *sampeyan* gimana soal omongannya Ade Armando?". Jadi spektrumnya luas, bisa akademisi, bisa aktivis, bisa partai lain yang penting dia relevan dan mengerti substansi masalahnya (Hendy, wawancara, 26 Maret 2025).

Strategi ini selaras dengan temuan analisis yang menunjukkan bahwa *Tribunjogja.com* banyak mengutip pendapat akademisi, tokoh legislatif lokal, hingga pelaku budaya untuk membingkai wacana politik dinasti dari sudut historis dan legal. Selanjutnya, Hendy menyatakan bahwa pemilihan *angle* berita tidak semata mengikuti selera media, melainkan berdasarkan ketersediaan data dan keakuratan informasi.

> Untuk menentukan sudut pandang pertama kita harus menggali data. Setelah kita kumpul barulah kita melakukan pendalaman lebih jauh lagi menemui pihak-pihak yang terlibat atau diduga terlibat dalam kasus ini.

Di sinilah prinsip *cover both side* dijalankan. Hendy menjelaskan, jika konfirmasi dari narasumber belum diperoleh hingga batas waktu, berita akan ditunda. Namun jika upaya klarifikasi sudah dilakukan dengan maksimal, maka berita tetap bisa dimuat dengan mencantumkan pernyataan seperti "narasumber belum bisa dihubungi" (Hendy, wawancara, 26 Maret 2025).

Terakhir, terkait independensi media, Hendy menegaskan bahwa *Tribunjogja.com* tidak ingin menjadi corong politik pihak manapun.

> Kita pastikan bahwa narasumber yang kita pilih itu berkompeten, relevan dengan isu yang kita angkat. Kita tidak punya intensi untuk menyudutkan salah satu pihak. Kita sudah tentukan *angle*-nya supaya tidak ada kepentingan politik yang masuk. Misalnya kepentingan politik ini, ada politisi yang kita tahu *track record*-nya. Contohnya ada politisi dari partai A yang kita tahu *track record*-nya suka memperkeruh suasana, memberikan *statement* mesti kontroversial. Misalnya kita udah wawancara, terus kita dengarkan hasil wawancara tadi, kita bisa nilai, "wah ini buruk ini, ini bisa menimbulkan kontroversi yang jauh lebih tajam nih". Itu cara kita supaya berita ini tidak disusupi dengan kepentingan politik tertentu (Hendy, wawancara, 26 Maret 2025).

2. Media *Harianjogja.com*

Peneliti melakukan wawancara dengan Anton Wahyu Prihartono selaku Kepala Redaksi *Harianjogja.com*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif redaksi terhadap penyusunan berita, khususnya dalam menyikapi isu yang sensitif dan kontroversial seperti pernyataan Ade Armando terkait keistimewaan Yogyakarta. Narasumber memberikan penjelasan terkait prinsip serta pertimbangan yang digunakan redaksi dalam memilih sudut pandang berita, narasumber, hingga pemilihan diksi dan kutipan yang digunakan.

Narasumber menjelaskan bagaimana proses kerja redaksi dari awal hingga berita terbit, ia mengungkapkan bahwa pendekatannya sangat bergantung pada kebutuhan pembaca.

> Kalau kaitannya dengan proses pembuatan berita itu tidak lepas dari kita harus melihat yang menjadi kebutuhan masyarakat itu apa dan yang menjadi kebutuhan pembaca kita itu apa. Misalnya, kalau masyarakat saat ini sedang butuh informasi tentang PPDB, ya pasti kita akan memberikan porsi pemberitaan tentang PPDB yang banyak. Jadi kita menyesuaikan apa sih yang menjadi sekiranya kebutuhan dari pembaca kita. Itu harus kita potret, kita harus *profiling* (Anton, wawancara, 07 April 2025).

Dari penjelasan ini, terlihat bahwa redaksi *Harianjogja.com* tidak hanya mengikuti perkembangan isu, tetapi juga mengutamakan relevansi dengan situasi masyarakat. Terkait standar penentuan berita yang layak tayang, Anton menegaskan bahwa *Harianjogja.com* berpegang pada fungsi edukatif, informatif, hiburan, dan kontrol sosial.

> Kalau tidak memberikan informasi, ya sudah tidak usah dimuat, simpel. Kalau tidak memberikan edukasi, ngapain dimuat? Kita cuma buang-buang energi saja. Saya sudah tekankan, saya sudah minta kepada semua rekan redaksi, berita yang tidak berimbang tidak usah dimuat. Artinya berita yang layak adalah berita yang akurat, *balance*, *clear*. Ya itu saja. Jangan sampai menebar fitnah, kabar bohong (Anton, wawancara, 07 April 2025).

Menanggapi pernyataan kontroversial Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta, Anton secara tegas menyampaikan bahwa pernyataan tersebut kurang tepat karena tidak memperhatikan keberadaan Undang-Undang Keistimewaan.

> Saya kira ada hal yang perlu di-*clear*-kan dalam persoalan ini. Bahwa apapun itu kita harus mengacu pada undang-undang yang ada. Yogyakarta

> tidak bisa disamakan dengan provinsi yang lain. Makanya menurut saya Ade Armando juga tidak bisa menyamakan Yogyakarta dengan provinsi lain apalagi mengatakan politik dinasti. Aturannya jelas kok. Jadi menurut saya, Ade yang malah kurang cermat dalam memberikan pernyataan, atau mungkin lupa dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan (Anton, wawancara, 07 April 2025).

Selanjutnya, ketika ditanya soal sumber berita, terutama dalam kasus ketika redaksi tidak dapat melakukan wawancara langsung, Anton menjelaskan bahwa redaksi memanfaatkan sumber yang tersedia secara etis.

> Memang kita kalau dalam dunia online ya, kita hanya mem-*follow up* atau menggunakan video yang diunggah dari Ade Armando, kemudian meminta tanggapan kepada pihak-pihak terkait. Contoh pada waktu itu, kami meminta tanggapan bagaimana pandangan dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kemudian kami juga minta pandangan dari pihak-pihak lain yang mungkin bukan dari keraton, tapi misalnya dari kalangan akademisi yang pandangannya jauh lebih netral. Kami cuma sebatas bagaimana mencari tanggapan pernyataan dari Ade Armando itu, dari pihak-pihak terkait, pihak yang berkompeten, pihak yang relevan untuk memberikan pernyataan (Anton, wawancara, 07 April 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berita tidak mengutip langsung pernyataan Ade Armando dari wawancara eksklusif, redaksi tetap berupaya menjaga prinsip *cover both side* melalui kutipan video dan tanggapan dari pihak lain yang relevan.

Anton juga kembali menegaskan bahwa dalam menentukan sudut pandang sebuah berita, media harus menulis berita untuk kepentingan pembaca, bukan berdasarkan opini redaksi.

> Kita membuat berita itu bukan untuk kita, tapi untuk pembaca kita, untuk khalayak kita. Jadi kita harus memotret apa sih yang dibutuhkan pembaca kita. Ketika menyoroti suatu persoalan, kita harus bisa memberikan solusi, bukan hanya sekadar mengkritik. Kita harus memberikan perspektif yang solutif (Anton, wawancara, 07 April 2025).

Terakhir, Anton menekankan bahwa *Harianjogja.com* selalu berpegang pada prinsip netralitas dan keberpihakan pada kepentingan publik, bukan pada tekanan politik

> Esensi kita bermedia itu adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Kita menyuarakan kebenaran, bukan kemudian lantas kita tunduk atau terkooptasi pada kepentingan politik tertentu. Kami mau tampil apa adanya, yang penting kami menyajikan informasi yang akurat dan *clear*. Media ini benar-benar menjadi navigasi informasi bagi masyarakat,

menjadi panduan, menjadi referensi (Anton, wawancara, 07 April 2025).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemberitaan isu politik dinasti di Yogyakarta dalam media online *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com*, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kecenderungan framing yang serupa, yakni membela keistimewaan Yogyakarta serta merespons kritik terhadap sistem tersebut dengan menonjolkan legitimasi hukum dan nilai historis. Meski demikian, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam strategi penyampaian dan kedalaman framing yang dibangun oleh masing-masing media. *Tribunjogja.com* cenderung membangun narasi melalui pendekatan yang kuat secara historis, legal, serta melalui kutipan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas politik dan akademik. Sementara itu, *Harianjogja.com* lebih menitikberatkan pada dinamika sosial yang muncul dari masyarakat, serta respons-respons lokal yang menggambarkan sentimen warga terhadap isu tersebut.

Dalam pemberitaannya, *Tribunjogja.com* memanfaatkan kutipan dari tokoh penting seperti Sri Sultan HB X, Eko Suwanto, Arya Budi, dan berbagai figur dari kalangan legislatif dan akademisi. Struktur pemberitaan media ini secara konsisten memenuhi unsur 5W+1H yang menunjukkan kelengkapan dan sistematika dalam penyajian informasi. Secara tematik, isu pernyataan kontroversial dari Ade Armando dijadikan sebagai titik awal yang kemudian dikontraskan dengan narasi mengenai keistimewaan Yogyakarta sebagai bentuk warisan sejarah, budaya, dan hukum yang telah sah diakui oleh negara. Retorika yang digunakan pun kuat dan ekspresif, dibuktikan dengan penggunaan diksi seperti “menyesatkan,” “melecehkan,” hingga “melukai hati rakyat” yang menggambarkan sikap penolakan terhadap kritik Ade Armando.

Sebaliknya, *Harianjogja.com* meskipun juga menunjukkan pembelaan terhadap keistimewaan Yogyakarta, media ini menyampaikan narasinya dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berfokus pada suara serta aksi masyarakat, seperti respons dari kelompok Paman Usman, penyebaran poster penolakan dan berbagai tanggapan publik. Dalam aspek tematik, framing yang dibentuk lebih menekankan pada ekspresi masyarakat tanpa pendalaman yang komprehensif terhadap konteks historis dan

konstitusional sebagaimana ditampilkan oleh *Tribunjogja.com.* Sementara itu, aspek retoris dalam berita *Harianjogja.com* juga cenderung lebih ringan dengan pemilihan diksi yang tidak terlalu bersifat simbolik ataupun emosional.

Perbedaan strategi penyajian ini mencerminkan orientasi redaksional masing-masing media. *Tribunjogja.com* tampak berupaya tampil sebagai media yang argumentatif dan informatif dengan penekanan pada otoritas dan fakta hukum, sementara *Harianjogja.com* lebih menempatkan diri sebagai corong ekspresi masyarakat lokal yang memberi ruang bagi berbagai reaksi sosial atas isu politik dinasti di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Tribunjogja.com* dan *Harianjogja.com* juga dapat disimpulkan bahwa keduanya tetap berpegang pada prinsip jurnalistik, namun memiliki pendekatan redaksional yang berbeda. Hendy Kurniawan selaku Manajer Produksi *Tribunjogja.com* menjelaskan bahwa framing dalam pemberitaan mereka terbentuk karena porsi pernyataan yang diberikan oleh narasumber tidak merata, sehingga redaksi lebih banyak mengangkat pernyataan pihak yang dianggap lebih argumentatif dan substansial. Sementara itu, Anton Wahyu Prihartono selaku Kepala Redaksi *Harianjogja.com* menjelaskan bahwa media ini lebih mengutamakan penerbitan berita yang memiliki nilai edukatif dan informatif daripada hanya sekedar kritis semata.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang menjadikannya perlu untuk disempurnakan dan diperbaiki oleh peneliti selanjutnya yang mengangkat topik serupa. Beberapa keterbatasan tersebut diantaranya adalah:

1. Pengumpulan Data

   Data dari penelitian ini adalah berita-berita di media online *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* yang ditelusuri menggunakan kata kunci "Ade Armando" dan "politik dinasti". Namun *Harianjogja.com* tidak memiliki fitur "*searching*" sebagaimana *Tribunjogja.com* dan beberapa media online lainnya, sehingga peneliti harus mencari secara manual berita-berita yang sesuai dengan topik penelitian. Hal ini membuat data yang dikumpulkan belum tentu telah mencakup keseluruhan berita tentang politik

dinasti di Yogyakarta yang diterbitkan di *Harianjogja.com.*

2. Objek Penelitian

   Penelitian ini mengkaji pernyataan Ade Armando mengenai isu politik dinasti di Yogyakarta yang diberitakan oleh *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com*. Mengingat banyaknya berita terkait pembahasan tersebut yang tersedia di kedua media, penelitian ini hanya menganalisis beberapa berita terpilih, sehingga hasil analisis mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan berita.

3. Keterbaruan Objek Penelitian

   Objek penelitian ini adalah pemberitaan di *Harianjogja.com* dan *Tribunjogja.com* pada periode 1 Desember 2023 hingga 30 Januari 2024, sedangkan penelitian ini baru dapat diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini membuat objek penelitian kurang relevan ketika penelitian ini sudah dapat dibaca oleh publik.

C. Saran

1. Bagi media online *Harianjogja.com,* website berita sebaiknya dilengkapi dengan fitur *"searching"* sebagaimana *Tribunjogja.com* dan beberapa media lainnya. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk mencari berita sesuai topik yang mereka inginkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengeksplorasi objek penelitian yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan media lokal dan nasional. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji dimensi visual seperti penggunaan foto, infografis dan desain tampilan yang turut memengaruhi konstruksi framing dalam pemberitaan.
3. Bagi masyarakat atau pembaca berita, penting untuk memiliki kesadaran kritis terhadap isi berita yang dikonsumsi. Pembaca diharapkan tidak menerima informasi secara mentah, melainkan melakukan pembacaan kontekstual dan membandingkan pemberitaan dari berbagai sumber agar terhindar dari bias informasi yang mungkin terjadi akibat framing media.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, A. N. (2005). *Penulisan Berita.* Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Adikara, G. J. (2022). Framing of local media in the management issues of Sultan Ground and Pakualaman Ground in Yogyakarta. *Journal of Social Studies*, *18*(1), 81-100.

Akbar, H. (2023). *Pemberitaan Isu Pemindahan Ibukota Baru pada Media Online* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

Arifin, F. (2024). Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *31*(3), 636-665.

Arifin, K. A. (2014). *Gegar Keistimewaan Jogja: Politik Pertarungan Wacana dalam Media Luar Ruang*. Yogyakarta: Ladang Kata.

Budiyono. (2016). Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media (Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Pada Harian Kompas dan Koran Tempo). *IPTEK-KOM*, *18*(2), 160-173.

Butsi, F. I. (2019). Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi: Communique*, *1*(2), 52-58.

Dedi, A. (2022). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Moderat: 8*(1), 92-101.

Effendi, T. (2015). Collective Identity and ProtestTactics in Yogyakarta Under ThePost-Suharto Regime. *Journal of Government and Politics, 6*(2), 204-213.

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.* Yogyakarta: LkiS

Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Study Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik.* Jakarta:Granit.

Heryanto, Gun-Gun. (2019). *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Revolusi.* Yogyakarta: IRCiSoD.

Larasati, D. P., & Rezki, J. F. (2023). Political Dynasties and Local Spending in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *21*(2), 222-241.

Misbahusurur, S. (2021). *Pemberitaan Isu Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua di Media Online Kompas.com dan Republika.co.id* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Muchlis, M. M., Ilmar, A., Maskun., Aswanto., & Tajuddin, M. S. (2024). Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *21*(4), 566-587.

Nainggolan, I. D., Widyawan, P. A., Akbar, N., Lukas Febrian K, & Sholihatin, E. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Puan Maharani Terhadap Isu Peraturan Perundang - Undangan Cipta Kerja Di Portal Berita Kompas.Com Dan Detik.Com Pada Edisi Oktober 2020. *Jurnal Sastra dan Bahasa*, *1*(2), 85-95.

Naya, F. A. (2020). *Analisis Wacana Terhadap Bahasa Pemberitaan Harian Jogja* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nugroho, C. (2014). Konstruksi Berita Kontroversi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (Analisis Framing Pan Dan Kosicki Terhadap Berita Surat Kabar Harian Kompas Dan Kedaulatan Rakyat Edisi Januari 2011-Maret 2011). *Jurnal Komunikasi*, *2*(3), 27-43.

Nur, E. (2021). Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, *2*(1), 51-64.

Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., Agusmidah. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review, 1*(2), 99-108.

Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). *Framing Analysis: An Approach to News Discourse. Political Communication,* (10)*,* 55-75.

Paryanto., & Nurmandi, A. (2016). Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca UU No. 13 Tahun 2012. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 3rd.* Program Pascasarjana Universutas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pratiwi, D. (2018). *Hirarki Pengaruh dalam Penentuan Berita: Studi Pada Kebijakan Rubrik Politik Harian Umum Media Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Putri, D. M. (2013). Peran Media Online dalam Pembangunan Provinsi Banten. *Journal Communication Spectrum*, *3*(1), 31-45.

Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the philippines. *Quarterly Journal of Political Science*, 11(2), 151-181.

Ramadhania, A. (2013). Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kerangka Negara Demokratis. *Padjajaran Law Review*, *1*(1).

Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1), 2260-2269.

Rahmah, A. N., & Maulia, S. T. (2024). Politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *4*(2), 118–125.

Rifayani, S. D., Harsasto, P., & Martini, R. (2013). Implikasi kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap demokratisasi dan efektivitas pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-10.

Setiowati, E., & Suciati, P. (2019). Konstruksi Tokoh dalam Pemberitaan di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Mundurnya Ahok dari Partai Gerindra di Media Online). *Jurnal Vokasi Indonesia, 7*(1), 28-38.

Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di Tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, *1*(1), 1-15.

Syanur, A. D. M., Shantih, I. B., & Afrilia, L. (2023). Politik Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, *1*(3), 17-26.

Thontowi, J. (2019). Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *UIR Law Review*, *3*(1), 1-19.

Tolo, E. Y. S. (2013). Dari Otokrasi ke Demorkasi: Menyibak Sejarah dan Survivalitas "Demorkasi Ala Daerah Istimewa Yogyakarta". *Humaniora*, *25*(3), 270-280.

Wahyuti, T. (2015). Kajian Program Berita di Media Televisi. *Konvergensi*, *1*(1), 39-52.

Website Analisis Berita:

Handoko, T. (2023, 3 Desember). Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/03/510/1157027/beredar-undangan-menggeruduk-kantor-psi-diy-minta-tangkap-ade-armando

Handoko, T. (2023, 3 Desember). Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/03/510/1157026/ade-armando-bicara-politik-dinasti-wakil-ketua-dprd-diy-memalukan

Huda, M. (2023, 10 Desember). Polda DIY Lakukan Penyelidikan Dugaan Ujaran Kebencian oleh Ade Armando. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/10/polda-diy-lakukan-penyelidikan-dugaan-ujaran-kebencian-oleh-ade-armando

Huda, M. (2023, 3 Desember). Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/03/tanggapi-pernyataan-ade-armando-wakil-ketua-dprd-diy-belajar-lagi-demokrasi-dan-sejarah-nkri

Huda, M. (2023, 5 Desember). Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/05/topeng-ade-armando-dilarung-di-sungai-gajahwong-jogja-begini-maksudnya

Karin, A. A. (2023, 4 Desember). Ade Armando singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/04/510/1157107/ade-armando-singgung-politik-dinasti-di-regional-massa-aksi-ancam-copot-semua-baliho-psi-di-diy

Karin, A. A. (2023, 6 Desember). Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/06/510/1157321/spanduk-bermuatan-provokatif-tentang-ade-armando-dicopot-bawaslu-kota-jogja

Leon, Y. (2023, 4 Desember). Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/04/510/1157056/ade-armando-singgung-politik-dinasti-jogja-ini-respons-psi-diy

Newswire. (2023, 7 Desember). Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://news.harianjogja.com/read/2023/12/07/500/1157434/ribut-ribut-politik-dinasti-di-diy-kaesang-mempersilakan-ade-armando-keluar-dari-psi

Newswire. (2023, 6 Desember). Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://news.harianjogja.com/read/2023/12/06/500/1157297/ade-armando-singgung-politik-dinasti-di-jogja-begini-komentar-ganjar-pranowo

Raharjo, T. (2023, 29 Januari). Komisi A DPRD DIY Dukung Polda DIY Cepat Tangani Proses Hukum Pelaporan Terhadap Ade Armando PSI. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2024/01/29/komisi-a-dprd-diy-dukung-polda-diy-cepat-tangani-proses-hukum-pelaporan-terhadap-ade-armando-psi

Razak, A. H. (2023, 5 Desember). Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/05/510/1157186/soal-video-ade-armando-senggol-keistimewaan-diy-gkr-hemas-pasti-itu-pesanan-tapi-yo-gak-popo

Razak, A. H. (2023, 7 Desember). Ade Armando Ditantang Debat Ilmiah Soal Keistimewaan DIY. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/07/510/1157388/ade-armando-ditantang-debat-ilmiah-soal-keistimewaan-diy

Razak, A. H. (2023, 7 Desember). Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf. *Harianjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/03/510/1157040/tak-paham-sejarah-keistimewaan-diy-nasdem-tuntut-ade-armando-minta-maaf

Suryo, H. (2023, 4 Desember). Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/04/sri-sultan-hb-x-tanggapi-penyataan-ade-armando-soal-politik-dinasti-di-diy

Suryo, H. (2023, 4 Desember). Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/04/ade-armando-singgung-politik-dinasti-di-diy-pakar-politik-ugm-itu-argumen-defensif

Suryo, H. (2023, 8 Desember). PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X. *Tribunjogja.com*. Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/08/psi-klaim-sudah-meminta-maaf-secara-langsung-ini-respon-sultan-hb-x

Suryo, H. (2023, 9 Desember). Memahami Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/09/memahami-asal-usul-keistimewaan-yogyakarta

Tribun Jogja. (2023, 4 Desember). Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/04/eko-suwanto-penetapan-sultan-hb-x-pakualam-x-sesuai-pancasila-konstitusi-dan-sah-secara-hukum

Tribun Jogja. (2023, 8 Desember). Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar. *Tribunjogja.com.* Diakses pada 7 Februari 2025 dari https://jogja.tribunnews.com/2023/12/04/dr-raden-stevanus-yogya-punya-kontribusi-besar-kemerdekaan-ri-belajar-sejarah-sebelum-komentar

LAMPIRAN

A. Analisis Framing Pada Berita *Tribunjogja.com*

1. Judul Berita: *"Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar"* (3 Desember 2023)

Gambar 3.1 Anggora DPRD DIY dari PSI yaitu Dr Raden Stevanus

Tabel 3.1 Framing Berita "*Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar*"

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	*Headline*	"Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar"
	Lead	Lead berita memfokuskan pada tanggapan dari PSI yang menekankan pentingnya menghargai keistimewaan Yogyakarta. Paragraf awal ini langsung memperkenalkan pandangan PSI tanpa memberikan ruang bagi pembelaan terhadap pernyataan Ade Armando.
	Latar Informasi	Berita memberikan konteks historis untuk memperkuat argumen keistimewaan

		Yogyakarta. Fakta-fakta sejarah, seperti berdirinya Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 1755 dan status Yogyakarta sebagai negeri merdeka sebelum Indonesia terbentuk, digunakan untuk menunjukkan legitimasi keistimewaan DIY.
	Kutipan	Kutipan yang ditulis dalam berita ini berasal dari satu sumber, yaitu Dr. Raden Stevanus selaku Anggota DPRD DIY dari PSI. Kutipan tersebut digunakan untuk menegaskan kontribusi Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
	Pernyataan	Pernyataan dalam berita ditulis dalam bentuk kutipan langsung dan tidak langsung. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa kritik terhadap keistimewaan Yogyakarta dianggap tidak berdasar jika tidak memahami sejarah panjang DIY.
	Penutup	Penutup dalam berita ini berupa kutipan langsung dari Dr. Raden Stevanus yang menegaskan pentingnya menghargai perjuangan para pendahulu dalam mendirikan Republik Indonesia.
Skrip	*What*	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Anggota DPRD DIY, Dr. Raden Stevanus, menanggapi pernyataan kontroversial Ade Armando tentang politik dinasti di

		Yogyakarta.
	Who	Dr. Raden Stevanus dari PSI
	Where	DPRD DIY
	When	Senin, 4 Desember 2023
	Why	Tanggapan PSI muncul karena Ade Armando dinilai meremehkan atau mempertanyakan keistimewaan Yogyakarta sebagai bentuk politik dinasti. PSI ingin menegaskan bahwa keistimewaan DIY memiliki latar belakang sejarah yang kuat, termasuk peran Yogyakarta dalam proses kemerdekaan dan pembangunan Republik Indonesia.
	How	Dr. Raden Stevanus merespons melalui keterangan tertulis, menegaskan bahwa siapapun yang ingin berkomentar mengenai keistimewaan Yogyakarta sebaiknya memahami sejarah panjang daerah ini terlebih dahulu. Ia menyebut sejarah Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka sebelum Indonesia berdiri, sumbangsihnya dalam kemerdekaan, serta kontribusi berkelanjutan terhadap Republik Indonesia.
Tematik	Paragraf	Setiap paragraf berisi satu proposisi kunci yang dimulai dari isu (pernyataan Ade Armando), kemudian ditanggapi dengan argumen berbasis sejarah, penjelasan kontribusi Yogyakarta, dan diakhiri dengan

		anjuran untuk mempelajari sejarah sebelum berkomentar.
	Kalimat	Berita ini menggunakan dua jenis kalimat utama, yatu kalimat deklaratif yang menjelaskan konteks dan kalimat kutipan yang memperkuat proposisi.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar kalimat dalam berita membentuk alur logis dari konflik ke argumentasi yang menjelaskan mengapa pernyataan Ade Armando tidak tepat, sekaligus menampilkan sikap PSI yang menghargai keistimewaan DIY sebagai warisan sejarah yang patut dipahami dan dihormati.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Dalam berita ini tidak ditemukan foto, idiom, maupun grafik. Hal ini membuat pesan menjadi fokus pada isi verbal dan kredibilitas narasumber.

2. Judul Berita: *"Memahami Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta"* (8 Desember 2024)

Gambar 3.2 Podcast Ngobrol Parlemen bersama Tribun Jogja

Tabel 3.2 Framing Berita "*Memahami Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Memahami Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta"
	Lead	Lead berita diawali dengan penegasan bahwa pernyataan Ade Armando telah memicu kontroversi dan menyinggung berbagai pihak, khususnya Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu.
	Latar Informasi	Latar informasi dalam berita membangun kerangka sejarah yang cukup rinci. Narasi tentang bagaimana Keraton melindungi para pejuang saat menghadapi agresi Belanda, hingga peran Sultan HB IX yang menyumbangkan dana bagi pemerintahan baru Indonesia, disebutkan untuk membuktikan bahwa keistimewaan DIY adalah buah dari komitmen dan kontribusi kerajaan lokal terhadap kelangsungan NKRI.
	Kutipan	Kutipan dalam berita berasal dari Yuni Satia Rahayu selaku anggota Komisi A DPRD DIY dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini selaku Kabag Pelayanan dan Umum Paniradya Keistimewaan DIY. Kutipan yang digunakan menyiratkan bahwa narasumber memiliki kewenangan, baik dari segi politik maupun administratif, untuk menjelaskan keabsahan keistimewaan DIY.

	Pernyataan	Pernyataan dalam berita memberikan kerangka yang lebih luas bahwa keistimewaan DIY harus dipahami sebagai sebuah entitas sosial, kultural, dan historis yang dilindungi oleh hukum.
	Penutup	Bagian penutup berita memberi penekanan bahwa semua regulasi yang bertingkat-tingkat (dari Piagam Kedudukan, UUD 1945, hingga UU 13/2012) menempatkan DIY pada posisi unik yang tidak bisa diurai hanya dengan sudut pandang demokrasi pemilihan langsung.
Skrip	*What*	Yuni Satia Rahayu selaku anggota Komisi A DPRD DIY dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini selaku Kabag Pelayanan dan Umum Paniradya Keistimewaan DIY menanggapi pernyataan Ade Armando dengan memberikan penjelasan terkait asal-usul keistimewaan Yogyakarta.
	Who	Yuni Satia Rahayu selaku anggota Komisi A DPRD DIY dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini selaku Kabag Pelayanan dan Umum Paniradya Keistimewaan DIY.
	Where	Penjelasan oleh Yuni Satia Rahayu dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini disampaikan dalam sebuah sesi bernama Ngobrol Parlemen bersama dengan Tribun Jogja.

	When	Sabtu, 9 Desember 2023
	Why	Komentar Ade Armando dianggap menyesatkan karena menilai keistimewaan DIY hanya dari sudut pandang demokrasi pemilihan, tanpa mempertimbangkan peran historis Keraton dalam memerdekakan dan membangun Indonesia.
	How	Yuni Satia Rahayu dan Ariyanti Luhur Tri Setyarini menjelaskan alasan historis dan dasar hukum di balik keistimewaan DIY. Penjelasan mereka menekankan bahwa posisi Gubernur DIY bukan sekadar warisan turun-temurun, melainkan konsekuensi dari kesepakatan konstitusional dan pengakuan kultural yang telah ada sejak NKRI berdiri.
Tematik	Paragraf	Paragraf dalam berita mayoritas berisi pernyataan dan kutipan narasumber terkait sejarah dan kerangka hukum keistimewaan Yogyakarta.
	Kalimat	Terdapat penggunaan repetisi pada kalimat seperti "Keistimewaan DIY dilindungi secara berlapis-lapis oleh berbagai regulasi." Hal ini menciptakan efek penegasan bahwa keistimewaan ini bukanlah hal sederhana atau sewenang-wenang.
	Hubungan antar kalimat	Setiap kalimat memiliki keterkaitan yang menunjukan sebuah alur yang logis, mulai dari mengapa tuduhan politik dinasti kurang

		relevan, bagaimana sejarah membentuk keistimewaan, serta apa payung hukum yang memastikannya tetap terjaga.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat kata seperti "politik dinasti" yang dilawankan dengan narasi *"sumbangsih Keraton"*, *"perlindungan pejuang"*, dan *"pengakuan dalam undang-undang"*. Hal ini membuat framing diksi mengarahkan pembaca memahami bahwa tuduhan "dinasti" tidak sejalan dengan kenyataan yang lebih kompleks dan konstitusional.

3. Judul Berita: *"Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI*" (2 Desember 2023)

Gambar 3.3 Wakil Ketua DPRD DIY

Tabel 3.3 Framing Berita "*Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI"

	Lead	Lead berita memperkenalkan pendapat Ade Armando yang menilai UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional karena jabatan Gubernur DIY diturunkan secara garis keturunan. Lead ini langsung memusatkan pembaca pada pangkal persoalan.
	Latar Informasi	DIY tidak sekadar "dinasti," melainkan hasil kesepakatan masyarakat dan landasan historis yang diakui konstitusi. Tercantum pula fakta bahwa rakyat DIY hampir aklamasi menyetujui UU Keistimewaan, menandakan dukungan luas terhadap sistem yang berlaku di Yogyakarta.
	Kutipan	Kutipan yang ditulis dalam berita ini berasal dari satu sumber, yaitu Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY. Kutipan tersebut membingkai Ade Armando sebagai figur yang kurang mendalami seluk-beluk keistimewaan DIY sebelum beropini.
	Pernyataan	Setiap pernyataan dalam berita selalu dilengkapi oleh kutipan langsung dari narasumber. Seluruh pernyataan dalam berita menitikberatkan pada penegasan bahwa keistimewaan DIY bukanlah politik dinasti.
	Penutup	Penutup dalam berita ini berupa kutipan langsung dari Wakil Ketua DPRD DIY yang menegaskan bahwa Ade Armando harus meminta maaf kepada masyarakat

		Yogyakarta karena banyak yang tersinggung. Ia juga menyatakan bahwa selama 10 tahun menjadi anggota DPRD DIY, justru menemukan sikap yang sangat egaliter dan demokratis dari *Ngarsa Dalem.*
Skrip	*What*	Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, turut menanggapi pernyataan Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menilai UU Keistimewaan Yogyakarta Inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.
	Who	Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY
	Where	Yogyakarta
	When	Minggu, 3 Desember 2023
	Why	Huda Tri Yudiana menganggap pernyataan Ade Armando merupakan sebuah kedangkalan pemahaman sejarah yang sangat memalukan.
	How	Pernyataan Ade Armando yang menilai adanya praktik politik dinasti di Yogyakarta menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD DIY. Ia menilai bahwa Ade Armando harus mempelajari lebih dalam terkait sejarah tanah air karena Sri Sultan HB IX dan Sri

		Paduka Paku Alam memiliki peran yang sangat penting dalam proses berdirinya NKRI.
Tematik	Paragraf	Paragraf awal secara langsung memperkenalkan latar konflik, yaitu pendapat Ade Armando yang menilai UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional dan menyebut adanya praktik politik dinasti. Berita kemudian beranjak pada respons dari Huda yang disajikan secara terstruktur melalui kutipan-kutipan langsung.
	Kalimat	Kalimat-kalimat dalam berita disusun untuk membangun narasi yang memperlihatkan bahwa masalah tidak sekadar opini individu, tetapi juga terkait sejarah, budaya, dan legitimasi demokratis DIY.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar kalimat dalam teks menunjukkan alur sebab-akibat. Pernyataan Ade Armando (sebab) memancing kemarahan Huda, kemudian memunculkan tanggapan yang menekankan bahwa Ade Armando perlu memahami konteks sejarah dan kebudayaan DIY (akibat).
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Foto yang ditampilkan adalah foto Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY saat diwawancarai oleh wartawan. Foto diambil langsung oleh wartawan *Tribunjogja.com.* Kemudian ditemukan penggunaan istilah

		"belajar lagi" dalam *headline* berita.

4. Judul Berita: *"Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY"* (4 Desember 2024)

Gambar 3.4 Sultan HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan

Tabel 3.4 Framing Berita *"Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY"*

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY"
	Lead	Lead membangun narasi bahwa keistimewaan DIY adalah sah berdasarkan konstitusi, sementara kritik Ade diposisikan sebagai opini pribadi yang tidak memiliki legitimasi hukum.
	Latar Informasi	Latar informasi menegaskan bahwa keistimewaan DIY adalah hasil pengakuan konstitusional dan historis, bukan praktik politik dinasti. Sultan membingkai DIY sebagai wilayah dengan hak istimewa yang

		sah secara hukum dan tidak dapat diperdebatkan berdasarkan opini semata.
	Kutipan	Kutipan Sultan memperkuat narasi bahwa meskipun ada perbedaan pendapat di masyarakat, keistimewaan DIY adalah hal yang telah diakui negara. Kritik terhadapnya harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu sejarah dan konstitusi.
	Pernyataan	Pernyataan Sultan dalam berita bukan hanya menjelaskan tetapi juga menegaskan bahwa kritik Ade Armando tidak berdasar pada konstitusi atau sejarah. Sultan secara halus mengarahkan opini publik bahwa keistimewaan DIY adalah hak yang diatur dan dihormati oleh negara, sementara kritik terhadapnya harus didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya persepsi pribadi.
	Penutup	Penutup mengaitkan kritik Ade dengan salah satu pembuat UU Keistimewaan Yogyakarta, Ganjar Pranowo, yang saat itu maju sebagai calon presiden.
Skrip	*What*	Sri Sultan HB X menanggapi kritik Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikkan politik dinasti. Sultan membantah dengan dasar hukum dan sejarah keistimewaan DIY.

	Who	Sri Sultan HB X
	Where	Tanggapan Sultan disampaikan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
	When	Minggu, 3 Desember 2023
	Why	Kritik Ade muncul karena sistem pengisian jabatan di DIY dianggap sebagai politik dinasti. Sultan merespons untuk membela keistimewaan DIY berdasarkan hukum dan sejarah.
	How	Ade mengkritik melalui video di media sosial, menyoroti aksi mahasiswa yang mengkritik politik dinasti. Sultan membantah kritik tersebut dengan mengacu pada konstitusi dan tradisi DIY.
Tematik	Paragraf	Paragraf pertama menyajikan tanggapan Sultan HB X yang mengakui kebebasan berkomentar tetapi membantah kritik Ade dengan dasar konstitusional. Paragraf berikutnya memuat kutipan Sultan dan detail UUD 1945 serta UU No. 13 Tahun 2012 untuk memperkuat legitimasi DIY. Sementara paragraf terakhir mengaitkan kritik Ade dengan isu politik nasional, menempatkan komentarnya dalam konteks yang lebih luas.
	Kalimat	Kalimat-kalimat dalam berita digunakan untuk memberikan argumen berbasis fakta

		dan menyeimbangkan persepsi masyarakat dengan fakta hukum.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar kalimat menciptakan narasi logis yang mendukung pembelaan terhadap DIY sembari menunjukkan bahwa kritik Ade tidak berdasar secara hukum.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Berita tidak menggunakan bahasa yang bersifat menyerang atau menyudutkan. Kutipan dan pernyataan dari Sultan cenderung mengajak pembaca untuk memahami masalah ini dari perspektif yang lebih luas.

5. Judul Berita: *"Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum"* (3 Desember 2023)

Gambar 3.5 Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto

Tabel 3.5 Framing Berita *"Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum"*

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X &

		Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum”
	Lead	Lead berita menyebutkan Eko Suwanto selaku Ketua Komisi A DPRD DIY dari PDI Perjuangan yang menilai pernyataan Ade Armando sebagai sesuatu yang menyesatkan.
	Latar Informasi	Latar informasi mencakup sejarah hukum dan konstitusionalitas UU Keistimewaan Yogyakarta. Berita menguraikan UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, serta merujuk pada pasal 18B UUD 1945 yang mengakui kekhususan daerah tertentu.
	Kutipan	Kutipan langsung dari Eko Suwanto banyak digunakan untuk memperkuat posisi argumen bahwa klaim Ade Armando tidak berdasar. Kutipan-kutipan tersebut dipilih untuk memperlihatkan bahwa Eko berbicara atas dasar konstitusi, UU Keistimewaan, dan nilai historis, bukan sekadar opini kosong.
	Pernyataan	Pernyataan dalam berita ini didominasi oleh argumen pembelaan atas keistimewaan DIY. Eko Suwanto secara tegas menyatakan bahwa keistimewaan DIY sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta sah secara hukum. Pernyataan tersebut diperkuat oleh fakta sejarah, seperti

		keberadaan UU 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kontribusi monarki lokal (Keraton Yogyakarta dan Paku Alaman) dalam masa-masa sulit awal berdirinya NKRI.
	Penutup	Bagian penutup berita menegaskan kembali dukungan terhadap keistimewaan Yogyakarta. Eko Suwanto menekankan masyarakat tetap teguh mendukung UU Keistimewaan Yogyakarta dan penetapan Sultan HB X serta Pakualam X.
Skrip	*What*	Eko Suwanto selaku Ketua Komisi A DPRD DIY dari PDI Perjuangan memberikan bantahan tegas atas pernyataan Ade Armando yang menyebut penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY merupakan bentuk dinasti yang tidak sesuai konstitusi.
	Who	Eko Suwanto
	Where	Yogyakarta
	When	Minggu, 3 Desember 2023
	Why	Pernyataan Ade Armando dipandang menyesatkan dan melukai hati rakyat Yogyakarta karena dianggap meremehkan dasar historis serta legitimasi hukum yang melandasi keistimewaan Yogyakarta.

		Menurut Eko Suwanto, Ade Armando tidak memahami konteks konstitusional, historis, dan kultural yang menjadikan UU Keistimewaan Yogyakarta sah.
	How	Setelah Ade Armando mengeluarkan pernyataan kontroversialnya, Eko Suwanto langsung merespons dengan argumentasi berbasis konstitusi, sejarah, serta peran historis Keraton Yogyakarta dan Pakualaman dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI. Penjelasan ini bertujuan untuk menguatkan pandangan bahwa penetapan Sultan HB X dan Pakualam X bukanlah dinasti politik melainkan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap keistimewaan Yogyakarta.
Tematik	Paragraf	Berita ini disusun dengan alur paragraf yang dimulai dari permasalahan pokok, yaitu pernyataan kontroversial Ade Armando, kemudian mengalir menuju respon dan argumen yang dibangun oleh Eko Suwanto.
	Kalimat	Kalimat-kalimat awal memaparkan secara lugas tudingan Ade Armando, sementara kalimat selanjutnya membantahnya dengan rujukan pada UU Keistimewaan Yogyakarta dan Pasal 18B UUD 1945.
	Hubungan antar kalimat	Kalimat pertama yang mengutip pernyataan Ade Armando diikuti oleh kalimat lain yang

		membantah pernyataan tersebut dengan menyebut dasar hukum dan historis untuk menunjukkan ketidaktepatan tuduhan. Setiap kalimat tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung untuk membentuk alur argumentasi yang kuat
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat beberapa kata yang menandai penolakan terhadap pandangan Ade Armando, diantaranya adalah "menyesatkan," "melecehkan," dan "melukai hati rakyat." Kata-kata tersebut menunjukkan kuatnya reaksi emosional dan moral terhadap komentar yang dianggap meremehkan identitas dan legitimasi Yogyakarta.

6. Judul Berita: *"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif"* (4 Desember 2023)

Gambar 3.6 Foto Ade Armando

Tabel 3.6 Framing Berita *"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif*

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	*Headline*	"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif"
	Lead	Berita dimulai dengan menyajikan pendapat pakar politik Universitas Gadjah Mada, Arya Budi, yang menilai bahwa kritik Ade Armando terhadap sistem politik DIY sebagai bagian dari strategi defensif untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.
	Latar Informasi	Berita ini memberikan latar informasi yang cukup lengkap mengenai sistem pemerintahan di DIY, termasuk penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur bahwa jabatan Gubernur DIY dipegang oleh Sultan Keraton Yogyakarta dan Wakil Gubernur oleh Adipati Kadipaten Pakualaman.
	Kutipan	Kutipan dari Arya Budi dan Sultan HB X digunakan untuk membangun narasi berita yang memperkuat legitimasi sistem pemerintahan DIY.
	Pernyataan	Pernyataan dalam berita cenderung memberikan ruang lebih besar kepada pandangan Arya Budi dan Sultan untuk

		menjelaskan bahwa sistem DIY bukanlah politik dinasti dalam pengertian negatif, melainkan bentuk penghormatan terhadap budaya lokal yang sudah ditetapkan oleh UU.
	Penutup	Penutup berita menampilkan pernyataan Sultan HB X yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan DIY berjalan sesuai dengan aturan hukum, jika ingin diubah, harus melalui mekanisme yang sesuai. Sultan juga menyatakan bahwa persepsi tentang apakah sistem ini adalah dinasti atau bukan tergantung dari cara masyarakat memandangnya.
Skrip	*What*	Arya Budi selaku pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pernyataan Ade yang menyinggung soal dinasti politik di DIY adalah argumen defensif.
	Who	Arya Budi
	Where	Yogyakarta
	When	Senin, 4 Desember 2023
	Why	Arya Budi mengomentari pernyataan Ade Armando karena ia merasa perlu memberikan klarifikasi terhadap kritik Ade yang menyebutkan adanya politik dinasti di DIY. Sebagai pakar politik yang memahami konteks sosial dan hukum Yogyakarta,

		Arya ingin menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di DIY yang telah diatur melalui Undang-Undang Keistimewaan mendapat dukungan kuat baik dari masyarakat.
	How	Polemik ini berkembang melalui kritik Ade Armando yang memantik reaksi dari berbagai pihak, termasuk Arya selaku pakar politik. Ia memberikan analisis bahwa kritik tersebut lebih bernuansa politis daripada substansial.
Tematik	Paragraf	Berita ini disusun dalam paragraf-paragraf yang saling melengkapi, dimulai dari Arya Budi yang didukung riset akademis, hingga tanggapan Sri Sultan HB X yang menegaskan keabsahan sistem dinasti DIY berdasarkan hukum.
	Kalimat	Setiap kalimat dalam berita ini berfungsi untuk mengemukakan pernyataan atau pendapat tokoh yang terlibat, serta memberikan informasi tambahan yang relevan. Kalimat-kalimat dalam berita secara umum menjelaskan bagaimana Arya Budi menanggapi kritik Ade Armando dengan memanfaatkan riset dan pengalamannya.
	Hubungan antar kalimat	Setiap kalimat mendukung atau menjelaskan pendapat sebelumnya, seperti

		bagaimana Arya menggunakan riset akademis (paragraf 6) untuk memperkuat argumennya tentang pernyataan Ade Armando (paragraf 2).
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Berita lebih menonjolkan tanggapan dari Arya Budi, namun foto yang ditampilkan adalah foto Ade Armando yang tidak merepresentasikan isi berita.

7. Judul Berita: *"Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya"* (5 Desember 2023)

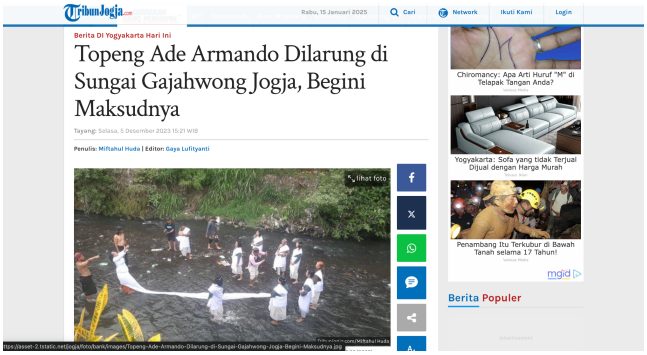

Gambar 3.7 Aksi Larung Sukerta oleh warga Kota Yogyakarta

Tabel 3.7 Framing Berita *"Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya*

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya"
	Lead	Lead memperkenalkan aksi Larung Sukerta yang digelar warga Yogyakarta untuk melawan pernyataan Ade Armando.

		Lead langsung mengarahkan pembaca pada inti konflik, yaitu kritik Ade dan reaksi budaya dari masyarakat.
	Latar Informasi	Berita menyajikan informasi rinci tentang proses Larung Sukerta, mulai dari ritual budaya seperti dupa, rapalan, hingga simbolisasi Ade Armando melalui topeng.
	Kutipan	Kutipan dalam berita digunakan untuk menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sebagai pesan moral kepada masyarakat dan pihak terkait untuk mengambil langkah lebih lanjut.
	Pernyataan	Penggunaan pernyataan langsung dari tokoh seperti Pedro selaku koordinator aksi memberikan legitimasi pada aksi yang dilakukan, sehingga membangun narasi yang mendukung pesan keseluruhan berita.
	Penutup	Penutup menyampaikan harapan dari koordinator aksi agar Ade meminta maaf secara langsung kepada warga Yogyakarta dan Sultan HB X.
Skrip	*What*	Warga Yogyakarta menggelar Larung Sukerta sebagai respons simbolik terhadap kritik Ade Armando yang menyebut DIY sebagai simbol politik dinasti.

	Who	Beberapa warga Yogyakarta.
	Where	Aksi dilakukan di Sungai Gajahwong, Kota Yogyakarta.
	When	Selasa, 5 Desember 2023
	Why	Kritik Ade Armando dianggap mencederai nilai budaya, konstitusi, dan sejarah DIY, sehingga warga merespons dengan aksi simbolik Larung Sukerta.
	How	Aksi diawali dengan ritual budaya seperti dupa, rapalan doa, dan simbolisasi sosok Ade Armando dengan topeng. Ritual ini berakhir dengan tabur bunga dan doa bersama.
Tematik	Paragraf	Paragraf-paragraf awal berfokus pada deskripsi aksi Larung Sukerta sebagai respons terhadap kritik Ade Armando. Selanjutnya, narasi berkembang dengan menggambarkan proses ritual, makna simbolik, hingga harapan warga agar kritik tersebut menjadi pembelajaran.
	Kalimat	Kalimat-kalimat dalam berita memperlihatkan Larung Sukerta sebagai bentuk perlawanan damai yang mengedepankan elemen budaya dan moral.
	Hubungan	Hubungan antar kalimat dalam berita ini disusun untuk menunjukkan kaitan yang

	antar kalimat	jelas antara kritik Ade Armando dan reaksi warga Yogyakarta melalui aksi Larung Sukerta. Kalimat-kalimatnya saling mendukung, mulai dari menggambarkan kritik, menjelaskan aksi budaya sebagai respons, hingga menegaskan makna simbolisnya.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat kata seperti "kedunguan hati" yang ditujukan kepada Ade Armando. Ungkapan ini tidak hanya menunjukkan penolakan warga terhadap kritik Ade, tetapi mengandung konotasi yang menekankan bahwa pandangan Ade dianggap tidak masuk akal dan sangat dangkal.

8. Judul Berita: *"PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X"* (8 Desember 2024)

Gambar 3.8 Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X

Tabel 3.8 Framing Berita *"PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X"*

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**

Sintaksis	*Headline*	"PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X"
	Lead	Lead berita diawali dengan penegasan bantahan dari Sultan HB X tentang adanya permintaan maaf dari PSI. Kalimat "Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tegas membantah…" (paragraf 1) menekankan adanya perbedaan persepsi antara klaim PSI dan fakta yang diungkapkan Sultan.
	Latar Informasi	Latar informasi menjelaskan momen pertemuan antara Sekjen PSI yaitu Raja Juli Antoni dengan Sultan. Gestur mencium tangan Sultan yang dilakukan Raja Juli Antoni pada pertemuan tersebut ditafsirkan PSI sebagai bentuk permintaan maaf, meski Sultan sendiri menampik adanya pembicaraan khusus terkait Ade Armando.
	Kutipan	Kutipan digunakan untuk menunjukan dua sudut pandang yang saling bersebrangan. Kutipan dari Sultan memberi penekanan bahwa Sultan tidak merasa menerima permintaan maaf secara resmi. Sementara pihak PSI dikutip untuk menegaskan bahwa PSI mengklaim telah menyinggung 'kasus' Ade Armando dalam pertemuan.
	Pernyataan	Pernyataan Raja Juli Antoni dan Ketua

		DPW PSI DIY membangun kesan bahwa PSI menganggap konflik sudah "dicairkan." Namun, kalimat-kalimat Sultan menunjukkan bahwa ia tidak mengkonfirmasi adanya permintaan maaf resmi. Pernyataan PSI juga menggarisbawahi imbauan menjaga keteduhan di tahun politik yang menunjukan keinginan agar polemik ini tidak meluas.
	Penutup	Bagian penutup berita menekankan imbauan untuk menjaga keteduhan dan kenyamanan di tengah suasana tahun politik. Namun masih terdapat ambiguitas, yaitu perbedaan penafsiran antara Sultan dan PSI soal benar-tidaknya permintaan maaf disampaikan.
Skrip	*What*	Terjadi perbedaan klaim antara PSI dan Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai adanya permintaan maaf terkait pernyataan kontroversial Ade Armando. PSI menyatakan sudah meminta maaf secara langsung, sedangkan Sultan membantah adanya pembicaraan khusus tentang permintaan maaf tersebut.
	Who	Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY dan Raja Juli Antoni selaku Sekjen PSI

	Where	Kompleks Kepatihan
	When	Jumat, 8 Desember 2023
	Why	PSI mengklaim sudah menyampaikan permintaan maaf melalui Sekjennya yaitu Raja Juli Antoni. Namun Sultan HB X membantah bahwa ada pembicaraan khusus tentang permintaan maaf tersebut. Perbedaan klaim inilah yang kemudian memicu sorotan media.
	How	Setelah pertemuan singkat antara Raja Juli Antoni dan Sultan, beredar keterangan tertulis dari PSI yang menyatakan bahwa permintaan maaf sempat disampaikan secara tersirat. Namun, Sultan menegaskan bahwa ia tidak menyadari pertemuan tersebut sebagai pertemuan PSI dan tidak ada pembahasan khusus soal Ade Armando. Kontradiksi antara pernyataan PSI dalam keterangan tertulis dan bantahan Sultan menciptakan perbedaan versi mengenai apakah permintaan maaf benar-benar disampaikan atau tidak.
Tematik	Paragraf	Paragraf dimulai dengan memperkenalkan topik utama, yakni tanggapan Sultan terhadap klaim PSI. Paragraf-paragraf selanjutnya menjelaskan detail pertemuan singkat Raja Juli Antoni dengan Sultan,

		kemudian dilanjutkan keterangan tertulis dari PSI yang mengklaim bahwa permintaan maaf sudah disampaikan secara tersirat, serta bagaimana mereka menilai tanggapan Sultan.
	Kalimat	Berita ini menggunakan pernyataan langsung dan kalimat naratif untuk membingkai perbedaan versi antara Sultan dan PSI. Kalimat seperti "Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tegas membantah…" (paragraf 1) menegaskan bantahan Sultan. Sementara kalimat deklaratif seperti "Dalam keterangan tertulis tersebut, PSI menyatakan…" (paragraf 8) memperlihatkan isi klaim PSI sekaligus menjadi kontras dengan bantahan Sultan.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar kalimat dalam berita membentuk sebuah kronologi yang menunjukan perbedaan versi antara Sultan dan PSI.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Berita ini bertumpu pada diksi yang menonjolkan perbedaan versi antara PSI dan Sultan HB X. Tidak ada penggunaan idiom kiasan yang kuat, sehingga penekanan tetap pada fakta dan kutipan langsung.

B. Analisis Framing Pada Berita *Harianjogja.com*

1. Judul Berita: *"Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando"* (3 Desember 2023)

Gambar 3.9 Foto Ade Armando

Tabel 3.9 Framing Berita *"Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando"*

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	*Headline*	"Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando"
	Lead	Lead berita dimulai dengan menyebutkan bahwa sebuah poster menyerukan penangkapan Ade Armando beredar di media sosial. Informasi awal ini memberikan konteks konflik yang sedang berlangsung serta mengidentifikasi siapa yang terlibat, yaitu politisi PSI, Ade Armando, dan kelompok masyarakat Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman).
	Latar	Latar informasi dalam berita menjelaskan

	Informasi	asal-usul poster yang menyerukan penangkapan Ade Armando yang dihasilkan dan disebarkan oleh Paman Usman pada tanggal 3 Desember 2023.
	Kutipan	Berita menyertakan kutipan langsung dari dua tokoh, yaitu Ade Armando dan Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY. Ade Armando menyatakan bahwa ia melihat ironi pada aksi demo karena menurutnya demonstran menjalankan aksi di daerah yang jelas-jelas mempraktikan politik dinasti (Yogyakarta). Sebaliknya, kutipan dari Huda Tri Yudiana menunjukan kekecewaan dan kemarahan atas pernyataan Ade, serta menyerukan agar ia meminta maaf dan "belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI."
	Pernyataan	Pernyataan dari Huda Tri Yudiana menegaskan bahwa selama hampir 10 tahun bekerja di DPRD DIY, ia melihat sikap demokratis dan egaliter dari *Ngarsa Dalem*. Dengan pernyataan tersebut, berita mengarahkan pembaca untuk menolak klaim yang mengaitkan keistimewaan Yogyakarta dengan praktik dinasti.
	Penutup	Penutup berita kembali menguatkan pesan utama melalui pernyataan Huda yang menuntut permintaan maaf dari Ade Armando. Dengan menyatakan bahwa

		kepemimpinan *Ngarsa Dalem* adalah kehendak rakyat dan sudah dilegalkan, berita menutup narasi dengan penekanan pada keabsahan sistem yang ada.
Skrip	*What*	Sebuah poster yang beredar di media sosial menyerukan agar politisi PSI, Ade Armando, ditangkap. Poster tersebut menuntut agar Ade Armando dihukum karena komentarnya mengenai politik dinasti di Yogyakarta.
	Who	Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman)
	Where	Poster disebarluaskan melalui media sosial
	When	Minggu, 3 Desember 2023
	Why	Poster yang berisi undangan untuk mendatangi kantor PSI DIY ini muncul karena pernyataan Ade Armando mengenai politik dinasti di Yogyakarta yang dianggap menistakan sejarah perjuangan dan keistimewaan daerah tersebut. Pernyataan Ade dianggap tidak menghargai kontribusi sejarah Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan kedaulatan.
	How	-
Tematik	Paragraf	Paragraf pertama langsung memperkenalkan isu utama, yaitu beredarnya poster di media sosial yang menyerukan penangkapan Ade

		Armando. Paragraf berikutnya mengembangkan informasi tentang rencana aksi unjuk rasa, menjelaskan titik kumpul dan rute yang akan ditempuh oleh massa aksi. Selanjutnya, berita beralih ke penyampaian latar belakang peristiwa, dengan menjelaskan alasan kekecewaan terhadap pernyataan Ade Armando. Kemudian berita menampilkan kutipan langsung dari Ade Armando untuk memberikan ruang pandangnya, sebelum beralih ke respons yang lebih tegas dari Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY.
	Kalimat	Setiap kalimat membangun narasi secara berurutan sehingga pembaca dapat mengikuti alur waktu dan tempat dengan mudah.
	Hubungan antar kalimat	Kalimat yang menyatakan bahwa Ade mengomentari aksi demo mahasiswa dan menyebutnya ironis (paragraf 6) kemudian langsung diikuti dengan kutipan langsung dari Ade, sehingga hubungan antara opini yang disampaikan dan pernyataan sumber menjadi jelas. Selanjutnya, berita memasukkan tanggapan Huda Tri Yudiana yang memberikan perspektif berbeda mengenai masalah ini. Kutipan dari Huda menghubungkan pernyataan pribadi dan pengalaman selama 10 tahun di DPRD DIY dengan penolakan terhadap komentar Ade, sehingga menciptakan narasi yang mendukung legitimasi sistem keistimewaan

		DIY.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Dalam berita tidak ditemukan kata atau idiom yang memiliki makna tertentu. Namun ada kekurangan di bagian foto *headline* karena foto tersebut tidak merepresentasikan isi dari berita. Alih-alih menampilkan poster yang beredar di media sosial atau foto perwakilan masa yang akan melakukan aksi, berita hanya menampilkan foto Ade Armando saat diwawancara. Padahal dalam berita tidak ditampilkan kutipan hasil wawancara dengan Ade Armando.

2. Judul Berita: *"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY"* (4 Desember 2023)

Gambar 3.10 Aksi oleh Paman Usman di Depan Kantor DPW PSI DIY

Tabel 3.10 Framing Berita *"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY"*

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua

		Baliho PSI di DIY”
	Lead	Aksi menggeruduk Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilakukan oleh Paman Usman.
	Latar Informasi	Disebutkan dalam berita pernyataan Ade Armando yang menjadi pemicu aksi, yaitu kritiknya terhadap sistem kepemimpinan DIY. Informasi ini membingkai aksi sebagai reaksi terhadap penghinaan simbolik terhadap sejarah dan keistimewaan DIY.
	Kutipan	Kutipan dalam berita berasal dari Widihasto Wasana Putra sebagai Koordinator Paman Usman dan Ari Hidayat Wakil Sekretaris DPW PSI DIY. Kutipan dari pihak Paman Usman cenderung lebih mendominasi dibandingkan dengan pihak PSI DIY.
	Pernyataan	Setiap pernyataan yang ditulis selalu diperkuat dengan kutipan langsung dari narasumber.
	Penutup	Penutup berita berisi pandangan Kus Indarto selaku kader PSI Kota Yogyakarta yang merespons ancaman pencopotan atribut PSI di Yogyakarta dengan merujuk pada aspek legal, seperti aturan pencopotan alat peraga kampanye (APK). Hal ini memberikan kesan bahwa konflik ini dapat dikelola dalam kerangka hukum, namun

		mengindikasikan bahwa konflik belum sepenuhnya selesai.
Skrip	*What*	Puluhan warga Yogyakarta yang menamai dirinya Paman Usman melakukan aksi dengan menggeruduk Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
	Who	Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman)
	Where	Kantor DPW PSI DIY
	When	Senin, 4 Desember 2023
	Why	Aksi yang dilakukan Paman Usman merupakan respon dari pernyataan Ade Armando, salah satu politisi PSI yang menyebut adanya praktik dinasti politik di Yogyakarta lantaran kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang turun temurun serta tanpa melewati proses pemilu.
	How	Protes dilakukan dengan simbol budaya khas Yogyakarta, seperti pakaian adat, andong, dan pasukan bregada, untuk menunjukkan identitas kultural masyarakat Yogyakarta. Warga menyampaikan tuntutan secara langsung ke DPW PSI DIY. PSI DIY merespons dengan menyatakan bahwa aspirasi warga akan disampaikan ke

		DPP PSI untuk diputuskan lebih lanjut. Sementara itu, ancaman warga terhadap atribut PSI di Yogyakarta menambah tekanan untuk penyelesaian segera atas polemik ini.
Tematik	Paragraf	Paragraf awal membahas aksi protes oleh Paman Usman di Kantor DPW PSI DIY. Kemudian paragraf tengah menguraikan penyebab protes, yaitu pernyataan Ade Armando yang dianggap menghina keistimewaan DIY. Pada bagian akhir, paragraf berfokus pada respons PSI DIY terhadap tuntutan warga dan ancaman terkait pencopotan atribut PSI.
	Kalimat	Kalimat yang menyatakan bahwa "Ade Armando telah melakukan kekerasan verbal (paragraf 3)" menunjukan bahwa kritik tersebut bukan hanya sekedar pendapat pribadi, tetapi juga merupakan sebuah serangan terhadap identitas masyarakat Yogyakarta.
	Hubungan antar kalimat	Setelah menyebutkan aksi warga, berita menjelaskan penyebab utama dari aksi tersebut, yaitu pernyataan Ade yang dianggap menghina keistimewaan DIY. Penjelasan terkait ancaman pencopotan baliho PSI diikuti oleh tanggapan kader PSI tentang aturan hukum pemasangan alat peraga kampanye, sehingga hal ini

		menciptakan kesinambungan logis dalam pembahasan konflik.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat frasa seperti "bersihkan simbol PSI (paragraf 7)" yang tidak hanya berarti pencopotan baliho, tetapi juga menandakan penolakan total terhadap keberadaan PSI di wilayah Jogja.

3. Judul Berita: *"Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY"* (4 Desember 2023)

Gambar 3.11 Ade Armando

Tabel 3.11 Framing Berita *"Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY"*

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	*Headline*	"Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respon PSI DIY"
	Lead	Lead berita memfokuskan perhatian pada reaksi masyarakat terhadap pernyataan Ade Armando yang memicu polemik di Yogyakarta. Fokus utama lead adalah pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh

		pernyataan tersebut.
	Latar Informasi	Awal mula penyebab kontroversi adalah kritik Ade Armando terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa di Yogyakarta terkait Gibran Rakabuming. Pernyataan Ade yang menyebut Yogyakarta sebagai wilayah politik dinasti memicu respons negatif dari masyarakat.
	Kutipan	Berita menonjolkan kutipan dari Kamaruddin selaku Ketua PSI DIY. Kutipan ini membingkai PSI sebagai pihak yang menghormati keistimewaan DIY dan responsif terhadap protes masyarakat.
	Pernyataan	Pernyataan dalam berita mempertegas posisi PSI DIY sebagai pembela keistimewaan Yogyakarta. Pernyataan yang ditulis bertujuan untuk memperlihatkan PSI sebagai partai yang selaras dengan nilai-nilai lokal Yogyakarta dan menegaskan pernyataan Ade Armando hanya sebagai pandangan individu.
	Penutup	Pada bagian penutup berita, PSI DIY menutup polemik dengan menjelaskan posisi Ade Armando sebagai individu dan bukan representasi partai.
Skrip	*What*	Ade Armando mengkritik sistem penetapan Gubernur DIY yang dianggap sebagai praktik politik dinasti. Kritik tersebut

		kemudian menuai protes keras dari masyarakat Yogyakarta, termasuk kelompok Paman Usman. PSI DIY memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut adalah pendapat pribadi Ade Armando, bukan sikap resmi partai.
	Who	PSI DIY
	Where	Kantor PSI DIY di Yogyakarta
	When	Senin, 4 Desember 2023
	Why	PSI DIY merasa perlu memberikan klarifikasi untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat Yogyakarta dan membedakan sikap partai dari pandangan pribadi Ade Armando.
	How	Ade menyebut bahwa Yogyakarta adalah wilayah yang menjalankan politik dinasti. Pernyataan ini menjadi viral dan memicu kemarahan masyarakat Yogyakarta. Akibatnya, kelompok masyarakat Paman Usman berencana menggelar aksi protes ke kantor PSI DIY untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Ade Armando.
Tematik	Paragraf	Paragraf awal menjelaskan konflik utama, kemudian paragraf erikutnya beralih ke klarifikasi PSI DIY yang menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah pendapat

		pribadi Ade, bukan sikap resmi partai. Paragraf-paragraf selanjutnya memperkuat legitimasi keistimewaan Yogyakarta dengan rujukan pada sejarah perjuangan dan dasar hukum seperti UU No. 13/2012.
	Kalimat	Terdapat pengulangan kalimat seperti *"pernyataan tersebut adalah pandangan pribadi"* (paragraf 6 dan 8) yang mempertegas usaha PSI untuk memisahkan pandangan individu Ade Armando dari sikap resmi partai.
	Hubungan antar kalimat	Kalimat-kalimat dalam berita membentuk hubungan sebab-akibat. Misalnya, setelah memaparkan reaksi masyarakat terhadap pernyataan Ade Armando (paragraf 1), berita langsung menyampaikan klarifikasi PSI untuk meredakan konflik (paragraf 4).
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat beberapa kata seperti "gerah," "melecehkan," dan "melukai hati rakyat" yang digunakan untuk menggambarkan dampak emosional dari pernyataan Ade Armando terhadap masyarakat Yogyakarta.

4. Judul Berita: "*Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI"* (7 Desember 2023)

Gambar 3.12 Ketua PSI Kaesang Pangarep

Tabel 3.12 Framing Berita "*Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI"
	Lead	Lead berita menyampaikan konteks utama bahwa nama Ade Armando telah menjadi perbincangan di kalangan warganet karena pernyataannya soal politik dinasti di Yogyakarta.
	Latar Informasi	Berita memberikan penjelasan bagaimana PSI sangat menghormati aturan konstitusi terkait keistimewaan Yogyakarta dan bersikap tegas terhadap anggota yang tidak menghargai aturan konstitusi tersebut.
	Kutipan	Kutipan disampaikan oleh dua narasumber utama, yaitu Kaesang selaku Ketua Umum

		PSI dan Grace Natalie selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI.
	Pernyataan	Seluruh pernyataan dari Kaesang dan Grace Natalie mengarah pada pemahaman bahwa pernyataan Ade Armando merupakan opini pribadi yang tidak mewakili PSI dan sudah ada tindakan internal untuk menegakkan kedisiplinan anggota partai.
	Penutup	Bagian penutup berisi penekanan bahwa meskipun Ade Armando telah membuat video permintaan maaf, pimpinan PSI telah bersikap tegas melalui teguran keras yang diberikan.
Skrip	*What*	Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mempersilahkan Ade Armando untuk keluar bila tidak bisa memahami aturan konstitusi terkait dengan keistimewaan Yogyakarta.
	Who	Kaesang Pangarep
	Where	Tanggapan dari Kaesang disampaikan di Surabaya, Jawa Timur
	When	Rabu, 6 Desember 2023
	Why	Ade Armando menyampaikan kritik mengenai politik dinasti di Yogyakarta yang dianggap menyimpang dari aturan konstitusi dan menghina nilai keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta. Kritik tersebut

		dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas dan identitas partai serta nilai sejarah yang harus dihormati, sehingga Kaesang selaku Ketua Umum mengambil tindakan tegas.
	How	Respon terhadap pernyataan Ade Armando dilihat melalui pernyataan resmi oleh Kaesang Pangarep yang mempersilahkan anggota partai yang tidak taat untuk keluar dari PSI. Selain itu, pihak PSI juga memberikan teguran keras secara internal melalui pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natalie. Proses penanganan internal sedang berlangsung dan menunjukkan bahwa partai secara aktif menindak setiap pelanggaran terhadap aturan konstitusi yang telah ditetapkan.
Tematik	Paragraf	Setiap paragraf dalam berita berfungsi untuk menyusun narasi dari pengenalan konflik, penilaian internal partai, hingga klarifikasi resmi dari PSI, sehingga membentuk kerangka framing bahwa ketaatan pada aturan konstitusional adalah prinsip utama yang dijunjung oleh setiap anggota PSI.
	Kalimat	Kalimat-kalimat dalam berita menunjukkan bahwa PSI tidak hanya mengutamakan ketaatan pada aturan konstitusional, tetapi juga bersedia mengambil langkah tegas

		terhadap anggota yang menyimpang dari prinsip tersebut.
	Hubungan antar kalimat	Setelah menyebutkan sikap Kaesang, kalimat selanjutnya dari Grace Natalie memperjelas bahwa pernyataan Ade dianggap sebagai opini pribadi dan telah mendapatkan teguran keras. Hubungan ini memperkuat framing bahwa kritik tersebut tidak mencerminkan pandangan resmi PSI.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Dalam berita tidak ditemukan kata atau idiom yang mengandung makna tertentu.

5. Judul Berita: *"Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf"* (3 Desember 2023)

Gambar 3.13 Ketua DPW Nasdem DIY Subardi

Tabel 3.13 Framing Berita "*Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta

		Maaf”
	Lead	Lead berisi pernyataan Subardi selaku Ketua DPW Nasdem DIY yang menyatakan bahwa tuduhan politik dinasti terhadap DIY tidak tepat.
	Latar Informasi	Berita menjelaskan dasar keistimewaan DIY melalui Pasal 18B UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2012 yang menegaskan pengakuan negara terhadap keistimewaan DIY. Selain itu, diuraikan juga kontribusi Sultan HB IX dalam pembentukan RI, baik dukungan teritori maupun materi.
	Kutipan	Seluruh kutipan hanya berasal dari Subardi selaku Ketua DPW Nasdem DIY. Kutipan yang terdapat dalam berita memperkuat argumen bahwa komentar Ade tidak berdasar dan dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat.
	Pernyataan	Seluruh pernyataan dalam berita menunjukkan posisi Subardi sebagai pembela DIY, sementara Ade ditempatkan sebagai pihak yang tidak memahami konteks historis dan hukum.
	Penutup	Berita ditutup dengan desakan agar Ade meminta maaf dan meralat pernyataannya yang dianggap sebagai tindakan fatal dan meremehkan sejarah DIY.

Skrip	*What*	Subardi selaku Ketua DPW Nasdem DIY menilai pernyataan politisi PSI Ade Armando terkait Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai warisan politik dinasti tidak tepat.
	Who	Subardi selaku Ketua DPW Nasdem DIY.
	Where	Caturtunggal, Sleman
	When	Minggu, 3 Desember 2023
	Why	Pernyataan Ade Armando muncul untuk mengkritik aksi mahasiswa yang menentang politik dinasti. Namun, tudingannya terhadap DIY sebagai contoh politik dinasti memicu reaksi keras karena dianggap mengabaikan sejarah.
	How	Ade Armando menilai Yogyakarta sebagai wilayah dengan politik dinasti berdasarkan sistem kepemimpinan yang turun-temurun tanpa pemilu. Pernyataan ini memicu Subardi untuk menjelaskan bahwa keistimewaan DIY didasarkan pada sejarah perjuangan, pengorbanan Sultan HB IX, serta pengakuan hukum dalam Pasal 18B UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2012. Subardi juga mendesak Ade meminta maaf karena komentarnya dinilai bisa memprovokasi masyarakat DIY.
Tematik	Paragraf	Paragraf awal menekankan konflik utama,

		yaitu tuduhan politik dinasti. Paragraf-paragraf berikutnya memberikan argumen yang membela keistimewaan DIY berdasarkan sejarah, hukum, dan kontribusi Sultan HB IX. Pada bagian penutup ditekankan dampak negatif pernyataan Ade dan seruan agar ia meminta maaf.
	Kalimat	Kalimat seperti "Jogja memiliki peran strategis dalam sejarah kelahiran RI" dan "Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendukung sepenuhnya Indonesia sebagai Republik (paragraf 9)" memberikan konteks historis dan memaparkan fakta penting. Kalimat-kalimat ini digunakan untuk menegaskan keistimewaan DIY bukan hanya berdasarkan tradisi, tetapi juga kontribusi konkret dalam perjuangan kemerdekaan.
	Hubungan antar kalimat	Setelah menyebut Pasal 18B UUD 1945, kalimat berikutnya menjelaskan isinya dan relevansinya terhadap status keistimewaan DIY. Demikian pula setelah menyebut kontribusi Sultan HB IX, kalimat berikutnya menguraikan bagaimana dukungan finansial dan strategis Sultan menjadi fondasi bagi kemerdekaan RI. Hubungan ini menciptakan kesinambungan yang memperkuat argumen pembelaan terhadap DIY.

Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat kata seperti "ahistoris," "berbahaya," dan "fatal". Kata-kata tersebut memiliki konotasi kuat yang memperlihatkan bahwa komentar Ade dianggap meremehkan kontribusi strategis Yogyakarta dalam pembentukan NKRI dan berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.

6. Judul Berita: *"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo"* (6 Desember 2023)

Gambar 3.14 Ade Armando

Tabel 3.14 Framing Berita "*Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo"
	Lead	Lead menyebutkan kritik Ade Armando tentang politik dinasti di DIY yang diikuti dengan respons Ganjar yang menyerukan

		sikap saling menghormati. Ganjar memilih untuk tidak memberikan argumen panjang dan mengarahkan pembaca pada penjelasan Sultan HB X sebagai sumber yang lebih berwenang.
	Latar Informasi	Sultan HB X menegaskan bahwa pengisian jabatan di DIY dilindungi Pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2012. Latar informasi ini diciptakan untuk membantah tuduhan Ade Armando secara konstitusional.
	Kutipan	Terdapat dua kutipan utama yang digunakan dalam berita, yaitu kutipan dari Ganjar dan Sultan HB X. Kutipan Sultan HB X seperti "Itu menghargai asal usul tradisi DIY (paragraf 9)" memperkuat argumen bahwa keistimewaan DIY adalah bentuk penghormatan konstitusi terhadap sejarah, bukan merupakan politik dinasti. Sementara itu, kutipan Ganjar seperti "Kita belajar saja untuk saling menghormati (paragraf 3)" cenderung menunjukkan peran Ganjar sebagai pihak yang netral.
	Pernyataan	Pernyataan dari Ade Armando yang menyebut "sesungguhnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti" menciptakan framing negatif bagi DIY.

		Namun tidak ada pendukung argumen berbasis fakta dalam pernyataan tersebut, sehingga rentan dibantah oleh argumen logis Sultan HB X.
	Penutup	Pada bagian penutup, berita menjelaskan kembali tentang kritik kontroversial Ade Armando, tetapi juga sekaligus menonjolkan pembelaan DIY melalui legitimasi hukum dan sejarah.
Skrip	*What*	Ganjar Pranowo menanggapi kritik Ade Armando terkait politik dinasti DIY dengan mengajak semua pihak saling menghormati.
	Who	Ganjar Pranowo
	Where	Pernyataan Ganjar disampaikan di Kutai Kartanegara
	When	Rabu, 6 Desember 2023
	Why	Kritik Ade Armando terkait politik dinasti di DIY memicu reaksi karena dianggap mengabaikan dasar hukum dan sejarah yang melandasi keistimewaan DIY.
	How	Ade Armando memulai kritik melalui media sosial Twitter. Kemudian Ganjar merespons dengan sikap netral, sementara Sultan HB X memberikan penjelasan mendalam berbasis konstitusi untuk

		membela keistimewaan DIY.
Tematik	Paragraf	Dari total enam belas paragraf dalam berita, hanya empat paragraf awal yang berisi pernyataan dari Ganjar, sementara sisanya lebih banyak mengulas pandangan dari Sultan HB X yang menegaskan bahwa keistimewaan Yogyakarta memiliki landasan hukum dan sejarah yang kuat.
	Kalimat	Terdapat kalimat yang menyebutkan dasar hukum seperti Pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 13 Tahun 2012 (paragraf 9, 10, dan 11). Kalimat-kalimat ini memperkuat narasi bahwa kritik politik dinasti tidak tepat ditujukan untuk DIY.
	Hubungan antar kalimat	Kalimat pernyataan Ganjar digunakan untuk mengurangi eskalasi konflik. Kalimat seperti "Kita belajar saja untuk kita saling menghormati (paragraf 3)" yang dilanjutkan dengan "Saya kira dia sudah minta maaf, ngarsa dalem sudah menjelaskan" menekankan bahwa permasalahan telah selesai secara simbolis melalui permintaan maaf Ade Armando dan penjelasan Sultan HB X.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Dalam berita tidak ditemukan kata, idiom, maupun foto yang memiliki makna tertentu. Namun foto yang ditampilkan

		setelah judul atau yang menjadi cover berita ini kurang sesuai dengan topik utama yang ingin disampaikan dalam berita. Berita lebih berfokus pada tanggapan dari Ganjar Pranowo, namun foto yang ditampilkan adalah foto Ade Armando saat sedang diwawancarai oleh wartawan.

7. Judul Berita: *"Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo"* (5 Desember 2023)

Gambar 3.15 GKR Hemas

Tabel 3.15 Framing Berita "*Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo"
	Lead	Lead menyajikan komentar GKR Hemas yang menyebut Ade "asal bicara" dan "tidak tahu sejarah." Lead ini menegaskan posisi

		DIY sebagai pihak yang sah dalam keistimewaannya berdasarkan sejarah dan hukum.
	Latar Informasi	Dalam berita dijelaskan bahwa keistimewaan DIY dilindungi konstitusi berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui tradisi dan asal-usul pemerintahan DIY. Latar sejarah juga digunakan sebagai landasan untuk membantah tuduhan Ade.
	Kutipan	Kutipan yang berasal dari GKR Hemas cenderung menggunakan bahasa yang frontal, contohnya seperti "*Waton muni, ora ngerti sejarah* (paragraf 2)" dan "*Tapi yo gak popo, cen mulute seperti iku kok mau diapain* (paragraf 4)." Hal ini menunjukkan ketegasan salah satu tokoh DIY dalam membantah pandangan Ade Armando.
	Pernyataan	Pernyataan dalam berita yang berasal dari GKR Hemas dan Sultan HB X membangun otoritas budaya dan otoritas hukum untuk memperkuat pembelaan keistimewaan DIY. Di sisi lain, pernyataan Ade Armando justru mempertegas posisinya sebagai pihak yang kurang memahami konteks isu dan dipersepsikan lemah secara kredibilitas.
	Penutup	Berita ditutup dengan pernyataan Ade yang meminta maaf, tetapi menyebut langkah itu

		mengikuti arahan PSI. Hal ini memberikan penekanan bahwa permintaan maaf Ade dipersepsikan publik sebagai tidak tulus.
Skrip	*What*	Permaisuri Raja Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, GKR Hemas, angkat bicara terkait komentar politikus PSI Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikan politik dinasti karena gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, tetapi melalui penetapan.
	Who	GKR Hemas
	Where	Kompleks Kepatihan, Yogyakarta
	When	Selasa, 5 Desember 2023
	Why	Pernyataan Ade Armando didasarkan pada kritik terhadap sistem keistimewaan DIY yang menurutnya adalah contoh politik dinasti. Kritik ini menyinggung DIY yang memiliki legitimasi historis, hukum, dan budaya, sehingga memicu reaksi keras dari para tokoh DIY, termasuk GKR Hemas.
	How	Ade Armando membuat video pendek yang mengkritik aksi mahasiswa dan menyebut DIY sebagai contoh politik dinasti. Pernyataan ini memicu kritik dari GKR Hemas yang menyebut komentar tersebut “asal bicara” dan menudingnya sebagai

		"pesanan." Sultan HB X menambahkan pembelaan dengan menyebut keistimewaan DIY dilindungi Pasal 18 UUD 1945 sebagai pengakuan atas tradisi dan asal-usul.
Tematik	Paragraf	Pernyataan GKR Hemas hanya diberikan porsi yang dominan dalam empat paragraf awal, sementara sembilan paragraf berikutnya lebih banyak membahas kronologi permintaan maaf yang telah disampaikan oleh Ade Armando.
	Kalimat	Keseluruhan kalimat dalam berita diarahkan untuk memperkuat legitimasi keistimewaan DIY dan mendiskreditkan pandangan Ade sebagai pandangan yang tidak berdasar.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar kalimat memperkuat narasi bahwa keistimewaan DIY memiliki dasar hukum dan historis yang kuat, sementara kritik Ade dinilai sebagai provokatif dan kurang memahami konteks.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat ungkapan seperti "*waton muni*" dari GKR Hemas yang menunjukan bahwa Ade Armando tidak memiliki landasan yang kuat dalam kritiknya. Ungkapan ini juga membangun narasi bahwa pernyataan Ade adalah kritik tanpa dasar yang tidak layak untuk diperdebatkan lebih lanjut.

8. Judul Berita: *"Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan"* (3 Desember 2023)"

Gambar 3.16 Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana

Tabel 3.16 Framing Berita "*Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan"
	Lead	Lead berita memperkenalkan kontroversi Ade Armando yang menyebut politik dinasti terjadi di Yogyakarta untuk mengcounter majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hubungan ini memberikan konteks awal yang mengarahkan pembaca pada isu Pilpres 2024 dan relevansi politik dinasti dalam konflik tersebut.
	Latar Informasi	Ade Armando membingkai Yogyakarta sebagai contoh nyata politik dinasti untuk mendukung argumennya bahwa kritik mahasiswa terhadap Gibran keliru dan tidak konsisten. Latar ini menjadi landasan bagi

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
		pendapat Ade Armando, tetapi di sisi lain memunculkan pertentangan terhadap konsep keistimewaan DIY yang legal secara undang-undang.
	Kutipan	Kutipan Ade Armando membangun kerangka provokatif dengan menyebut DIY sebagai contoh politik dinasti. Kutipan ini dimaksudkan untuk membantah aksi mahasiswa. Sementara itu, kutipan Huda digunakan untuk membela keistimewaan DIY dan menegaskan legalitas serta demokratisnya kepemimpinan DIY.
	Pernyataan	Pernyataan yang terdapat dalam berita selalu dilengkapi dengan kutipan narasumber.
	Penutup	Penutup menekankan kembali ketidaktepatan pernyataan Ade Armando dengan menyebutnya "kebodohan" dan "kedangkalan pemahaman."
Skrip	*What*	Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY turut menanggapi pernyataan Ade Armando yang menyebut adanya praktik politik dinasti di Yogyakarta.
	Who	Huda Tri Yudiana selaku Wakil Ketua DPRD DIY.

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
	Where	Kantor DPRD DIY
	When	Minggu, 3 Desember 2023
	Why	Ade Armando menyindir aksi BEM UI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ia merasa ironis dengan aksi tersebut sebab politik dinasti sesungguhnya, menurut Ade, justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka. Huda Tri Yudiana menanggapi pernyataan tersebut karena merasa komentar Ade melukai masyarakat Yogyakarta.
	How	Konflik ini bermula dari komentar Ade Armando terhadap aksi BEM UI dan UGM yang mengkritik politik dinasti. Ade menyebut mahasiswa keliru dan menuding DIY sebagai contoh politik dinasti. Pernyataan ini memicu tanggapan Huda Tri Yudiana yang membantah dengan menegaskan bahwa keistimewaan DIY adalah hasil perjuangan masyarakat dan legal secara konstitusi, bukan politik dinasti.
Tematik	Paragraf	Seluruh paragraf dalam berita selalu dilengkapi dengan kutipan langsung dari narasumber. Setiap paragraf mendukung kerangka narasi yang berfokus pada

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
		pembelaan keistimewaan DIY, dengan penjelasan bertahap mulai dari konflik awal hingga respon berbasis fakta. Meskipun berita ini pada dasarnya berfokus pada tanggapan dari Huda Tri Yudiana, namun paragraf-paragraf awal berita justru terlebih dahulu mengutip pernyataan dari video kontroversial Ade Armando yang beredar di media sosial.
	Kalimat	Berita memadukan kalimat deskriptif untuk menjelaskan latar belakang konflik, kalimat deklaratif untuk menyampaikan fakta hukum dan sejarah, serta kalimat kutipan dari Huda yang menunjukkan kritiknya terhadap komentar Ade.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar kalimat menciptakan kesinambungan narasi, menjelaskan secara logis mengapa tuduhan Ade Armando keliru dan membangun argumen yang memperkuat pembelaan terhadap DIY.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Berita ini menggunakan beberapa kata yang bersifat merendahkan dan ofensif, seperti “menunjukkan kebodohan,” “kedangkalan pemahaman,” dan “memalukan”.

9. Judul Berita: "*Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja"* (5 Desember 2023)

Gambar 3.17 Spanduk Kecaman Terhadap Ade Armando

Tabel 3.17 Framing Berita "*Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja*"

Elemen	**Unit**	**Strategi Penulisan**
Sintaksis	*Headline*	"Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja"
	Lead	Lead menyampaikan secara langsung bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta, dengan dukungan Satpol PP, telah mencopot alat peraga kampanye yang dikaitkan dengan isu pernyataan Ade Armando. Informasi awal ini menetapkan fokus berita pada pengawasan pelanggaran selama kampanye dan mengaitkannya dengan penggunaan isu untuk *black campaign*.
	Latar Informasi	Berita memberikan rincian proses dan mekanisme penanganan pelanggaran kampanye, termasuk komunikasi Bawaslu

		dengan caleg dan instruksi penyisiran oleh Panwascam. Latar ini juga menyebut bahwa isu yang dipakai (pernyataan Ade Armando) menjadi pendorong bagi pihak tertentu untuk menyebarkan informasi negatif.
	Kutipan	Kutipan dalam berita disampaikan oleh satu narasumber yaitu Andi Kertala selaku ketua Bawaslu Kota Yogyakarta. Kutipan tersebut membingkai tindakan pemasangan spanduk provokatif tentang Ade Armando adalah upaya untuk melakukan *black campaign.*
	Pernyataan	Pernyataan dari Andi Kertala menekankan bahwa pemanfaatan isu Ade Armando tentang politik dinasti Yogyakarta digunakan secara strategis untuk menyerang pihak lawan politik. Pernyataan ini tidak hanya mengkritik penggunaan isu secara negatif, tetapi juga menyiratkan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip proses demokrasi.
	Penutup	Pada bagian penutup, berita menyampaikan bahwa Bawaslu mengutamakan upaya persuasif terlebih dahulu namun siap melakukan tindakan tegas jika pelanggaran berulang.
Skrip	*What*	Bawaslu Kota Yogyakarta menemukan dan

		menindak pelanggaran kampanye yang memanfaatkan isu pernyataan Ade Armando tentang politik dinasti Yogyakarta sebagai alat black campaign.
	Who	Bawaslu Kota Yogyakarta
	Where	Pencopotan spanduk yang bermuatan provokatif dilakukan di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta.
	When	Selasa, 5 Desember 2023
	Why	Pencopotan dilakukan karena spanduk diduga memanfaatkan pernyataan kontroversial Ade Armando mengenai politik dinasti untuk menyerang atau mendiskreditkan partai lain melalui *black campaign.*
	How	Bawaslu menemukan spanduk kampanye yang bermuatan isu negatif seputar pernyataan Ade Armando. Bawaslu kemudian melakukan pencopotan spanduk tersebut karena teridentifikasi adanya upaya menunggangi isu tersebut untuk *black campaign.*
Tematik	Paragraf	Paragraf pembuka langsung menetapkan konteks dengan menyebutkan bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta menemukan pelanggaran dan potensi pelanggaran selama masa kampanye. Paragraf

		selanjutnya berfokus pada penjelasan atas maksud dari pelanggaran tersebut, yakni adanya upaya "menunggangi isu" pernyataan Ade Armando untuk melakukan *black campaign*.
	Kalimat	Setiap kalimat menegaskan bahwa penyalahgunaan isu tentang pernyataan Ade Armando telah memicu reaksi dari aparat. Bawaslu tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mencoba mencegah dampak negatifnya melalui proses persuasif.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar kalimat dalam berita menciptakan alur logis yang menekankan sebab-akibat. Misalnya, kalimat yang menginformasikan pencopotan spanduk bermuatan provokatif (paragraf 1) segera diikuti oleh kalimat yang menjelaskan motif di balik tindakan tersebut (paragraf 2). Hal ini mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa spanduk tersebut tidak sebatas bentuk protes terhadap pernyataan Ade Armando, melainkan merupakan bagian dari strategi politik.
Retoris	Kata, idiom, foto, grafik	Terdapat frasa seperti "menunggangi isu" yang secara retoris mengkritik pihak yang memanfaatkan pernyataan kontroversial Ade Armando untuk keuntungan politik. Selain itu, penggunaan foto pada bagian

		headline sudah sesuai dengan isi berita. Hal ini memberikan gambaran lebih lengkap pada pembaca terkait isi spanduk yang dianggap merupakan pelanggaran kampanye.

C. Hasil Temuan Berita dalam *Tribunjogja.com* tentang Politik Dinasti di Yogyakarta (Periode 1 Desember 2023 - 30 Januari 2024)

Tanggal	Judul Berita
5 Desember 2023	Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Eko Suwanto: UU Keistimewaan Bentuk Kebhinekaan
4 Desember 2023	Sri Sultan HB X Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di DIY
4 Desember 2023	Ade Armando Singgung Politik Dinasti di DIY, Pakar Politik UGM: Itu Argumen Defensif
7 Desember 2023	Buntut Pernyataan soal Politik Dinasti, Ade Armando Ditantang Debat Ilmiah Soal Keistimewaan DIY
5 Desember 2023	Anggota DPR RI Gandung Pardiman Tanggapi Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti Jogja
4 Desember 2023	DPW PSI DIY Sebut Pernyataan Ade Armando soal Politik Dinasti di DIY Tak Mewakili PSI
7 Desember 2023	Apa Masalah Ade Armando hingga Dipolisikan Masyarakat Yogyakarta? Ini Penjelasannya
6 Desember 2023	Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa Laporkan Ade Armando ke Polda DIY Soal Pernyataan Dinasti Politik
3 Desember 2023	Menyesalkan Pernyataan Ade Armando, Politisi Nasdem Subardi Desak Minta Maaf
5 Desember 2023	Topeng Ade Armando Dilarung di Sungai Gajahwong Jogja, Begini Maksudnya
6 Desember 2023	Soal Ade Armando, Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mas Marrel : Jogja Jangan Dibuat Gaduh
6 Desember 2023	Batas Waktu Ambil Sikap Soal Pernyataan Kontroversial Ade Armando, Ini Kata PSI DIY
4 Desember 2023	Massa Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan Minta PSI Pecat Ade Armando
29 Januari 2023	Komisi A DPRD DIY Dukung Polda DIY Cepat Tangani Proses Hukum Pelaporan Terhadap Ade Armando PSI
9 Desember 2023	Memahami Asal-usul Keistimewaan Yogyakarta

Tanggal	Judul Berita
3 Desember 2023	Tanggapi Pernyataan Ade Armando, Wakil Ketua DPRD DIY: Belajar Lagi Demokrasi dan Sejarah NKRI
4 Desember 2023	Ketua DPP PSI Aishah Gray Sampaikan Maaf Kepada Warga Yogyakarta Atas Kegaduhan Ade Armando
3 Desember 2023	Dr Raden Stevanus: Yogya Punya Kontribusi Besar Kemerdekaan RI, Belajar Sejarah Sebelum Komentar
3 Desember 2023	Eko Suwanto: Penetapan Sultan HB X & Pakualam X Sesuai Pancasila, Konstitusi dan Sah Secara Hukum
7 Desember 2023	PSI Klaim Sudah Meminta Maaf secara Langsung, Ini Respon Sultan HB X
7 Desember 2023	Polda DIY Lakukan Penyelidikan Dugaan Ujaran Kebencian oleh Ade Armando

D. Hasil Temuan Berita dalam *Harianjogja.com* tentang Politik Dinasti di Yogyakarta (Periode 1 Desember 2023 - 30 Januari 2024)

Tanggal	Judul Berita
4 Desember 2023	Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY
4 Desember 2023	Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY
7 Desember 2023	Ade Armando Ditantang Debat Ilmiah Soal Keistimewaan DIY
3 Desember 2023	Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan
3 Desember 2023	Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf
5 Desember 2023	Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo
6 Desember 2023	Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo
6 Desember 2023	Ade Armando Dilaporkan ke Polda DIY Terkait Ucapan Politik Dinasti di Jogja
4 Desember 2023	Ade Armando Minta Maaf Soal Komentar Politik Dinasti di Jogja, Netizen Ingin PSI Klarifikasi
7 Desember 2023	Ade Armando Kembali Dilaporkan Polisi, Kali Ini oleh Paman Usman
7 Desember 2023	Sekjen PSI Temui Sultan Jogja Buntut Pernyataan Ade Armando, Begini Hasilnya
3 Desember 2023	Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando
5 Desember 2023	Pakar Hukum Universitas Widya Mataram Sebut Ade Armando Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY
4 Desember 2023	Senggol Jogja, Blunder Ade Armando Bisa Gerus Suara PSI dan Elektabilitas Prabowo
6 Desember 2023	Spanduk Bermuatan Provokatif tentang Ade Armando Dicopot Bawaslu Kota Jogja
4 Desember 2023	Tanggapi Video Ade Armando, DPRD DIY : Rendahkan dan Lukai

Tanggal	Judul Berita
	Rakyat Jogja
8 Desember 2023	Soal Ade Armando, Ketegasan Kaesang Diragukan
29 Januari 2023	Komisi A DPRD DIY Dukung Polda DIY Cepat Tangani Proses Hukum Pelaporan Terhadap Ade Armando
12 Desember 2023	Dianggap Provokatif, Satpol PP Copot Sejumlah Spanduk Terkait Ade Armando
7 Desember 2023	Ribut-Ribut Politik Dinasti di DIY, Kaesang Mempersilakan Ade Armando Keluar dari PSI

E. Transkrip Wawancara

1. Media *Tribunjogja.com*
    a. Identitas Narasumber
        1. Nama Lengkap : Hendy Kurniawan
        2. Jabatan : Manajer Produksi
    b. Pertanyaan Umum
        1. Apa saja tahapan yang dilakukan redaksi dari awal hingga berita siap untuk dipublikasikan? Jawab: Oke kita langsung mengambil contoh misalnya politik dinasti. Ade Armando waktu itu kan ngomong gini kira-kira, "kenapa mahasiswa di Jogja pada demo terkait Jokowi membangun politik dinasti padahal di Jogja sendiri ada," kira-kira seperti itu. Isu ini perlu diklarifikasi ke Sultan, karena sasaran tembaknya Ade Armando adalah Sultan. Umumnya SOP yang aku lakukan pasti gini, aku menugaskan wartawan yang *desk* liputannya di pemerintahan provinsi di DIY. Ada yang *cover* politik pemerintahan kota, politik pemerintahan kabupaten, ini politik pemerintahan tingkat provinsi. Oke aku tugaskan ke wartawan, minta tolong wartawan tanyakan ke Sultan ya bagaimana *statement* Sultan terkait dengan *statement* Ade Armando. Si wartawan itu menjalankan instruksi dengan berusaha menemui Sultan. Misalnya udah dapat nih si wartawan, dapat *statement* Sultan terkait dengan ucapannya Ade Armando soal politik dinasti, ditulislah hasil wawancara itu. Hasil wawancara dari Sultan itu ditulis *plus* pengayaannya ada data-data literatur yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya komentarnya Ade Armando sendiri. Ya kita masukkan di dalam naskah berita-berita untuk memberikan konteks kenapa Sultan ngomong kayak gini, karena konteksnya adalah ada pernyataan di Armando sebelumnya. Misalnya kita oke, naskah itu dikirim hasil nanti masuk ke *basket*, *basket*-nya satu nanti diambil oleh editor online, diambil oleh editor cetak, ada juga yang diambil oleh editor video untuk diproses videonya. Kalau pendalaman wartawan kurang, aku minta buat tambah *statement* dari pihak yang lain. Aku memerintahkan wartawan untuk kembali wawancara kepada pihak lain yang relevan, misalnya akademisi.

Kita mengelaborasi isu tersebut kepada akademisi misalnya tanya apa sih politik dinasti? DIY ini tepatkah dikatakan sebagai politik dinasti? Misalnya begitu pengayaannya.

2. Apakah ada perbedaan proses pengelolaan antara media cetak dan media online? Jawab: Online sifatnya itu lebih ke kecepatan. Jadi misal berita yang pertama terkait tanggapan Sultan, masuk, diedit, ditendang. Ada berita lagi berita pengayaannya, contohnya pakar tentara negara, masuk ke editor online, diolah lagi, tendang lagi, *publish*. Dia jadi dua berita yang terpisah. Nah sedangkan di cetak, karena kita punya waktu panjang untuk mengelaborasi dan mengolah, karena tayangnya kan baru besok nih kalau koran. Cara pengolahannya di cetak menjadi berbeda karena pengolahannya kita bisa meng-*compile* dua berita tersebut, menjahit satu, dua, atau tiga berita menjadi satu artikel yang utuh. Apakah ada perbedaan *angle* antara online dan koran? pasti ada perbedaan *angle*, karena perilaku pembaca online dan perilaku pembaca cetak itu berbeda. Kalau kamu sering ngeliat berita online agak-agak *clickbait,* itu memang strateginya sengaja dibuat *clickbait*. Selama tidak sampai ada *missleading,* karena itu untuk menarik pembaca.
3. Apakah ada standar tertentu untuk menentukan apakah suatu berita layak diterbitkan atau tidak? Jawab: Tidak layak misalnya gini, ada satu kasus katakanlah gini, dugaan korupsi di suatu institusi A misalnya. Ada dugaan korupsi pengadaan mobil. Info awal kan kita dapat itu ya dugaan korupsi beli mobil Kijang harganya 2 juta, tapi di *mark up* jadi 3 juta. Terus kita lakukan pendalaman, kita kumpulkan data-data dokumen, data-data wawancara. Tapi kita perlu konfirmasi nih kepada pemimpin instansi tersebut, karena yang dituding melakukan korupsi atas pengadaan mobil adalah institusi A tersebut. Tapi sampai di jam *deadline* kita belum dapat konfirmasi itu, ya kita harus tunda itu sampai kita dapat konfirmasinya. Kita mengantisipasi bahwa supaya berita ini kita memberikan ruang kepada pihak yang tertuduh untuk memberikan suaranya, entah apapun itu, entah mereka menyangkal atau apapun. Itu yang dinamakan *cover both side* kan

begitu. Kita enggak boleh memberitakan sepihak. Kalau itu belum terpenuhi yaudah di *hold* dulu, kita *completin* dulu.

4. Bagaimana caranya agar berita tersebut menjadi lengkap dan layak untuk diterbitkan? Jawab: Caranya misalnya adalah ditemui enggak bisa, ditelepon mati misalnya atau di-*reject* atau nggak diangkat di WA. Itu sudah memenuhi unsur upaya klarifikasi. Berita itu bisa kita turunkan dengan kita kasih *disclaimer* bahwa kepala institusi A belum bisa dihubungi, belum bisa ditemui untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan mobil di situ. Ya klasifikasinya gini, kita sudah berupaya menghubungi si A tersebut dengan cara ditemui enggak ada, ditelepon masuk tapi enggak diangkat, di WA masuk tapi enggak dibaca. Asumsi kita bahwa dia tahu kita menghubungi dia. Itu layak kita turunkan. Menjadi tidak layak kita turunkan misalnya kita telepon nomornya tidak aktif. Asumsi kita bahwa dia tidak tahu kalau kita menghubungi. Kalau aktif di WA apalagi statusnya *online* gitu kan, oh ya berarti mereka memang menghindar.
5. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan sudut pandang suatu berita agar tetap sesuai dengan prinsip jurnalistik? Jawab: Untuk menentukan sudut pandang pertama kita harus menggali data. Misalnya ada informasi dari Si A, dia belum tentu mau ngasih keterangan, dia cuma ngasih informasi saja. Ya kita gali datanya. Di mana saya bisa mendapatkan data terkait dengan dugaan korupsi tersebut, yang perlu dicari data atau dokumen karena itu bukti *sahih*. Dokumen itu apa, misalnya dokumen pengadaan mobil. Nah setelah dokumen itu dapat, kita pegang semua dokumen-dokumen kelengkapan terkait dengan keadaan, ada kwitansi misalnya, ada *price* list harga si mobilnya. Harga mobil 1000 ternyata dibayar 2000 gitu misalnya. Setelah kita kumpul barulah kita melakukan pedalaman lebih jauh lagi menemui pihak pihak yang terlibat atau diduga terlibat dalam kasus ini.

c. Pertanyaan Khusus

1. Bagaimana media *Tribunjogja.com* menanggapi pernyataan Ade Armando

terkait praktik politik dinasti di Yogyakarta yang disebut tidak demokratis karena tidak melalui pemilihan umum? Jawab: Ini tadi yang aku jelaskan di awal tadi ya. Jadi pasti aku diskusi sama wartawan, minta wartawan untuk menemui sultan, meminta komentar sultan terkait tanggapan Ade Armando. Tanggapan Sultan, terus itu tadi melakukan pedalaman dengan wawancara pakar hukum tatanegara, misalnya aktivis keistimewaan di DIY, apa tanggapan mereka karena di sini dituduh politik dinasti nih. Begitu, pasti gitu. Jadi ya mencari yang berkompeten lah untuk menanggapi isu tersebut.

2. Dalam beberapa berita yang saya analisis, *Tribunjogja.com* menggunakan narasumber yang tidak berdomisili di Yogyakarta, termasuk salah satunya adalah Kaesang. Bagaimana kebijakan redaksi dalam memilih sumber berita, terutama ketika tidak dapat melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan? Jawab: Ini perlu dipahami bahwa komentar Kaesang dan Ade Armando itu tidak berasal dari Tribun Jogja. Karena mereka ada di Jakarta, yang wawancara itu wartawan Jakarta, jadi itu bukan wartawanku, misalnya wartawan Tribun News atau Tribun Jakarta, atau wartawan Kompas yang saudaraan dengan kita, satu grup dengan kita. Kita ngambil berita mereka, kita mengolah berita mereka. Itu yang perlu dipahami. Aku tidak bisa minta wartawan untuk wawancara Kaesang dong, tapi editor *online* melihat isu tersebut, meng-*cover* isu tersebut berdasarkan apa yang dikerjakan oleh temanteman Jakarta. Jakarta garap *statement*-nya Giring misalnya, atau Grace Natalie misalnya, itu diambil lah sama kita untuk diolah. Tetap diolah dulu supaya beda dengan sana. Kita olah, kita bedakan, *angle*-nya walaupun tidak mengubah substansi ya. Jadi gitu caranya. Jadi tidak bisa pure dikatakan ini kebijakan redaksional *Tribunjogja.com* gitu karena kita ngambil data.
3. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan narasumber agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak terkesan berpihak? Jawab: Ya kita pasti cari. Katakanlah DIY pusat pemerintahan nih, *kabeh ono neng kene.* Ketua partai, DPR RI, presiden, dan sebagainya semuanya di sini. Ya pasti

aku akan menginstruksikan wartawan untuk wawancara, "*koe takonke* Kaesang ya sebagai ketua umum PSI terkait komentarnya Ade Armando." Pokonya temui Kaesang, hubungi Kaesang. Minta pendapatnya dia, minta *statement*-nya dia. Begitu caranya pasti begitu.

4. Apakah yang paling utama untuk dimintai pernyataan atau verifikasi terkait suatu isu adalah orang yang memiliki jabatan paling tinggi? Misalkan kalau di PSI adalah Kaesang dan di DIY adalah Sultan. Jawab: Belum tentu juga. Mana pihak yang relevan. Kita tidak bisa ngomong, tapi kita bisa wawancara ke akademisi, kita bisa wawancara ke partai politik lainnya. Tidak perlu harus ketua-ketua begitu. Misalnya meskipun yang mengomentari Ade Armando ini orang PSI, kita bisa minta komentar PDI misalnya. "Eh PDI *piye* komentarmu ini terkait pernyataan Ade Armando yang mengusik pemerintahan Sultan". Apalagi misalnya Ganjar, Ganjar dulu yang menjadi panitia kerja perumusan Undang-Undang Keistimewaan. Jadi dia tahu semangatnya, dia tahu isinya. Jadi kita bisa tanya ke Ganjar. "Pak Ganjar, *koe mbiyen kan melu nyusun Undang-Undange ki, pie komentarmu? jan-jane ki piye?biki bener omongane Ade Armando?".* Jadi luas, spektrumnya luas, yang penting relevan, narasumbernya punya kompetensi dan kapabilitas untuk menjawab persoalan tersebut.
5. Bagaimana kebijakan redaksi dalam pemilihan kata dalam penulisan berita agar tetap sesuai dengan kode etik jurnalistik? Jawab: Tentunya ada batasan-batasan. Batasannya adalah kode etik jurnalistik itu sendiri. Kode etik jurnalistik misalnya, dalam visual enggak boleh ada darah, enggak boleh ada hal mengerikan misalnya luka menganga walaupun enggak ada darah. Kalau dalam tulisan, misalnya dalam bahasa Jawa *misuh* begitu, kalau itu *statement* langsung ya harus ditulis, tapi disensor. Misalnya *asu* ditulis dengan a*u. Itu dalam kutipan langsung ya. Kalau dalam kutipan tidak langsung ya kita jelaskan. Misalnya Nabiel mengumpat ketika pemain melihat PSS ditekel dari belakang. Kalau kita tidak mengutipnya dalam kalimat langsung, ya ditulis dengan cara seperti itu. Itu, kode etiknya

seperti itu. Jadi pemilihan katanya ya semua yang faktual saja, yang menjadi kaya. Yang namanya narasi tulisan menjadi lebih kaya adalah bagaimana kita mengemas narasi tersebut.

6. Terdapat beberapa berita yang menggunakan kutipan langsung dari narasumber dengan cukup dominan. Bagaimana pertimbangan redaksi dalam menentukan porsi kutipan langsung dalam suatu berita agar tidak terkesan memberikan panggung lebih kepada pihak tertentu? Jawab: Jadi ada banyak pertimbangannya, enggak tunggal begitu. Salah satunya misalnya Si A diwawancara tapi *statement*-nya cuma dikit, yaudah mau gimana lagi. Tulisan apa adanya gitu. Diwawancara lagi enggak mau atau keburu pergi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan Si B menjelaskan dengan lebih banyak. Ya kita harus memberikan porsi yang lebih banyak juga gitu. Dia memberikan jauh lebih banyak soalnya. Gitu salah satu pertimbangannya.
7. Apakah hal tersebut mempengaruhi framing dalam berita? Karena terkadang pembaca akan menganggap jika sumber yang diwawancara tidak berimbang berarti media tersebut condong ke salah satu pihak. Jawab: Ya pasti mempengaruhi, karena porsi itu kan secara tidak langsung memperlihatkan keberpihakan, walaupun tidak selalu. Bukan tidak mungkin bahwa framing itu memang diciptakan, bukan tidak mungkin. Kita memberikan porsi yang lebih banyak kepada pihak A karena pihak B dianggap lebih logis dalam memberikan *statement.* Itu sangat mungkin terjadi, karena misalnya pihak B ketika memberikan *statement* tidak logis, *near context, ngawur statement*-nya, enggak mutu. Ya harus kita pilih dong, pasti akan menciptakan framing. Nah itu faktornya. Jadi memang dalam beberapa kasus juga ya meskipun kita tahulah kalau "wah ini bakal dapat framing gini-gini," tapi itu aman secara diberitakan. Yang penting secara kaidah jurnalistiknya terpenuhi. Kita sudah melakukan semua kaidah jurnalistik *plus* tidak ada kode etik yang dihilangkan. Meskipun nanti pembaca menanggapinya gimana-gimana. Karena apalagi framing itu tercipta tidak lepas dari *background* si pembaca itu sendiri.

8. Bagaimana *Tribunjogja.com* memastikan bahwa berita yang diterbitkan tetap memenuhi standar jurnalistik dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu dalam isu-isu sensitif seperti ini? Jawab: Kita pastikan bahwa narasumber yang kita pilih itu berkompeten, relevan dengan isu yang kita angkat. Kita tidak punya intensi untuk menyudutkan salah satu pihak itu dari pemilihan narasumber dan pemilihan *angle*. Nah itu sudah kita tentukan, kita antisipasi supaya tidak ada kepentingan politik yang masuk. Misalnya kepentingan politik ini, ada politisi yang kita tahu *track record*-nya. Contohnya ada politisi dari partai A yang kita tahu *track record*-nya si A ini suka memperkeruh suasana ini, ngasih *statement* mesti kontroversial. Misalnya kita udah wawancara, terus kita dengarkan hasil wawancara tadi, kita bisa nilai kan, "wah ini buruk ini, ini bisa menimbulkan kontroversi yang jauh lebih tajem nih," ya kita harus pilih. Itu cara kita supaya berita ini tidak disusupi dengan kepentingan politik tertentu.

2. Media *Harianjogja.com*
    a. Identitas Narasumber
        1. Nama Lengkap : Anton Wahyu Prihartono
        2. Jabatan : Kepala Redaksi
    b. Pertanyaan Umum
        1. Bagaimana tahapan redaksi dari awal hingga berita siap untuk dipublikasikan? Jawab: Kalau kaitannya dengan proses pembuatan berita itu tidak lepas dari kita harus melihat yang menjadi kebutuhan masyarakat itu apa, yang menjadi kebutuhan pembaca kita itu apa. Misalnya, kalau masyarakat saat ini sedang butuh informasi tentang PPDB, ya pasti kita akan memberikan porsi pemberitaan tentang PPDB yang banyak. Kalau saat ini rame-rame tentang mudik, ya pasti kami akan menyajikan informasi terkait dengan mudik, seperti misalnya tidak hanya infrastruktur jalannya, tidak hanya soal wisatanya, kulinernya, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang dibutuhkan para pemudik ketika mereka kesini. Jadi kita menyesuaikan apa sih yang menjadi sekiranya kebutuhan

dari pembaca kita. Itu harus kita potret, kita harus *profiling*. Tidak bisa ketika misalnya begini, ketika pembaca kita sedang butuh soto, enggak mungkin kita kasih sate, enggak cocok. Artinya kita harus memotret betul apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh pembaca kita, informasi apa sih yang dibutuhkan oleh pembaca tidak hanya cetak, tidak hanya online.

2. Apakah ada standar tertentu untuk menentukan apakah suatu berita layak diterbitkan atau tidak? Jawab: Pasti kita akan punya rambu-rambu, punya aturan main dalam menyeleksi sebuah berita. Saya tadi katakan bahwa media ini memiliki fungsi edukatif, informatif, hiburan dan kontrol sosial. Nah itulah yang menjadi kriteria kami. Kalau tidak memberikan informasi, ya sudah tidak usah dimuat, simpel. Kalau tidak memberikan edukasi ngapain dimuat? Kita cuma buang-buang energi saja. Ada proses-proses seleksi oleh *gatekeeper*. Selain rambu-rambu yang mungkin digariskan oleh undang-undang ataupun di kode etik jurnalistik, misalnya beritanya tidak berimbang, tidak *cover both side,* jangan berharap itu bisa naik. Saya sudah tekankan, saya sudah minta kepada semua rekan redaksi, berita yang tidak berimbang tidak usah dimuat, kalau mau dimuat suruh reporter untuk melengkapi agar berita itu berlimpah. Artinya kita sebagai masyarakat pers, ya kita harus memegang itu, kalau memang itu masih bingung, tidak ada berimbang, tidak usah dimuat, jelas. Itu tidak layak. Artinya berita yang layak adalah berita yang akurat, *balance*, *clear.* Ya itu saja. Jangan sampai menebar fitnah, kabar bohong. Jadi teman-teman pasti akan selalu kita ingatkan, kita *remanding* agar mereka selalu menjalankan fungsi tadi dan tidak menjadi bagian yang kemudian membuat informasi yang bombastis, hiperbola, apalagi ujung-ujungnya *clickbait*. Memang banyak yang mikir seperti itu, tapi kami tidak mau seperti itu. Ya prinsip-prinsip yang ada di kode etik jurnalistik harus kita pegang. Itu saja, enggak usah *neko-neko*, enggak usah macam-macam.
3. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan sudut pandang berita agar tetap sesuai dengan prinsip jurnalistik? Jawab: Sudut pandang yang mungkin kita ambil adalah kembali pada sudut pandang pembaca. Jangan

sampai kemudian kita membuat berita untuk kepentingan kita sendiri. Ibaratnya masak, tetapi masak dengan selera kita sendiri. Mungkin saya senang dengan masakan yang asin-asin, belum tentu teman-teman semua suka. Ibaratnya kita bikin restoran, kita akan membuat masakan untuk *customer* kita. Kita membuat berita itu bukan untuk kita, tapi untuk pembaca kita, untuk khalayak kita. Jadi kita harus memotret apa sih yang dibutuhkan pembaca kita. Mungkin kalau sudut pandang antara media yang satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, meskipun isunya sama. Contoh ini sebuah isu ya. Harian Jogja menyikapinya dari sisi sini, media lain menyikapinya dari sini, media lain dari sini. Nah, tapi hal yang kita lakukan pertama ketika menyoroti sesuatu persoalan, kita harus bisa memberikan solusi, bukan hanya sekedar mengkritik, kita harus memberikan perspektif yang solutif.

4. Apa saja tantangan utama dalam menyusun berita yang akurat dan relevan bagi pembaca? Jawab: Relevan ini menjadi hal yang menjadi kunci. Kita buat berita untuk apa kalau tidak relevan? Kita harus membuat berita yang relevan, kontekstual dengan kebutuhan membaca. Relevan bagi pembaca itu penting dan harus benar-benar dipegang kalau industri ini mau s*urvive*. Tantangannya adalah redaksi harus punya *mindset* yang sama. Memang tidak mudah mengubah mindset apalagi dulu mungkin terminologinya *bad news is good news*, mungkin sekarang kita *good news is good news too.* Pembaca kita juga sudah berubah apalagi di online. Kalau anda mungkin mencermati online, berita yang serius-serius kadang jumlah pembacanya cuma seberapa. Tapi berita yang simpel contohnya jadwal kereta kereta KRL, pembacanya bisa 5 kali lipat ketimbang berita yang agak serius. Artinya ini relevan sesuai dengan kebutuhan kita.

c. Pertanyaan Khusus

1. Bagaimana media *Harianjogja.com* menanggapi pernyataan Ade Armando terkait praktik politik dinasti di Yogyakarta yang disebut tidak demokratis karena tidak melalui pemilihan umum? Jawab: Ya, saya kira ada hal yang perlu di-*clear*kan dalam persoalan ini. Bahwa apapun itu kita harus

mengacu pada undang-undang yang ada. DIY tidak bisa disamakan dengan provinsi yang lain. Kenapa? Konstitusi atau aturan hukumnya sudah ada, Undang-Undang Keistimewaan. Undang-Undang Keistimewaan itu mengatur soal kepala daerah, bahwa seorang sultan adalah sekaligus gubernur. Sampai saat ini, sampai detik ini, masih ada undang-undang itu. Makanya menurut saya Ade Armando juga tidak bisa menyamakan Jogja dengan profesi lain apalagi mengatakan politik dinasti. Aturannya jelas kok. Sistem pemerintahan Jogja itu cuma menjalankan aturan main yang dibuat oleh pusat. Karena ada undang-undang keistimewaan. Itu saja. Jadi menurut saya, Ade yang malah kurang cermat dalam memberikan pernyataan, atau mungkin lupa dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan.

2. Dalam beberapa berita yang menjelaskan kronologi pernyataan kontroversial Ade Armando, *Harianjogja.com* menggunakan kutipan dari video Ade Armando yang viral di sosial media. Bagaimana kebijakan redaksi dalam memilih sumber berita, terutama ketika tidak ada wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan? Jawab: Memang kita kalau dalam dunia online ya, kita hanya mem-*follow up* atau menggunakan video yang diunggah dari Ade Armando, kemudian meminta tanggapan kepada pihak-pihak terkait. Contoh pada waktu itu, kami meminta tanggapan bagaimana pandangan dari Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kemudian kami juga minta pandangan dari pihak-pihak lain yang mungkin bukan dari keraton, tapi misalnya dari kalangan akademisi yang pandangannya jauh lebih netral. Kita media online di Jogja memang mengalami keterbatasan atau kendala dalam menghubungi Ade Armando ini. Semuanya pastilah. Cuma kami memastikan yang kita *upload* ini, yang kita unggah di media online ini tidak melanggar prinsip-prinsip jurnalis tadi. Misalnya *cover both side.* Kami cuma sebatas bagaimana mencari tanggapan pernyataan dari Ade Armando itu, dari pihak-pihak terkait, pihak yang berkompeten, pihak yang relevan untuk memberikan pernyataan.
3. Bagaimana redaksi memastikan bahwa berita tetap menghadirkan

perspektif yang berimbang dan tidak terlalu berpihak pada satu sudut pandang tertentu? Jawab: Situasi pada saat itu memang sedang situasi politik ya, panas. Kalau kami minta pandangan ini dari partai politik, ya mungkin dari partai politik yang terlibat langsung pada saat itu menggodok Undang-Undang Keistimewaan, sehingga ini menjadi *clear,* menjadi jelas ada sejarahnya. Nah yang paling penting adalah kita sebagai media harus memberikan edukasi pada masyarakat. Mohon maaf kami tidak mendukung A atau B. Kami mendukung pada sebuah kebenaran. Kalau memang Ade Armando itu salah, ya pasti akan kami katakan salah. Kalau Ade Armando itu benar ya pasti akan kami katakan benar. Persoalannya apa yang disampaikan melalui video itu adalah mungkin kurang pas, apalagi ketika dikaitkan dengan undang-undang yang ada. Apalagi dia menyinggung masalah politik dinasti. Saya kira media ini wajib hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerahkan. Jangan sampai video yang mungkin terlanjur menyebar itu justru kemudian malah mem-*brain wash* masyarakat yang notabene informasi itu kurang tepat. Sekali lagi bahwa di Jogja ini, di DIY ini seperti itu karena ada undang-undang. Sudah jelas peraturannya seperti apa, dasarnya seperti apa. Saya kira teman-teman juga menjalankan aturan saja, bukan politik dinasti menurut kami.

4. Sejauh mana pertimbangan redaksi dalam memilih kata-kata dalam berita agar tetap sesuai dengan kode etik jurnalistik dan tidak menimbulkan kesan provokatif? Jawab: Saya kira media jangan menjadi bagian yang memprovokasi atau memperkeruh suasana. Media harus benar-benar hadir sebagai bagian yang mencerahkan. Media harus hadir sebagai entitas yang memberikan edukasi, memberikan informasi. Itu saja. Jangan menjadi bagian yang memanas-manasi. Kita harus buka juga, di luar sana ada media-media yang membikin konten, membikin berita yang cenderung provokatif. Saya kira Harian Jogja tidak mengambil pilihan itu. Kita sederhana kok, bahwa dalam bermedia, kalau kita menjadi bagian dari masyarakat pres, ya sudah ikuti ajak aturan main itu. *So simple* saja. Harus akurat, harus *balance*, harus *clear.* Enggak ada kata-kata harus kritik tajam,

enggak ada. Harus keras, enggak ada. Bahwa kita menjalankan kritik, iya. Tapi bagi kami kritik itu kritik yang solutif. Inilah garis pemberitaan kami. Kritik yang solutif bukan hanya asal kritik, tapi kita menawarkan sesuatu yang solutif. Nah itulah media yang mencerahkan. Hadir dengan solusi-solusi, bukan hanya mewakili saja.

5. Bagaimana *Harianjogja.com* memastikan bahwa berita yang diterbitkan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu dalam isu-isu sensitif seperti ini? Jawab: Saya kira kan begini, dalam undang-undang kita jelas bahwa kita itu mengutamakan kepentingan publik ya. Esensi kita bermedia itu adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Kepentingan publik itu apa, oh butuh informasi, butuh hiburan, butuh hal-hal yang edukatif, butuh sesuatu yang bisa mengadvokasi kebenaran. Kita menyuarakan kebenaran, bukan kemudian lantas kita tunduk atau terkooptasi pada kepentingan politik tertentu. Bahwa kita menyajikan informasi politik iya, tapi yang kita pegang adalah muaranya, yaitu untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, dan menjunjung kebenaran. Kita memiliki prinsip bahwa kita harus menyajikan berita yang akurat, *balance*, dan *clear.* Sekali kita tidak menyajikan akurat, *trust* media ini tidak akan baik, apalagi kalau kita sudah terjebak pada *clickbait* yang menyajikan informasi judulnya dengan badan beritanya tidak sesuai. Pembaca tidak akan menjadikan media itu sebagai referensi dia lagi, kami tidak mau seperti itu. Sudahlah kami mau tampil apa adanya yang penting kami menyajikan informasi yang akurat dan *clear.* Kami menyajikan informasi yang edukatif, informatif sehingga media ini benar-benar menjadi navigasi informasi bagi masyarakat, menjadi panduan, menjadi referensi, itu saja.
6. Terkait dengan *clickbait,* ada berita yang berjudul "*Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo*," namun tanggapan GKR Hemas hanya diberikan porsi yang sedikit, selebihnya lebih banyak membahas kronologi pernyataan dari Ade Armando. Apakah hal tersebut termasuk dalam *clickbait*? Jawab:

Enggak, itu tetap aman meskipun porsinya nya sedikit seperti itu. Walaupun sebenarnya begini, dalam jurnal jurnalisme kami sebenarnya ingin memberikan porsi yang agak berimbang, cuma kadang-kadang narasumber itu maunya hanya memberikan sepatah-dua patah kata. Tidak apa, tapi itu sudah bisa dikatakan untuk menggugurkan bahwa kami sudah meminta tanggapan. Maunya sih kita memberikan banyak komentar yang komprehensif, sehingga pembaca kami juga paham. Namun namanya juga narasumber, ya beda-beda, ada yang mau ngomong banyak, ada yang ngomongnya lumayan, ada yang tipikalnya pelit, tapi itu sudah bisa dikatakan cukup memberikan tanggapan. Itu tidak masalah.